



A.A. NAVIS

Alam
Terkembang
Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

Alam Terkembang Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

A.A. NAVIS

Alam Terkembang Jadi Guru

ADAT DAN KEBUDAYAAN MINANGKABAU

ALAM TERKEMBANG JADI GURU
Adat dan Kebudayaan Minangkabau

© A.A. Navis

No. 16/84

Pengantar: Dr. Taufik Abdullah

Pendesain Grafis & Kulit Muka: T. Ramadhan Bouqie

Penerbit PT Pustaka Grafitipers
Pusat Perdagangan Senen Blok II, Lantai III
Jakarta 10410
Anggota IKAPI

Cetakan Pertama 1984
Cetakan Kedua 1986

Percetakan PT Temprint, Jakarta

PENGANTAR PENERBIT

Adat Minang merupakan salah satu adat yang unik di Indonesia, antara lain karena sifat matrilineal yang ada pada masyarakat itu. Beberapa buku dan telaah tentang adat Minang telah diterbitkan, namun rasanya masih ada saja yang "tertinggal" tidak tersampaikan atau tercatat. Dan tidak jarang yang "tertinggal" itu ternyata penting, atau setidaknya menarik, untuk diketahui.

Dalam buku yang disusun A.A. Navis ini, hal-hal yang penting dan menarik tentang adat Minang itu banyak ditemukan. Di samping sebagai budayawan, Navis adalah seorang sastrawan; dan buku ini pun ditulis dengan gaya yang lancar dan berkadar informasi tinggi. Kami yakin, buku ini akan bisa menambah pengetahuan kita tentang adat Minang pada khususnya, dan kebudayaan Indonesia pada umumnya. Dan karangan Navis ini mungkin malah bisa menjadi salah satu buku baku tentang adat dan kebudayaan Minang.

Jakarta, Juli 1984

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	VII
"Studi Adat sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau"	
oleh Taufik Abdullah	IX
Pengantar Penulis	XXV
Sejarah	1
Tambo	45
Falsafah Alam	59
Undang-undang dan Hukum	85
Penghulu	119
Harta dan Pusaka	149
Rumah Gadang	171
Perkawinan	193
Kesusastraan	229
Permainan Rakyat	263
Daftar Bacaan.....	285
Indeks	291

Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau

Tentu saja soalnya terletak pada cara pendekatan. Kalau pendekatan saya dipakai, maka salah satu indikator untuk menentukan bahwa proses melemahnya kemantapan tradisional telah bermula ialah ketika peserta (*participant*) kebudayaan mulai secara kreatif mempersoalkan tuntutan dari dasar nilai kulturalnya.

Kelanjutan proses itu akan makin jelas di saat mereka mencoba pula membuat jarak dengan dasar nilai kultural itu dan secara sadar mencoba menerangkan apa makna yang sesungguhnya dari dasar nilai itu. Dengan kata lain mereka bukan saja tidak membiarkan diri terlarut dan terkulai dalam keberlakuan dasar nilai kultural, tetapi bahkan juga ingin merangkul lebih keras. Mereka sebagai peserta makin sadar, bahwa nilai dasar yang dimiliki itu merupakan sesuatu yang berharga untuk selalu dipelihara. Dalam situasi seperti inilah biasanya patokan-patokan dasar nilai kultural tersebut diperjelas. Dengan begini dasar nilai itu di satu pihak secara rasional bisa dimengerti, dan di pihak lain ia dijadikan pula sebagai ukuran dalam menghadapi dan menjalankan perubahan. Sikap inilah biasanya disebut tradisionalisme – perubahan yang terjadi semestinyalah berlandaskan pada kelanjutan berlakunya tradisi.

Tentu bisa diduga bahwa tradisionalisme mengandung unsur-unsur konflik yang kadang-kadang juga tak terlalu mudah diatasi. Sampai dimanakah perubahan itu masih sah, tanpa mengorbankan keberlanjutan berlakunya nilai dasar tradisional. Sebaliknya revisi apakah yang harus dilakukan untuk meniadakan akibat negatif dari perubahan struktural, baik yang bersumber dari

dalam ataupun yang dipaksakan dari luar, yang tak terelakkan? Maka berbagai pasangan konflik pun bermunculan. Masyarakat yang sedang mengalami proses "detradisionalisasi" itu seakan-akan merupakan jaringan-konflik yang saling berkaitan. Namun jarang suatu konflik yang demikian sentral sehingga mengancam polarisasi sosial yang keras. Sebab konflik yang satu — antara dua golongan pendapat — bisa dilunakkan oleh konflik yang lain, ketika komposisi dari pro dan kontra telah berbeda. Jadi sesungguhnya kemajemukan konflik tersebut bukan saja bisa merupakan faktor pembendung proses disintegrasi sosial, tetapi juga sering menjadi unsur yang sangat menentukan bagi terjaganya integrasi. Karena itulah proses detradisionalisasi ini — suatu proses yang tentu saja tak terlepas dari perubahan sosial-ekonomis yang terjadi — bisa berlangsung lama. Seandainya suatu perubahan tanpa diinginkan terjadi, maka perubahan itu harus dilihat sedemikian rupa sehingga bukan saja secara kultural bisa dimengerti, tetapi juga pemasukannya ke dalam perbendaharaan kultural tidaklah merusak. Dengan ini *chaos* ingin dihindarkan dan dengan ini pula keberlakuan yang berlanjut dari nilai dasar tradisional ingin dipertahankan.

Tentu saja apa yang saya bicarakan di atas lebih merupakan suatu gejala intelektual. Kesemuanya lebih merupakan pengumpulan para cendekiawan, para peserta kebudayaan yang paling sadar, untuk selalu ingin memberi makna terhadap dunia sendiri dan yang mengitari diri. Meskipun gagasan di atas memberi kesan bahwa saya ingin memberikan bentukan teoritis terhadap gejala yang dihadapi masyarakat tradisional ketika berhadapan dengan perubahan struktural yang terjadi, tetapi saya tidaklah bertolak dari pemikiran spekulatif. Hal-hal di atas berasal dari hasil observasi saya atas peristiwa sosial-kultural Sumatera Barat di awal abad 20 ini.

Tentu saja situasi itu tidaklah muncul begitu saja. Gerakan Padri yang kemudian meletus menjadi "perang saudara", yang terjadi di awal abad 19, telah memaksa masyarakat Minangkabau merevisi lagi definisi dari dunianya, dari "alam Minangkabau". Bagaimanakah hal-hal yang paradoksial dari dasar kultural harus secara kreatif diselesaikan? Pencarian definisi yang sesuai ini tidaklah sekadar usaha untuk menemukan dasar "ideologi" yang baru yang bisa selesai pada tingkat formalnya. Definisi baru tersebut langsung menyentuh hal-hal yang bersifat struktural. Meskipun pemurnian kehidupan keagamaan¹ merupakan tujuan utama gerakan Padri, hasil akhir yang ingin ditemukan ialah suatu "alam Minangkabau" yang baru, yang diredhai dan

1 Mengenai aspek "pemurnian agama" dari gerakan Padri, lihat umpamanya H.A. Steyn Oarve, "Kaum Padari (Padri) di Padang Darat Pulau Sumatera" (terj.) dalam Taufik Abdullah (ed.) *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1979: 108-127. Lihat juga memoir Fakih Saghir, yang terkenal sebagai Syekh Jalaluddin, salah seorang ulama yang terlibat dalam konflik agama ini. Syekh

yang haq.

Saya tak tahu bagaimana jadinya Minangkabau jika Belanda tak campur tangan dalam Perang Padri ini. Tetapi sementara perang itu mengalami transformasi — dari pergolakan kultural menjadi perang kolonialisme — suatu definisi baru makin memperlihatkan dirinya. "Alam Minangkabau" tidak saja harus dianggap sebagai dunia yang berlandaskan adat dan Islam, tetapi hirarki dari keduanya telah pula diperjelas. Tidak lagi adat dan Islam yang paling mendukung, tetapi "adat bersandar syarah. Syarah bersandar Kitabullah." Selanjutnya dikatakan bahwa "agama mengata, adat memakai".² Maka sejak itu pemantulan struktural dari definisi kultural ini adalah merupakan salah satu tema pokok dalam sejarah Minangkabau. Dari sudut kekuasaan dan kewenangan, rumusan kultural ini mempertanyakan wibawa siapa yang harus lebih berfungsi dan kata siapa yang harus lebih memutuskan. Pemasukan unsur keulamaan ke dalam struktur kekuasaan, yang diwujudkan dalam keanggotaan di dalam *balai adat*, ternyata hanyalah merupakan pelebaran dari elite kekuasaan. Sedangkan esensi keulamaan tertinggal di luar. Keulamaan, yang bertolak dari penguasaan ilmu dan pengakuan sosial, tak bisa terlibat dalam proses pewarisan jabatan dengan memakai patokan matrilineal itu. Dari sudut sistem pewarisan masalahnya bahkan lebih pelik. Berbagai konflik yang terjadi makin memperlihatkan betapa "nikmatnya" hidup dalam kemajemukan hukum.³

Konflik terbuka kadang-kadang terjadi dan perdebatan terus berlanjut. Apalagi di samping itu masalah pemurnian (orthoksi) agama makin lama makin menonjol pula. Dalam hal ini yang dipermasalahkan tidaklah sekadar definisi "alam Minangkabau" tetapi sistem perilaku dan kebersihan keyakinan keagamaan dari noda-noda yang bisa mengurangi kemutlakan ke-Esa-an Allah. Betapapun fundamental dan mendasarnya hal-hal ini, kesemuanya bersumber dari dinamik kebudayaan sendiri. Masalahnya menjadi sangat berbeda ketika tantangan yang dihadapi bukan bertolak tiang-tiang "alam Minangkabau" sendiri. Soalnya menjadi lain sekali di saat tantangan yang datang itu

Djilal-eddin, *Verhaal van der aanvang der Padri onlusten op Sumatra* (diselenggarakan oleh Dr. J.J. Hollander). Leiden 1837. Ditulis dalam bahasa Melayu ("gaya" Minangkabau) huruf "Jawi", memoir ini pernah ditranskripsikan oleh M. Radjab untuk keperluan Seminar Kebudayaan Minangkabau 1970. Studi terhadap memoir ini dilakukan oleh Christine Dobbin, "Islamic Revivalism in Minangkabau at the Turn of the Nineteenth Century", *Modern Asian Studies*, 8,3 (1979): 319-356. Lihat juga M. Radjab, *Perang Padri*, Jakarta: Balai Pustaka, 1954.

2 Taufik Abdullah, "Adat and Islam": An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia*, 2 (October 1966): 1-24.

3 Mengenai hal ini telah cukup banyak studi yang dihasilkan. Yang terakhir dan paling lengkap ialah Franz von Benda-Beckman, *Property in Social Continuity*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1975.

Tentang corak konflik di Minangkabau, lihat Nancy Tanner, "Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia", *Indonesia*, 8: 21-67.

berasal dari kekuasaan asing. Perang Padri ternyata tidak saja berakhir dengan didapatkannya suatu definisi baru tentang "alam Minangkabau", yang serta merta juga menuntut pemecahan dalam sistem sosial dan hukum, tetapi juga, dan lebih mudah dilihat dan dirasakan, bercokolnya dominasi politik dan meliter Belanda. Dengan dominasi corak hubungan yang bersifat atasan-dan-bawahan pun makin pula memperlihatkan dirinya.⁴ Inilah suasana yang jelas dirasakan di awal abad 20.

Berhadapan dengan situasi baru ini, beberapa penghulu adat Minangkabau, para *literati*, yang tinggal di kota, berhadapan langsung dengan situasi dominasi ini, mulai secara bersungguh-sungguh merenung tentang hakikat "alam Minangkabau" dan tuntutan-tuntutan kultural yang terlekat di dalamnya. Dalam mempertentangkan tuntutan kultural ini dengan kesempatan yang terbuka dalam situasi baru yang dipaksakan dari luar itu, perenungan tersebut tidaklah dibiarkan untuk menjadi kontemplatif yang melarikan diri. Perenungan itu bahkan menjadi agenda untuk tindakan yang dilakukan. Maka berbagai kegiatan pun dijalankan. Sekolah kerajinan wanita didirikan, surat kabar (termasuk sebuah surat kabar wanita) diterbitkan, dan studi-studi-fonds digerakkan. Pada waktu itu barangkali tak ada kata yang lebih populer daripada "kemajuan", demi mencapai "dunia maju". Bukankah Minangkabau masyarakat matrilineal? Kalau begitu, mestinyalah wanita bersekolah. Bukankah tuntutan bagi putra Minangkabau untuk "meninggikan semarak Gunung Merapi?" Sebab itu mengapa tidak terjun dalam perlombaan untuk mendapatkan "kemajuan"? Begitu kata ajaran adat, demikian pula *tambo* melukiskan dan bahkan *kaba* telah memberi contoh bagaimana jadinya jika ketentuan itu diingkari. Sementara itu dari pihak lain, yang bertolak dari tiang "alam Minangkabau" yang satu lagi, Islam, bukan saja menginginkan berlanjutnya pemurnian dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga menjadikan agama sebagai dasar yang kokoh bagi "kemajuan". Dalam suasana yang tampaknya serba optimis ini, konflik tak terelakkan. Kemajuan? Tetapi sampai di mana? Kemajuan barulah benar dan dibenarkan jika ia sadar akan batas antara "haram" dan "halal", antara haq dan bathil.⁵ Belum lagi jika dipertimbangkan pula reaksi mereka yang menentang peralihan dari tata cara "nenek moyang kita". Maka bukan saja perdebatan yang terjadi, segala makian pun diobral — setidaknya demikianlah yang terpantul dalam tulisan-tulisan di surat-surat

4 Tentang "pemecahan kultural" terhadap masalah politik yang tak teratasi ini, lihat Taufik Abdullah, "The Making of the schakel society" dalam *Conference on Modern Indonesian History* (July 18-19, 1975). Madison: Center of Southeast Asian History, University of Wisconsin, 13-25. Dimuat juga dalam *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, VI, 3 (Agustus 1976): 13-30.

5 Situasi, digambarkan dalam Taufik Abdullah "Modernization in the Minangkabau world: West Sumatra in the Early Decades of the 20th Century" dalam Claire Holt et al. (eds.), *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca, London: Cornell University Press, 1972, 179-245.

kabar.

Dari situasi kompleks yang selintas terlukis di atas, saya memang ingin mengatakan bahwa perenungan yang kreatif terhadap tradisi bukan saja menghasilkan agenda tindakan, tetapi juga kontrol sampai di mana perubahan itu harus berjalan. Dorongan dan sekaligus pembatasan yang diberikan tradisi menghasilkan suasana intelektual dan sosial yang tak selalu menenteramkan. Dalam suasana inilah pendidikan Barat, ataupun Islam "modern" berkembang cukup pesat di Minangkabau. Suasana ini bukan saja menyebabkan dimulainya tradisi merantau yang baru, yaitu menuntut ilmu modern ke Jawa, atau bahkan ke Negeri Belanda, tetapi juga, menurut statistik pemerintah Hindia Belanda, menjadikan Minangkabau sebagai "daerah Islam" yang paling berpendidikan. Namun suasana ini juga yang melatarbelakangi berbagai kegiatan politik, mulai dari pemberontakan-pemberontakan kecil (1908) dan yang dibesar-besarkan dengan sebutan pemberontakan komunis di Silungkang (1927), sampai dengan aktivitas partai-partai radikal di tahun 1930-an.

Dari sudut sejarah intelektual, maka ada dua aspek yang segera tampil di hadapan saya. Pertama, di samping merupakan kancah perdebatan tentang bagaimanakah bentuk dan corak "kemajuan" yang baik itu, suasana yang diuraikan di atas memberikan pula bentuk literer dari perdebatan itu sendiri. Saya kira "sastra protes" yang dilahirkan para terpelajar Minangkabau, yang biasa pula dianggap sebagai pelopor sastra Indonesia modern, bisa dikembalikan kepada suasana sosial-kultural yang terjadi sejak awal abad ini.⁶ Bukankah tragedi yang banyak dilukiskan itu berkisar pada ketidaksediaan untuk menerima akibat logis dari sikap yang telah terbuka terhadap "dunia maju"? Merantau lah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, tetapi sadarlah bahwa ninik-mamak lah yang memungkinkan itu semua, dan pada ninik-mamak pulalah kepatuhan harus diberikan. Ke rantau hanya selama "di rumah berguna belum". Rantau hanyalah peralihan sementara, begitu secara fisik, demikian pula dalam panggilan kultural. Dan bagi saya, salah satu ketinggian nilai *Salah Asuhan* dari Abdul Muis sebagai dokumen sosial, ialah kemampuannya melukiskan tragedi keterombang-ambing "dorongan" dan "hambatan" dari tradisi. Tetapi baiklah hal ini saya pulangkan saja pada berbagai studi sastra yang telah dijalankan dan pada ahli serta kritikus sastra.⁷ Hal yang kedualah, pada

6 Tentang literatur itu sendiri, lihat antara lain A. Teeuw, *Modern Indonesian Literature*, Vol. 1. Tentang kemungkinan hubungan suasana sosial dengan salah satu novel, *Siti Nurbaja*, telah saya bicarakan dalam komentar singkat saya terhadap tulisan Harry Aveling ("Siti Nurbaja": Some reconsiderations"), *Bijdragen*, 126. 2 (1970): 242-248.

7 *Salah Asuhan* adalah satu novel Indonesia yang paling banyak dijadikan sasaran studi khusus. Antara lain, David de Queljo, *Marginal Man in a Colonial Society: Abdoel Moeis' "Salah Asuhan"*, Athens, Ohio: Ohio University Center for Romantic Tradition in the Early Indonesian Novel, *Modern Asian Studies*, Vol. 2 (April 1973): 179-192.

kesempatan ini, yang lebih menarik perhatian saya.

Aspek yang kedua ialah berlanjutnya usaha untuk mengerti konsep ideal atau nilai-nilai dasar yang diberikan tradisi. Hal ini juga diteruskan dengan usaha untuk menerangkannya dengan secara rasional. Simbol-simbol yang sering terpantul dalam *tambo* ditafsirkan sehingga bisa sesuatu yang lebih *plausible*, yang kemungkinan kesejarahannya diperkirakan bisa masuk akal. Legenda dan mithos tidak hanya dibiarkan berbicara melalui simbol-simbol kultural yang telah berakar, tetapi dijadikan eksplisit. Misteri ingin dihilangkan, bukan dengan memperlihatkan realitas yang telah diselimutinya, tetapi, terutama, mencari moral yang mendasarinya. Begitu sejak awal abad XX, ketika tradisi mulai durenungkan, sampai kini, berbagai buku telah ditulis, sekian perdebatan telah dilakukan, dan entah berapa pula pertemuan ilmiah ataupun "setengah ilmiah" yang telah dijalankan. Kesemuanya memperlihatkan usaha mengerti dan menerangkan lagi dasar-dasar konseptual dari "alam Minangkabau".

Karena kecenderungan intelektual ini cukup penting untuk mengerti masyarakat dan kebudayaan Minangkabau, barangkali tak ada salahnya saya memberikan berbagai ilustrasi. Ketika Sekolah Raja (*Kweekschool*) di Bukittinggi merayakan lustrumnya di awal abad ini, maka murid-muridnya mengadakan pertunjukan sandiwara, yang konon sangat memuaskan para hadirin. Mereka mementaskan bagian-bagian yang paling menarik dari *Kaba Cindua Mato*.⁸ Sukses ini diulang lagi oleh berbagai sekolah dan organisasi pemuda, seperti Jong Sumatranen Bond, di dalam ataupun di luar Sumatera Barat. Bahkan Abdul Muis ketika masih asyik dalam Sarekat Islam, pernah pula menulis drama dari *kaba* ini. Di samping *Cindua Mato*, ternyata yang paling populer di kalangan pelajar, selama dasawarsa kedua sampai dengan keempat dari abad ini, ialah *Kaba Sabai Nan Aluih*. Konon, menurut cerita orang tua-tua, di awal tahun 1920-an, si penyair-politikus, Rustam Effendy, pernah menjadi "bintang pentas" dari *kaba* ini di Sumatera Barat. Drama yang berbahasa Indonesia dari *kaba* ini pernah ditulis oleh A.K. Gani, mahasiswa kedokteran, yang pernah main film, kemudian aktif dalam Gerindo, partai nasionalis yang radikal.

Tetapi apa artinya ini semua? Abdul Muis mungkin bisa memberi jawaban. Ia mengatakan, drama *Cindua Mato* sengaja ditulisnya agar kaum terpelajar menyadari bahwa kehidupan demokrasi telah berurat-berakar dalam kebudayaan kita. Jadi tidaklah terlalu mengherankan jika alasan yang sama dipakai pula oleh Datuk Sutan Maharadja ("Bapak Jurnalistik Melayu," kata Van

8 Berbagai edisi dari *kaba* ini diterbitkan. Edisi terakhir, yang belum selesai, ditulis oleh M.R. Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, *Cindua Mato*, Bukittinggi: Pustaka Saadiah, 1973(?). Studi anthropologis pendek tentang *kaba* ini telah ditulis oleh Taufik Abdullah, "Some Notes on the *Kaba Tjindue Mato*: An Example of Minangkabau Traditional Literature", *Indonesia*, 9 (April 1970): 1-22.

Ronkel)⁹ ketika ia, sebagai penghulu adat yang berasal dari *Luhak Nan Tiga*, mengadakan "revolusi adat" di Padang, di awal abad ini. Dengan "revolusi" ini ia dan kawan-kawannya dari pedalaman (dari *darek*, istilahnya) menantang Tuanku Regen dan para bangsawan Padang, yang dikatakan telah mengikuti adat-Aceh, yang mengenal hirarki kebangsawanan. Jadi tak "demokratis". Dan artinya juga tak "modern" dan bukan pula "Minangkabau".¹⁰

Dan sudut inilah barangkali usaha memperkenalkan dan mempopulerkan *kaba* dan *tambo* bisa pula dilihat. Mungkin benar pula anggapan yang mengatakan bahwa *Kaba Sabai Nan Aluih* tidaklah sesuai dengan struktur masyarakat Minangkabau. Tetapi masalahnya bukan pada *plot* dan juga bukan pula pada wadah sosial dalam mana *plot* itu bermain yang lebih penting, tetapi pada pesan moral yang ingin disampaikan. Maka apa yang lebih sesuai daripada kisah si Sabai, yang lemah-lembut, tetapi tegas — "semut terinjak tak mati, alu bertaring patah tiga" — untuk menekankan pentingnya harga diri? Dan bukanlah hal yang aneh jika *kaba* ini sangat populer di kalangan terpelajar di saat perdebatan dengan "kaum kuno" sedang menjadi-jadi.

Peneguhan moral tradisional dalam menghadapi dan menjalani perubahan "demi kemajuan", adalah salah satu corak dari kecenderungan intelektual yang telah saya singgung di atas. Dalam hal ini pulalah penciptaan *Kaba Rancak di Labueh* bisa dilihat.¹¹ *Kaba* bersajak karangan Datuk Paduko Alam (ahli adat yang sangat terkemuka dari Payakumbuh) ini, bukan saja contoh dari puisi indah yang dihasilkan oleh kebudayaan yang rhetoris, seperti Minangkabau, tetapi juga adalah *expose* dari ajaran moral Minangkabau menghadapi zaman peralihan. Dan dalam hal ini Datuk Paduko Alam tidaklah sendirian. Mungkin terasa berlebih-lebihan, tetapi kalau diperhatikan, 'sastra protes', yang entah karena apa sering disebut antiadat itu, sering sekali memakai moral lama sebagai alat perlawanan kesewenang-wenangan wibawa dan kekuasaan adat atau orang tua. Jadi 'sastra protes' itu lebih merupakan suatu tuntutan terhadap sistem perilaku daripada gugatan terhadap struktur dan dasar moralnya.

Penerbitan buku-buku dan tulisan tentang adat dan *tambo* dan kadang-kadang diikuti dengan penekanan akan keberlakuannya dalam zaman sekarang adalah corak kedua. Dengan dasar inilah antara lain Datuk Sutan Maharadja¹² menerbitkan surat kabar *Oetoesan Melajoe* (1913-1922), *Soenting*

9 Ph.S. Van Ronkel. *Rapport Betreffende de Godsdienstige Verschijnselen ter Sumatra's Westkust*. Batavia: Landsdrukkerij, 1916.

10 B. Schrieke. *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*. Jakarta: Bhratara, terjemahan dari "Bijdrage tot de Bibliographie van thuidige Godsdienstige beweging ter Sumatra's Westkust", *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap*, 59 (1920): 249-325.

11 A. Johns telah menerjemahkan dengan indah *kaba* ini ke dalam bahasa Inggris. A. Johns. *The Kaba Rantjak Dilabueh: A Specimen of Traditional Literature of Central Sumatra*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1958.

12 Lihat Taufik Abdullah "Modernization".

Melajoe (1915), surat kabar wanita yang "resminya" dipimpin oleh putrinya, Ratna Djoewita, dan Rohana Kudus ("Kartini dari Sumatra").¹³ Dalam kedua surat kabar tersebut Datuk ini dan kawan-kawannya tak henti-hentinya menggauli adat Minangkabau, sebagai pola ideal untuk bertindak dan memperlihatkan "keagungannya" dalam menghadapi zaman baru. Dalam surat kabar *Oetoesan Melajoe* diskusi adat diadakan antara para ahli adat. Dalam surat kabar ini pula Datuk Sutan Maharadjo, menyerang para terpelajar Barat yang telah melepaskan "pusaka nenek moyang kita", Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katemanggungan (perumus legendaris dari adat Minangkabau).

Datuk Sutan Maharadjo, pendiri pertama dari partai-adat, adalah pula pelopor dalam usaha memperkenalkan norma adat dan *tambo* alam Minangkabau kepada masyarakat, yang makin mengenal tulis-baca. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo. Otoritasnya dalam hukum adat cukup diakui sehingga bukunya dipakai oleh Schrieke sebagai pegangan dalam menguraikan masyarakat Minangkabau yang sedang dilanda krisis akibat peralihan sosial-ekonomis.¹⁴

Dengan gaya yang berbeda dan temperamen yang tak pula sama serta corak aktivitas juga berlainan, saya kira Datuk Sutan Maharadjo dari Sulit Air, Datuk Paduko Alam dari Payakumbuh, dan Datuk Sanggoeno Diradjo dari Sungayang (Batusangkar), adalah tiga dari tokoh *literati* Minangkabau yang paling kreatif pada perempat pertama dari abad ini. Setidaknya merekalah yang memelopori dalam usaha perumusan moral, ajaran, dan hukum adat Minangkabau dengan memakai media modern dan dengan sadar pula mengarahkan pembicaraan mereka yang sedang mengalami proses urbanisme. Dengan begitu mereka, terutama Datuk Sutan Maharadjo, yang tak pernah sempat menyelesaikan satu pun buku yang lengkap, dan Datuk Sanggoeno Diradjo, yang menulis beberapa buku,¹⁵ meletakkan dasar bagi penulisan adat Minangkabau yang "modern". Tetapi kecenderungan yang sangat keras Datuk Sutan Maharadja untuk menandakan identifikasi adat dengan ajaran tharekat (antara lain Martabat Tujuh) serta kecurigaannya terhadap segala pikiran dan perubahan yang dianggapnya telah menodai "adat yang sesungguhnya", menyebabkan ia terlibat dalam perdebatan yang tak henti dengan golongan Kaum Muda, yaitu para reformis Islam dan pemuda terpelajar Barat. Usaha Datuk Sanggoeno

13 Tentang Rohana Kudus sebagai pelopor gerakan wanita di Sumatera Barat, lihat Tamar Djaja, *Rohana Kudus: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1980. Ia adalah kakak tertua dari Sutan Sjahrir.

14 B. Schrieke, "The Causes and Effects of Communism on the West Coast Sumatra", dalam *Indonesian Sociological Studies*. The Hague/Bandung: W. van Hoeve, 1955. Part One.

15 Buku-buku Datuk Sanggoeno Diradjo antara lain:

1. *Tjoerai Payaran Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*, Fort de Kock, 19..

2. *Kitab Perjatoeran Adat Lembaga Alam Minangkabau*, 2 jilid. Fort de Kock, 1923.

3. *Meestike Adat Alam Minangkabau* (Jakarta: Balai Pustaka, 1953).

Diradjo untuk memperkenalkan kategorisasi baru tentang adat dan "menghilangkan" misteri dari *tambo*, sehingga diharap agar lebih merupakan suatu "sejarah", serta merta mendapat tanggapan yang keras dari Abdul Karim Amaroellah Al danawi (Dr. Syekh A. Karim Amarullah, ayah almarhum Buya Hamka). Ulama ini menentang kategori-kategori adat yang dikemukakan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo, yang menurut pikirannya seakan-akan melupakan proses Islamisasi yang berkelanjutan dalam dunia pemikiran adat. Ia juga mengejek usaha "rekonstruksi" sejarah dari *tambo*, yang dirasakannya bukan saja salah dari sudut "kenyataan historis", tetapi juga tak benar dari sudut logika.¹⁶

Masa awal dari usaha peneguhan adat di saat perubahan sosial, yang dirasakan telah memperlihatkan akibatnya, memang dipenuhi oleh perdebatan. Masalahnya bukan saja sekadar untuk mempertahankan "adat lama, pusaka usang", tetapi juga menemukan moral tradisi yang lebih sesuai. Ketika berbagai ketentuan hukum adat sudah tak lagi berlaku — "*dahulu adat nan bapakai, kini rodi nan paguno*" — dan di saat pranata kekuasaan adat telah makin tak berarti, maka keinginan untuk merangkul adat, sebagai simbol dari ke-Minangkabau-an, makin mendesak. Dalam usaha ini pluralisasi sosial yang telah bermula sebagai akibat langsung dari dominasi politik dan ekonomi Belanda, juga menimbulkan dirinya. Inilah salah satu faktor terjadinya perdebatan tersebut. Jadi yang dihadapi para pendukung adat bukanlah sekadar situasi kultural yang makin berubah, tetapi juga telah adanya kelompok-kelompok sosial tertentu — yang memang masih sangat kecil — yang menyangsikan keabsyahan mereka sebagai perumus adat yang sesungguhnya. Apa yang harus mereka lakukan tidak sekadar perekaman kembali dasar-dasar ideal adat dan perumusannya yang lebih sistematis, tetapi juga proses ideologisasi adat. Dengan begini sistematisasi dari nilai-nilai dan norma-norma adat makin disempurnakan dan peranan adat Minangkabau sebagai kerangka konseptual makin diperkuat. Bukanlah apa yang sesungguhnya terjadi yang harus dikemukakan, tetapi apa yang "semestinya harus begitu" yang mesti ditegaskan.

"Adat hanyalah selingkung aur," kata pepatah. Maksudnya, dalam realitas hidup sehari-hari setiap nagari mempunyai adat dan kebiasaannya yang

16 Abdul Karim Amrullah Alddanawi. *Kitab Pertimbangan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*. 2 jilid, Fort de Kock: Snelpersdrukkerij "Agama", 1921. Buku ini adalah kritik terhadap tulisan Datuk Sanggoeno Diradjo, *Tjoerai Paparan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau*. Atas kritik ini Datuk Sanggoeno Diradjo membalas dengan buku baru, *Kitab Perjatoeran Adat Lembaga Alam Minangkabau*, 1923. Di samping itu Datuk ini mengadukan ke pengadilan AbdulkarimaliasH. Rasul dengan tuduhan plagiat. Soalnya ialah sebelum mendebat apa yang dikatakan oleh Datuk Sanggoeno Diradjo. H. Rasul lebih dulu menyalin secara utuh paragraf-paragraf yang ingin didebatnya — tanpa izin pengarang dan penerbit. Tentang kasus ini lihat HAMKA. Djakarta: Djajamurni, 1962.

bah banyak para penulis buku-buku adat, terutama yang memakai *tambo* sebagai ancang-ancang penulisannya, untuk mempergunakan informasi (yang memang tak terlalu mendalam) dari hasil penemuan sarjana-sarjana asing. "Maharadja Alif", yang konon raja Minangkabau di abad 17, mulai dikenal, sebagai pengaruh laporan von Bazel dari abad ke 18, yang dimuat dalam *Encyclopedia van Nederlandsch-Indie*.¹⁹ Demikian juga halnya dengan nama Adityawarman, pangeran dari Majapahit yang menjadi raja di Minangkabau di abad ke 14.²⁰ Di samping itu peristiwa-peristiwa historis yang terjadi sejak Perang Padri mulai pula dipertimbangkan. Dari sudut hukum adat, sebagian dari buku-buku tersebut secara populer mengutip pula pendapat atau klasifikasi yang diperkenalkan oleh ahli hukum adat, van Vollenhoven, dan sebagainya.

Dalam kelompok yang ingin lebih mengilmiahkan penulisan tentang adat Minangkabau ini bisa disebut antara lain Datuk Batuah Sango, Aman Datuk Madjo Indo, Datuk Maruhum Batuah dan Bagindo Tanameh, M. Rasjid Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, Darwis Thaib, dan Idrus Hakimi Datuk Radjo Penghoeloe.²¹ Bertolak dari keinginan untuk lebih memperkenalkan Minangkabau dengan berbagai aspek adat dan kebudayaannya, buku-buku yang ditulis para ahli ini juga beranjak dari pemikiran yang "Minangkabau-sentris". Dengan arti bahwa penulisan beranjak dari asumsi dasar akan keabysahan tradisi dan alam pikiran Minangkabau. Jadi para penulis itu, seperti para pendahulunya, adalah juga para *literati*. Justru dalam hal inilah sifat kreatif mereka kelihatan. Bagaimanakah harus diselesaikan penemuan ilmiah Barat dengan tradisi sejarah, *tambo*? Bukan *methodologi* dalam penyesuaian yang penting, tetapi keutuhan gambaran tradisi yang harus tetap terjaga. Dengan begini buku-buku tersebut sangat berharga sebagai gambaran dari pemikiran

19 Tetapi berdasarkan rekonstruksi teoretis "kerajaan Minangkabau", validitas sejarah dari kehadiran "Maharaja Alif" atau "Rajo Alief" ini agak disangsikan juga, lihat P.E. de Josselin de Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-political Structure in Indonesia*. Djakarta: Bhartara, 1960 (reprint): 103-104.

20 Pitono Hardjowardjo, *Adityawarman*. Jakarta: Bhartara, 1968.

21 Datuk Batuah Sango, *Tambo Minangkabau*. Payakumbuh: Pertjetakan Limbago. M. Datuk Maruhum Batuah dan Datuk Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Djakarta: N.V. Poesaka Aseli (n.d.).

M. Rasjid Manggis Datuk Radjo Panghoeloe, *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnja*. Padang: Sri Dharma, 1971.

Ahmad Datuk Batuah dan A. Datuk Madjoindo, *Tambo Minangkabau*. Djakarta: Balai Pustaka, 1956.

Bahar Datuk Nagari Basa, *Tambo Silsilah Adat Minangkabau*. Payakumbuh: C.V. Elonora, 1966.

Darwis Thaib Datuk Sidi Bandaro, *Seluk Belun Adat Minangkabau*. Bukittinggi: N.V. Nusantara, 1967.

Idrus Hakimi Datuk Radjo Penghulu adalah penulis adat yang paling produktif saat ini. Mungkin kedudukannya sebagai "pemelihara adat" dan Lembaga Kerapat Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mengharuskannya harus selalu tampil sebagai pembela norma dan nilai-nilai adat. Buku-bukunya antara lain:

— Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau, Padang: LKAAM, 1978.

— Rangkaian Mutiara Mestika Adat di Minangkabau, Padang: LKAAM, 1973.

berbeda-beda. Tetapi realitas bisa menjaga diri sendiri. Yang penting ialah bagaimana adat sebagai kerangka konseptual, bukan sebagai aktualitas, harus dirumuskan. Demikianlah umpamanya, pada tahun 1875 hak penghulu dan balai adat untuk mengadili masalah pidana dihapuskan oleh pemerintah kolonial.¹⁷ Tetapi kenyataan itu tidaklah mengurangi keharusan untuk mengetahui dan mendalami prinsip-prinsip hukum pidana dalam adat Minangkabau. Bukanlah keberlakuannya yang teramat penting, tetapi cara adat untuk memelihara dan menyelesaikan berbagai bentuk perbuatan yang mengganggu ketenteraman sosial. Jika seandainya perbuatan itu lebih menyangkut malu keluarga ataupun nagari, bukankah ketentuan adat yang lebih bersifat redemtif itu akan lebih bisa berfungsi? Karena itulah ketentuan-ketentuan ini selalu diulang, selalu diucapkan, selalu dikenang.

Jika penerbitan buku-buku adat biasa dipakai ukuran, saya kira sejak awal 1930-an kecenderungan ideologisasi adat telah mulai berkurang. Kegiatan partai-partai adat tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, sedangkan di kalangan penghulu telah makin banyak juga yang melibatkan diri dalam berbagai kegiatan. Perubahan sosial-ekonomi yang terjadi makin tak memungkinkan para penghulu untuk hanya menggantungkan diri pada "anak buah". Sedangkan sementara itu kesadaran bahwa Minangkabau adalah suatu keutuhan yang tunggal telah pula dikoyak-koyak. Bukan saja Islam, yang menjadi dasar yang paling fundamental dari Perminangkabauan tak bisa terlepas dari sifat citanya yang universal, tetapi juga pergerakan nasionalisme yang melanda Minangkabau sejak pertengahan tahun 1920-an, telah pula menandingi kesatuan administratif dari pemerintahan kolonial. Bahkan sampai dengan pertengahan tahun 1930-an Sumatera Barat merupakan salah satu pusat pergerakan politik kebangsaan yang radikal. Di saat ini nagari-nagari, yang secara formal tetap berada di bawah pemerintahan para penghulu dengan balai adat mereka, dimasuki oleh partai dan organisasi sukarela. Apa yang terjadi, bila berbagai laporan pejabat pemerintah bisa dipakai, ialah bermulanya "negara dalam negara". Maksudnya wibawa dan kekuasaan para penghulu adat telah disaingi oleh tokoh-tokoh partai dan organisasi.¹⁸

Dalam suasana seperti ini, tidaklah terlalu mengherankan bahwa salah satu corak yang paling menonjol dari penulisan tentang adat Minangkabau ialah makin naiknya kecenderungan informatif dan berkurangnya sifat ideologis. Sifat argumentatif makin berkurang dan kedudukan Islam atau Kitabullah sebagai dasar segala-galanya makin diperkuat. Yang menarik juga ialah bertam-

17 Tentang hal ini lihat Ph.S. Van Ronkel, "De invoering van ons Strafwetboek ter SWK naar aantekeningen in een Maleische Handschrift", TBB, 46 (1914): 249-255.

18 Lihat Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.

literati Minangkabau tentang masyarakat dan zaman lampau. Mereka memberi informasi dan, tanpa harus bersifat defensif, memperlihatkan keberlanjutan validitas dari nilai dan norma dari "alam Minangkabau".

Khusus mengenal hal yang belakangan ini barangkali buku yang ditulis oleh Prof. Nasrun bisa dianggap salah satu puncak dari dalam tradisi penulisan Minangkabau modern.²² Dalam bukunya Prof. Nasrun dengan sistematis dan menarik mencoba menghidupkan kembali "kebesaran" nilai filosofis yang inheren dalam ajaran adat Minangkabau. Ia memang tidak mempunyai orisinalitas seperti Datuk Paduko Alam, si penulis *Rancak Dilabuah*, atau Datuk Sutan Maharadjo, tetapi dengan menempatkan dirinya sebagai "perantara" — antara kebijaksanaan adat yang telah dirumuskan dengan para pembaca — Prof. Nasrun, seorang ahli hukum tatanegara, berhasil dengan baik membuat interpretasi tentang ajaran adat. Dan untuk ini ia pun mengadakan pula semacam studi perbandingan.

Hal-hal yang telah saya bicarakan di atas adalah sekadar cuplikan selintas dari sejarah pemikiran Minangkabau tentang dirinya, tentang dunianya. Tentu saja di samping mereka yang ingin memperlihatkan keberlanjutan nilai Minangkabau, bukan tak terdapat pula yang menyangsikannya. Salah satu tulisan yang pernah menghebohkan, ialah buku kecil Hamka yang berjudul *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Ditulis di tahun 1946,²³ sudah bisa diduga bahwa buku ini lebih merangsang semangat revolusioner, daripada mempertanyakan nilai dasar keminangkabauan. Buku ini lebih mengecam struktur kekuasaan adat, yang pernah dibina oleh pemerintah kolonial, dan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tak lagi sesuai dengan "zaman perjuangan". Mungkin terasa agak berlebih-lebihan, tetapi buku ini lebih membayangkan hubungan "cinta" dan "benci" yang kadang-kadang sangat aneh, antara "perantau" dengan negeri kelahiran. Kritik terhadap struktur dan nilai adat lebih banyak muncul dalam obrolan di warung atau lapau, yang kadang-kadang berfungsi sebagai "balai rendah", pembanding semua tata dan norma yang dibelai-belai oleh "balai adat", tempat para ninik-mamak bermusyawarah. Meskipun hal-hal ini tak dapat digeneralisasi begitu saja, namun dapatlah dikatakan, sejak Syekh Achmad Chatib melancarkan serangan yang paling mendasar atas sistem pewarisan matrilineal Minangkabau di akhir abad 19, kritik-kritik terhadap adat Minangkabau tidak lagi bersifat fundamental. Bu-

22 Prof. M. Nasrun, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Djakarta: Bulan Bintang, 1927.

23 Diterbitkan di Padang Panjang. Seberapa jauh HAMKA "konsisten" dengan serangannya, lihat antara lain tulisannya dalam Mochtar Naim (ed.), *Mengali Hukum Tanah dan Hukum Waris*. Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968.

Umur yang menua dan berakhirnya "situasi revolusioner" tampaknya sangat berpengaruh bagi perubahan sikap ini.

kan saja sifatnya fragmentaris, tetapi juga lebih merupakan titik terhadap sistem perilaku, yang diberi dasar adat, dan "keterbelakangan" dari para penghulu. Jika dibanding dengan periode ketika para *ideologue* adat masih bersuara lantang, maka tulisan-tulisan yang menyangsikan keberlakuan norma dan nilai adat telah jauh lebih berkurang. Barangkali kenyataan bahwa struktur kekuasaan telah makin tak berdaya, antara lain karena tiada lagi kekuasaan kolonial yang akan menahan erosi wibawa dan kekuasaan penghulu akibat perubahan sosial-ekonomis. Di samping itu, kesadaran akan makin tumbuhnya "komunitas nasional" dalam pengertian kultural, adalah pula salah satu faktor yang menentukan. Komunitas nasional yang berada dalam proses menumbuhkan identitas nasional menyebabkan unsur-unsur pendukungnya makin sadar untuk menjaga dasar esensial mereka. Tentu perlu pula dicatat bahwa hal ini juga didorong oleh pemerintah dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

Mungkin dalam situasi ini pula berbagai seminar yang bertaraf nasional untuk mempelajari adat dan kebudayaan Minangkabau diadakan. Kegiatan-kegiatan ini mencapai puncaknya di tahun 1970. Ketika itu seminar besar tentang kebudayaan Minangkabau diadakan di Batusangkar, dekat Pagarruyung, yang konon merupakan pusat "kerajaan Minangkabau dahulu kala".

Dari uraian di atas barangkali satu hal yang menyolok bisa kelihatan, penulisan tentang adat dan kebudayaan Minangkabau, baik yang ditulis oleh para ahli adat ataupun yang ingin mengecam keberlakuan adat, bertolak dari sikap bahwa apa yang ditulis itu haruslah fungsional. Ia tak berhenti pada keinginan untuk memberitakan dan memberi penjelasan, tetapi lebih penting lagi untuk dipakai sebagai pedoman dan sistem perilaku. Karena itulah kecenderungan "Minangkabau-sentris" kelihatan jelas sekali. Karena itu bisa pula dimengerti terjadinya peralihan dalam sikap terhadap bagaimana ketentuan dan norma serta nilai adat itu harus dikemukakan. Hal-hal inilah yang menyebabkan mengapa tulisan-tulisan, yang disebut sepintas lalu di atas, tetap penting, baik sebagai bahan studi, maupun sebagai penambah pengetahuan dan pelajaran. Daripadanya kelihatan tidak sekadar "adat lama, pusaka usang", tetapi dinamik kesejarahan Minangkabau sendiri.

Studi tentang kebudayaan dan masyarakat sebagai sesuatu yang harus berfungsi dalam kehidupan sosial dan pribadi adalah salah satu ciri utama dari penulisan yang dilakukan oleh *participant* atau peserta kebudayaan. Studi atau penulisan itu tidaklah habis pada dirinya, tetapi berusaha mencari kelanjutan *relevancy* dari tradisi dalam proses peralihan sosial. Hal inilah terutama yang membedakannya dengan studi yang dilakukan oleh para peninjau, *observers*, atau mereka yang sadar menjadikan dirinya sebagai peninjau. Semacam jarak antara *actor* atau pelaku kebudayaan dengan peninjau secara metodologis dengan tegas diadakan. Yang ditinjau dan yang meninjau seakan-akan berada

dalam situasi yang saling berhadapan. Dengan begitulah mungkin "obyektivitas" yang tertinggi bisa diharapkan. Sifat fungsionalnya bukanlah sesuatu yang intrinsik dalam studi, tetapi sesuatu berada di luarnya. Setelah studi selesai, maka pertanyaan tentang "apa yang bisa dilakukan", barulah bisa diajukan dengan keras. Terlepas dari hasrat untuk mempribumikan ilmu-ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan, tradisi ilmu yang membuat jarak yang ekstrim antara sasaran penelitian dengan meneliti itu memang berasal dari Barat. Dalam hal ini, dapatlah dikatakan bahwa studi tentang Minangkabau telah makin bersifat internasional. Kecenderungan ini terutama sekali kelihatan setelah tahun 1970.

Berbagai hal tentang ini telah pernah saya laporkan.²⁴ Namun sepintas lalu dapat saya sampaikan bahwa jika di zaman kolonial studi Minangkabau praktis dimonopoli oleh sarjana-sarjana Belanda — antara lain menghasilkan setidaknya dua disertasi dan satu studi klasik dari Schrieke,²⁵ di samping puluhan artikel dan buku tebal — kini berbagai sarjana dari berbagai bangsa telah ikut serta. Maka tidaklah terlalu berlebih-lebihan sesungguhnya jika di bulan September 1980 diadakan seminar internasional tentang masyarakat, kebudayaan, dan sastra Minangkabau di Bukittinggi. Panitia seminar tak mengada-ada. Dan seminar itu menjadi "betul-betul internasional", ketika di bulan April 1981 hal yang sama juga diadakan di Amsterdam.

Tradisi penulisan ilmiah modern ini, yang umumnya lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang khusus dan lebih memperhatikan keadaan yang secara empiris bisa diperhatikan, telah menghasilkan berbagai disertasi dan buku. Meskipun sebagian terbesar studi-studi itu lebih bersifat teknis, setidaknya dua buku sejarah yang cukup populer telah dihasilkan. Yang pertama ialah buku yang dikerjakan oleh M.D. Mansur dan kawan-kawan,²⁶ yang mencoba menyelusuri sejarah Minangkabau dari masa prasejarah sampai periode mutakhir. Yang kedua dan juga jauh lebih berhasil, ialah karya Rusli Amran,²⁷ yang hampir secara *exhaustive* mempergunakan sumber-sumber tercetak Belanda. Meskipun dikerjakan oleh seorang yang resminya tidak mendapat latihan dalam ilmu sejarah, buku ini adalah buku sejarah-berkisah, *narrative*, terlengkap dari zaman Hindu sampai 1833 yang pernah diterbitkan. Kelemahan dari buku ini ialah keengganan penulisnya mempertimbangkan sumber asli dan belum sempatnya ia menggarap arsip-arsip.

Demikianlah secara sepintas lalu "peta bumi" penulisan adat dan kebudaya-

24 Taufik Abdullah, "Studi tentang Minangkabau" (Makalah pada Seminar Internasional Tentang Minangkabau, Bukittinggi, 6-8 September 1980), dimuat dalam *Majalah Nagari*, 2 (Mei 1980): 36-43.

25 B. Schrieke, "Causes and Effect" dan *Pergolakan Agama*.

26 M.D. Mansur dan kawan-kawan, *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhadrata, 1970.

27 Rusli Amran, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981.

an Minangkabau. Dari segi inilah kelihatan suatu keistimewaan dari buku yang dihasilkan oleh Navis. Dari sudut tradisi penulisan ia termasuk golongan yang sadar bahwa ia adalah *participant* dari masalah yang ingin dibicarakannya. Tetapi catatan-catatan yang diberikannya, lebih mengarah kepada keinginan untuk ikut serta sebagai *observer*. Lebih penting lagi sebenarnya ialah tanpa menempatkan dirinya sebagai kritikus terhadap sasaran penelitiannya, dengan jelas pula kelihatan bahwa ia bukanlah *literati* yang ingin mengelus-elus hal-hal yang ditulisnya. Apakah ini suatu pertanda pula?

Memang benar, kata pepatah *sakali aie gadang, sakali tapian baraliah*, tetapi bagaimanapun juga adat *indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh*.

Jakarta, Juli 1982

Taufik Abdullah

PENGANTAR

Waktu saya bekerja di Jawatan Kebudayaan Provinsi Sumatera Tengah pada tahun 1952 - 1955 banyak tamu yang datang mencari informasi *Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jawatan tidak dapat membantu sebagaimana mestinya, sehingga mereka dibawa kepada orang yang menurut pendapat umum adalah ahlinya. Namun, banyak pertanyaan tidak terjawab, tidak dapat dipahami, dan tidak teruji kebenarannya. Sedangkan buku yang ada, bukan saja isinya tidak memadai, melainkan juga sulit dipahami terutama oleh orang yang bukan orang Minangkabau.

Semenjak itu saya mencoba mempelajari adat dan kebudayaan Minangkabau dengan mengumpulkan bahan dan informasi dari buku-buku dan dari lapangan. Setelah saya berhenti bekerja di jawatan itu, kegiatan yang telah telanjur itu saya lanjutkan terus, meski tidak intensif. Kemudian saya mencoba menulisnya dengan tujuan memberikan informasi yang lengkap, ringkas, tetapi mudah dipahami semua pembaca. Ternyata tidaklah mudah menulis-kannya, sehingga tidak kurang dari delapan kali saya mengulanginya sampai buku ini terwujud seperti sekarang.

Tujuan penulisan buku ini bukan untuk membuahkan karya ilmiah melainkan sekadar usaha menyampaikan informasi. Namun, saya mendapat banyak kesulitan dalam memilih bahan untuk ditulis. Kesulitan itu disebabkan antara

lain banyaknya perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan kebudayaan Minangkabau serta banyaknya pula tulisan dan keterangan yang tidak luput dari tafsiran menurut kecenderungan orang per orang. Oleh karena itu, cara penulisan pokok buku ini diusahakan agar betul-betul bersifat informatif, sedangkan setiap perubahan yang telah terjadi atau penafsiran yang pernah ditulis dicantumkan pada *catatan kaki* berikut referensinya. Hal ini dimaksudkan agar pembaca yang ingin memperluas dan memperdalam pengetahuannya tentang Minangkabau dapat menelusuri sumber-sumber tulisan ini dengan mudah.

Dalam memilih bahan untuk tulisan pokok digunakan pendekatan seperti falsafah Minangkabau yang berpangkal pada *alam terkembang jadi guru* dan digunakan pedoman *pepatah* serta *petitih* yang merupakan produk asli kebudayaan Minangkabau itu. Untuk berbagai pengertian yang ditimbulkan oleh berbagai istilah dan nama yang khas, ditelusuri bahasa Sanskerta yang menjadi bahasa cendekiawan Minangkabau kuno. Bahan-bahan yang tidak sesuai dengan falsafah alam Minangkabau dan istilah serta nama yang tidak ditemui dalam bahasa Sanskerta, tetapi telah menjadi bagian kehidupan dan kebudayaan Minangkabau, dicoba diuraikan pada *catatan kaki*. Dengan demikian, catatan kaki merupakan karangan tersendiri yang memuat berbagai tafsiran dan analisa.

Beberapa bab yang tidak mencantumkan referensinya berarti bahwa bab itu ditulis berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Sedangkan sistem penulisannya tidak luput dari analisa atau tafsiran yang bertolak dari pendekatan yang sama dengan bab lainnya.

Dalam menuliskan kalimat dan istilah digunakan dua cara. Kalimat yang khas Minangkabau, seperti peribahasa, dicantumkan sebagaimana aslinya, dalam tanda *kursif* dicantumkan alih bahasanya ke bahasa Indonesia secara harfiah, dengan tujuan untuk memelihara irama gaya sastranya, kemudian barulah diberikan penafsirannya. Mungkin penafsiran ini tidak cukup memuaskan karena terlalu pendek, sedangkan penafsiran yang memuaskan mungkin akan menjadikan uraian yang panjang. Dan hal itu tidaklah menjadi tujuan buku ini. Sedangkan nama dan istilah yang dijadikan nama ditulis dalam bentuk yang telah umum dipakai penulis lainnya.

Dengan mencantumkan gambar-gambar yang diperlukan, diharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang memuaskan dan juga dapat menjadi pengantar untuk mengenal serta memahami adat dan kebudayaan Minangkabau.

Akhirnya kepada semua teman yang telah membantu dan mendorong saya menulis dan menyelesaikan naskah buku ini, saya menyampaikan terima kasih.

Padang, 5 Januari 1982

SEJARAH

Minangkabau sering lebih dikenal sebagai bentuk kebudayaan daripada sebagai bentuk negara atau kerajaan yang pernah ada dalam sejarah. Hal itu mungkin karena dalam catatan sejarah yang dapat dijumpai hanyalah hal pergantian nama kerajaan yang menguasai wilayah itu. Tidak ada suatu catatan yang dapat memberi petunjuk tentang sistem pemerintahan yang demokratis dengan masyarakatnya yang berstelsel matrilineal serta tidak ada catatan sejarah kelahiran sistem matrilineal ini sebagaimana yang dikenal orang seperti sekarang. Kisah tambo yang dipusakai turun-temurun secara lisan oleh orang Minangkabau hanya mengisahkan waktu dan peristiwa secara samar-samar, campur-baur, bahkan ditambahi dengan bumbu yang kedongeng-dongengan. Adalah wajar bila kisah tambo itu mengandung berbagai versi karena tambo itu yang diceritakan oleh pencerita sesuai dengan keperluan atau kehendak pendengarnya.

Catatan sejarah mengatakan bahwa kekuasaan asing yang bercokol di Minangkabau datang dari utara dan juga dari selatan melewati pantai timur dan pantai barat. Di samping kekuasaan asing yang menguasai seluruh wilayah Minangkabau, terdapat pula kekuasaan asing yang hanya menguasai sebagian kecil wilayah Minangkabau. Penguasa asing itu menempatkan pusat kekuasaannya pada tempat yang berbeda-beda. Motivasi mereka menaklukkan Minangkabau untuk menguasai kekayaan yang tersimpan di buminya, seperti

emas dan rempah-rempah yang demikian mahal harganya di belahan bumi bagian utara. Para penakluk itu juga membawa agama anutan mereka masing-masing dan menyebarkannya secara paksa atau secara persuasif. Bagaimanapun juga penguasaan asing itu sedikit banyak telah mengubah wajah kebudayaan Minangkabau.

Peristiwa sejarah yang berabad-abad lamanya dialami suku bangsa itu dengan getir tampaknya tidaklah melenyapkan falsafah kebudayaan mereka. Mungkin kegetiran itu yang menjadikan mereka sebagai suku bangsa yang ulet serta berwatak khas. Mungkin pula kegetiran itu yang menjadi motivasi mereka untuk menghapus sejarah masa silam dengan menciptakan tambo yang kedongeng-dongengan, di samping alasan kehendak falsafah mereka sendiri yang tidak sesuai dengan falsafah kerajaan yang menguasainya. Mungkin kegetiran hidup di bawah raja-raja asing yang saling berebut tahta dengan cara yang onar itu telah lebih memperkuat keyakinan suku bangsa itu akan rasa persamaan dan kebersamaan sesamanya dengan memperkuat sikap untuk mempertahankan ajaran falsafah mereka yang kemudian mereka namakan *adat*. Oleh karena itu, tidaklah mudah menentukan awal sejarah suku bangsa Minangkabau ini.

Zaman Prasejarah

Bangsa pertama yang datang ke Minangkabau ialah bangsa yang serumpun dengan bangsa Austronesia yang datang secara bergelombang dari daratan Asia Tenggara.¹ Mereka adalah pendukung kebudayaan neolitikum, yaitu manusia zaman batu baru. Peninggalannya berupa alat perkakas dari batu, seperti mata tombak dan pisau yang ditemukan di beberapa gua di Jambi Hulu dan di sekitar Danau Kerinci. Awal perpindahan itu diperkirakan semenjak tahun 2000 s.M.

Gelombang demi gelombang perpindahan bangsa-bangsa dari daratan Asia Tenggara itu berlanjut terus. Mereka datang sambil membawa kebudayaan asalnya yang ditandai dengan penemuan benda perunggu dan besi, seperti kampak upacara dan mekara yang besar dengan lukisan yang ada hubungannya dengan kebudayaan Dong-son.² Mereka diperkirakan tiba pada tahun 500

1 Ada teori lain, yaitu teori Kon Tiki yang dikemukakan Thor Heyerdhal. Teori ini mengatakan bahwa gelombang perpindahan penduduk bukan dari daratan Asia ke pulau-pulau di Asia Tenggara, melainkan sebaliknya. Pada mulanya mereka datang dari Amerika Selatan melintasi Pasifik dengan menggunakan rakit dan berlayar mengikuti arus laut. Taufik Abdullah yang mengutip teori etnolinguistik I. Dyan, melalui penyelidikan bahasa dengan menggunakan metode tertentu, berkesimpulan bahwa teori Kentiki bukan mustahil. (Lihat Mochtar Naim, *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1979, hlm. 57-58).

2 Dong-son adalah nama tempat di sebelah selatan Hanoi. Nama tempat itu dipakai untuk penamaan atas ciri kebudayaan zaman perunggu di Asia Tenggara karena di tempat itulah

s.M. Bejana yang ditemukan di Kerinci itu mempunyai motif hiasan spiral, sedangkan yang ditemukan di Bangkinang berupa arca-arca kecil dan benda lainnya yang belum diketahui kegunaannya.

Sebagai bangsa yang mendiami kepulauan, nenek moyang orang Minangkabau telah diketahui sebagai bangsa pengembara di lautan. Mereka menggunakan perahu bercadik dan berkemudi ganda di kedua sisi bagian belakangnya sebagai perahu yang khas bangsa-bangsa di kepulauan Asia Tenggara. Mereka berlayar ke timur hingga Oceania di Pasifik dan ke barat sampai Afrika Barat.³ Gelombang kedatangan orang dengan perahu dari Pulau Sumatera itu telah banyak mempengaruhi kebudayaan dan bahasa penduduk Madagaskar.⁴ Menurut dugaan, pertemuan pelaut Sumatera dengan pelaut Funisia di masa Nabi Sulaiman (950 s.M.) telah menyebabkan Gunung Ophir yang terletak di Minangkabau dianggap sebagai tambang emas Nabi Sulaiman seperti yang diceritakan dalam Injil.⁵

ditemukan pertama kali benda-benda sejarah dari zaman perunggu di Asia Tenggara, seperti di Birma, Muangthai, dan Indonesia. Konon kebudayaan Dong-son itu dipengaruhi atau berasal dari kebudayaan Hallstatt, Austria. Di Hallstatt juga ditemukan lebih dari 2.500 makam yang berasal dari zaman besi \pm 1200 s.M. Pada makam itu ditemui pula sejumlah besar benda-benda sejarah dari perunggu dan besi, seperti pedang, jembiah (semacam keris), peniti dan perhiasan, serta peralatan lainnya. (Lihat juga *Ensiklopedi Indonesia*, Bandung: s'Gravenhage, W. van Hoeve, di bawah judul "Dong-son" dan "Hallstatt").

- 3 George Peter Murdock dalam bukunya *Africa its People and Their Culture History*, sebagaimana yang dikutip Zuber Usman, mengatakan bahwa diperkirakan semenjak 1000 tahun s.M. pelaut-pelaut Nusantara telah menghubungkan pesisir Asia, seperti Tiongkok, India, Persia, dan Arabia dengan pantai-pantai Afrika, bahkan sampai ke Afrika bagian barat. Teorinya itu dikemukakan karena dijumpainya tanaman tropis Nusantara di Guinea, yang diduga dibawa pelaut Nusantara ke sana. (Lihat juga Zuber Usman, "Fungsi dan Peranan Bahasa dan Sastra Minang dalam Kebudayaan Lokal maupun Nasional", makalah Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970).
- 4 Lihat C. Nooteboom, *Sumatra dan Pelayaran di Samudera Hindia*, Jakarta Bhratara, 1972, hlm. 12-14. Seorang sarjana lainnya, Jan Laurens Andries Brandes, dalam risalahnya yang terkenal *Bijdrage tot de vergelijkinge Klankeer der Westerse afdeling van de Maleis — Polynesis taalfamilie*, sebagaimana yang dikutip Zuber Usman, mengatakan bahwa bahasa Malagasi di Madagaskar banyak sekali persamaannya dengan bahasa Nusantara. Secara kultural dapat dikatakan bahwa Madagaskar merupakan ujung kepulauan Indonesia bagian barat. (Zuber Usman, *ibid* hlm. 3). M. Yamin mengatakan bahwa suku bangsa termaju di Madagaskar ialah suku bangsa Merina, yang demikian cekatan mengerjakan pekerjaan tangan, seperti memperindah benda-benda perhiasan dari emas, perak, kayu, dan besi, menenun sutra atau wol, terutama menganyam permadani yang indah-indah motifnya. Suku bangsa ini mempunyai adat-istiadat yang sama dengan suku bangsa Minangkabau dan juga menganut stelsel matrilineal. (Lihat. Muhammad Yamin, *6000 Tahun Sang Merah Putih*, Jakarta, Balai Pustaka, 1956).
- 5 Dalam Injil dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman menyuruh pelaut Funisia pergi ke Ophir mencari emas. Setelah tiga tahun lamanya pelaut itu kembali membawa emas sebanyak 470 bahara, berikut perak, gading gajah, monyet, dan burung merak. Kisah Nabi Sulaiman itu sangat menarik perhatian banyak sejarawan sehingga timbul berbagai diskusi terutama

Zaman Awal Sejarah

Pengetahuan sejarah bangsa-bangsa yang mendiami Pulau Sumatera sampai abad ke-4 s.M. sesungguhnya masih samar. Sejarah Sumatera semakin jelas baru ketika Anexecritus yang berada di India, karena dibawa oleh Iskandar Zulkarnaen (356-323 s.M.) menemukan perahu-perahu dari Sumatera yang secara teratur mengunjungi negeri itu. Selanjutnya seorang duta dari Sumatera bernama Rachias telah datang ke istana kaisar Romawi, Claudius, pada abad ke-1 Masehi.⁶ Berdasarkan peta yang dibuat Claudius Ptolomeus dari Yunani telah ditemukan sebuah kota yang bernama Argyre atau Kota Perak sebagai ibukota Jabadicu atau Jawadwipa.⁷ Oleh karena itu, sangat boleh jadi Rachias itu berasal dari Kota Argyre. Dalam peta itu dicantumkan suatu tempat yang dinamakannya dengan "golden khersonese" sebagai wilayah yang kaya emas, yang terletak di sebelah selatan India. Kemasyhuran wilayah di selatan India dengan emasnya telah menyebabkan pujangga Walmiki mencantumkan nama wilayah itu sebagai *Suwarnadwipa*,⁸ yang artinya pulau emas, dalam epos *Ramayana*

mengenai nama Gunung Ophir yang terdapat di Semenanjung dan juga di Sumatera. Berat dugaan bahwa Gunung Ophir yang dimaksud terletak di Sumatera, yaitu di Sumatera Barat sekarang. Namun, ada juga pendapat bahwa lumbung emas Nabi Sulaiman itu terletak di Rhodesia atau di Arab Selatan atau di Teluk Aqaba. Berbagai bukti sejarah adanya kekayaan emas Pulau Sumatera pada masa sebelum Masehi, yang tidak kalah dengan kekayaan sumber emas di Kalifornia (Amerika) dan Australia, memperkuat dugaan bahwa Gunung Ophir yang dimaksud ialah yang terletak di Sumatera. Lihat juga M. Said, "Sejarah Minangkabau dengan Meminjam dan Mempergunakan Karya Penulis Asing", makalah Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau tahun 1970 di Batusangkar.

Komoditi terkenal yang mengharumkan nama wilayah itu bukan hanya emas, tetapi juga kapur barus. (Pedagang Arab menyebut kapur bumi itu *kafir*, Belanda menyebut *kamfer*, dan bangsa kita menyebut *kamper*). Di samping emas dan kapur barus, juga dikenal kemenyan. (Orang Arab menyebutnya *banjawi* atau kemenyan Sumatra dan orang Eropa menyebut *benzo-e*). Kedua jenis komoditi ini telah digunakan para Firaun Mesir untuk bahan pembalseman bagi pengawetan jenazah. Oleh karena terkenalanya komoditi ini, bangsa-bangsa yang membutuhkan atau memperdagangkannya menyebut Barus dan desa sekitarnya yang sama-sama menghasilkan komoditi itu sebagai Baros, Balus, Karpuradwipa, Warusaka, dan Barusai (oleh Ptolomeos) untuk Nagari Barus; Pansur, Fansuri, Pansuri untuk Desa Pansur sedikit di utara Barus); Kalasapura untuk Desa Kalasan yang terletak dekat Barus. Desa Kalasan inilah juga yang diidentifikasi Prof. Kern sebagai Holotan, dan Po-lu-shi yang disebut I Tsing, sebagai Barus.

6 Lihat C. Nooteboom, *op. cit.* hlm. 14.

7 Di mana lokasi Jawadwipa, yang sering pula ditulis dengan Jabadicu, yang tepat terdapat berbagai pendapat. Ada yang menyebutnya di Semenanjung, yang lain mengatakan di Jawa. Bahkan juga ada yang mengatakan lokasinya di Sumatera. Umpamanya J.L. Moens dalam bukunya *Sriwijaya, Java en Kataha* (hlm. 328) mengatakan lokasinya di Banda Aceh sekarang. Ibu kota Jawadwipa dikatakannya ialah Argyre.

8 Di mana lokasi Suwarnadwipa pun belum disepakati para sejarawan. Ada yang memperkirakan lokasinya di Semenanjung, karena pedagang India yang banyak menemui emas diper-

yang terkenal itu.⁹

Zaman Melayu

Pada peta yang dibuat Claudius Ptolomeus telah diterakannya nama Malaei Colon¹⁰ yang letaknya di ujung Tanah Semenanjung. Setidak-tidaknya dalam masa Ptolomeus, yang hidup di abad ke-1 Masehi itu, nama Melayu telah terkenal. Namun, tidak dapat dijelaskan apakah Melayu itu merupakan suatu kerajaan atau suatu bangsa, karena catatan sejarah lebih memperkenalkan nama Suwarnadwipa. Yang diperkenalkan sebagai Suwarnadwipa itu pada abad ke-5 Masehi hanya ada satu kerajaan, yakni Kerajaan Kuntala atau Kantoli. Rupa-rupanya kerajaan itu didirikan para pengaut Budha dari Gandhara di India Selatan. Mungkin mereka telah berdatangan seabad sebelumnya sebab tertarik pada banyaknya emas di pulau itu. Setelah membentuk kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera, mereka membuat hubungan dengan Cina pada tahun 441. Pengiriman utusan itu berlangsung sampai tahun 520. Pusat Kerajaan Kuntala diperkirakan di dekat perbatasan Jambi dengan Riau sekarang.¹¹

-
- jualbelikan orang di sana menyangka Semenanjung merupakan sebuah pulau. Yang berpendapat lokasinya di Sumatera karena di pulau itulah emas banyak ditemukan, sedangkan Semenanjung tidak memiliki sumber emas. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Semenanjung dan Sumatera yang dimaksudkan sebagai Suwarnadwipa.
- 9 Kapan epos Ramayana ditulis Walmiki tidak ada kesepakatan para ahli, sehingga sulit pula menduga kapan Semenanjung dan Sumatra itu dinamakan Suwarnadwipa. Ensiklopedi *Winklers Prius* mengatakan bahwa Walmiki hidup antara abad ke-3 s.M. dan abad ke-3 M.
- 10 Penyamaan Malaei Colon dengan Melayu tampaknya juga tidak mendapat kesepakatan para sejarawan. Paul Wheatley dalam bukunya *The Golden Khorosene* (hlm. 154) mengatakan bahwa mengidentifikasi Malaei Colon adalah pekerjaan yang paling rumit.
- 11 Menurut catatan sejarah, Kuntala diperkirakan merupakan kerajaan pertama di Sumatera. Namun para sejarawan saling berbeda pendapat pula untuk menetapkan lokasinya. Slamet Muljana telah dengan panjang lebar mengemukakan berbagai pendapat sejarawan tentang lokasi itu dalam bukunya. (Slamet Muljana, *Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnadwipa*, Jakarta, Idayu, 1981, hlm. 12-19). Kuntala diidentifikasi sebagai Kandali yang menurut lafal Cina disebut Kantali. Dalam berita Cina disebutkan bahwa Kantali mengirim utusan ke Cina untuk pertama kali pada tahun 441 dan terakhir pada tahun 520. Berdasarkan berita Cina itu para sejarawan mencoba mencari lokasinya, antara lain di Muangthai selatan karena di sana ditemukan sebuah tempat yang bernama Kantoli. Ada yang mengatakan di Aceh timur, tempat yang sekarang bernama Singkil Kandari. Yang lain mengatakan lokasinya di Muara Tambesi karena pada berita Cina dikatakan bahwa kerajaan San-fo-tsi dahulunya bernama Kantali. Sedangkan San-fo-tsi diidentifikasi sebagai Tambesi. Akan tetapi, sejarawan lain yang menduga bahwa San-fo-tsi sama dengan Shih-li-fo-shin yang dalam berita Cina yang diidentifikasi sebagai Sriwijaya, berpendapat bahwa Kandali berada di Palembang. Slamet Muljana berpendapat bahwa lokasinya di Kualatungkal sekarang. Menurutnya, Kuntala semula berasal dari Gandhara, sebuah tempat di India, asal para biarawan Budha yang lalu memberikan nama negeri asalnya untuk pemukimannya yang baru. Sama halnya dengan biarawan Budha yang datang dari Mahat di India yang lalu memberikan nama negeri asalnya

Tidak diketahui dengan pasti apa sebab Kerajaan Kuntala ini dikenal hanya selama satu abad saja. Yang dikenal kemudian, berdasarkan catatan Cina, adalah nama Melayu¹² dengan pusat pemerintahannya di tepi Batanghari.¹³ Akan tetapi, pada catatan Cina yang ditulis setengah abad kemudian kerajaan Melayu itu dinamakan Sriwijaya.¹⁴ Konon Sriwijaya bermula dari Kelantan di Semenanjung bagian timur, lalu berpindah ke Sumatera dan mendirikan pusat

untuk pemukimannya dekat Candi Muaratakus, di tepi Batangkampar. Nama Gandhara berubah menjadi Kantala, lalu berubah lagi menjadi Kantali seperti halnya terjadi perubahan nama Benggala menjadi Benggali, yang artinya orang Benggali berasal dari Negeri Benggala. Penamaan Kantali dalam tulisan Cina karena orang Cina tidak mempunyai konsonan *d*. Selanjutnya Slamet Muljana mengemukakan bahwa lambat laun Kandali atau Kandala itu berubah pengucapannya menjadi Tungkal. Perubahan lafal Kuntala menjadi Tungkal menurut Slamet lazim dalam bahasa Ostronesia. Dengan demikian, Kerajaan Kuntala itu berpusat di Kualatungkal sekarang.

- 12 Nama Melayu berasal dari bahasa Sanskerta *Malayapura*, yang berubah menjadi *Malayur*, lalu menjadi *Malayu* atau *Melayu*, sebagaimana halnya nama *Singapura* berubah menjadi *Singapur* dan *Singapo* atau *Singapu* menurut lidah penduduk di Semenanjung. *Malaya* atau *malay* artinya gunung. Sumber lain berpendapat bahwa nama *Melayu* berasal dari bahasa Tamil yakni *male-yur* yang artinya "orang gunung" (*male* = gunung, *yur* = orang). Lihat M. Said dalam "Sejarah Minangkabau dengan Menyaring dan Mempergunakan Karya Penulis Asing" pada Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau tahun 1970 di Batusangkar.
- 13 Pada umumnya sejarawan berpendapat bahwa pusat Kerajaan Melayu terletak di dekat Kota Jambi sekarang, yang pada masa dulu merupakan wilayah dekat pantai. Menurut teori V. Obdeijn, seperti yang dikutip M. Said (*op.cit.* hlm. 8), bahwa pada abad pertengahan tanah Semenanjung dengan Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan satu kesatuan. Pengikisan daratan di pantai barat dan erosi yang memperdangkal pantai timur telah banyak mengubah bentuk tanah Semenanjung dan Pulau Sumatera. Akan tetapi, J.L. Moens berpendapat bahwa pusat Kerajaan Melayu ialah di dekat Palembang sekarang. (lihat *op.cit.* hlm. 373). Sedangkan Buchari memperkirakannya di hulu Sungai Asahan. (Lihat *Praseminar Penelitian Sejarah* hlm. 19-40). Sungguh rumit menjelaskan kehadiran Kerajaan Melayu yang pertama di Sumatera. Jika Kuntala merupakan kerajaan yang pertama di Sumatera, maka tentulah bangsa Melayu merupakan penduduk yang tersebar di Semenanjung dan Sumatera dengan kerajaan-kerajaan kecil yang tidak berarti. Oleh karena Kuntala merupakan kerajaan yang didirikan bangsa Gandhara dari India Selatan, meskipun penduduknya adalah bangsa Melayu, tentulah tidak dapat dikatakan bahwa kerajaan itu sebagai Kerajaan Melayu. Kalau demikian halnya, hampir boleh dipastikan bahwa Kerajaan Melayu yang pertama terletak di Jambi, tegasnya di Tambesi sekarang, berdasarkan identifikasi berita Cina San-fo-tsi sebagai Kerajaan Melayu.
- 14 Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti *kejayaan yang agung*, *sri* = besar dan *wijaya* = menang. Bagaimana sejarah timbulnya Sriwijaya, para sejarawan pun masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Sriwijaya bermula dari Kelantan di Semenanjung, berdasarkan identifikasi dari Ho-lo-tan yang disebut dalam berita Cina. Dari Kelantan, Sriwijaya berpindah ke tepi Batangkampar, lalu mendirikan candi di Muaratakus sebagai pusat peribadatan dan pusat pemerintahannya. Dari sanalah kemudian mereka berpindah ke tepi Sungai Musi di Sumatera Selatan (Lihat J.L. Moens *op. cit.* hlm. 330). Sedangkan Purbatjaraka berpendapat bahwa Sriwijaya bermula dari tepi Batangkampar dan setelah pindah ke selatan barulah dinamakan Sriwijaya. (Lihat Purbatjaraka, *Riwayat Indonesia I*, hlm.

kerajaan di tepi Batangkampar dan mendirikan candi di Muaratakus.¹⁵ Muaratakus, yang menjadi pusat agama Budha di Sumatera itu, banyak didatangi bhairawa dari Mahat di India, yang kemudian mendirikan perkampungan yang sampai sekarang terkenal dengan nama Kampung Mahat.¹⁶

Mungkin karena lokasi di Batangkampar tidak menguntungkan, maka sekitar tahun 682 pusat kerajaan berpindah lagi ke tepi Sungai Musi di bagian selatan Sumatera. Untuk peristiwa sejarah itu mereka membuat prasasti yang terkenal sebagai *Prasasti Kedudukan Bukit*, dekat Palembang sekarang. Isi prasasti itu kira-kira sebagai berikut: *Pada hari ketujuh bulan terang, bulan Jyestha, Dapunta Hyang berangkat dari Minanga Tamwan (Kamwar). Ia membawa tentara dua laksa dan dua ratus kuli di perahu; yang berjalan seribu tiga ratus dua belas banyaknya; datang di Mukha Upang dengan senang hati; pada hari kelima bulan terang, bulan (Asada) dengan lega gembira datang untuk membuat wanua . . .*¹⁷

35). Slamet Muljana tidak mengemukakan pendapat tentang asal mula Sriwijaya, tetapi ia membantah identifikasi Ho-lo-tan sebagai Kelantan. Menurut Slamet, Ho-lo-tan ialah identifikasi dari Aruteun di Jawa Barat. (lihat juga catatan 6). Buchari berpendapat bahwa Kerajaan Sriwijaya bermula dari Batang Kuantan sebelum pindah ke tepi Sungai Musi. (Lihat juga catatan 16).

15 Memilih lokasi Muaratakus untuk mendirikan candi sebagai pusat ajaran Budha tampaknya berdasarkan kepercayaan bahwa gajah mempunyai kedudukan penting dalam agama-agama yang berasal dari India. Gajah dilambangkan sebagai Sang Budha yang turun dari surga pangkuan ibunya. Dalam kepercayaan Hindu, gajah merupakan tunggangan dewa Indra. Ganesa, putra Siwa, yang melambangkan dewa kebijaksanaan, dilukiskan dengan manusia berkepala gajah. Lokasi Muaratakus itu juga merupakan jalan lintas rombongan gajah dari Pegunungan Suliki ke dataran rendah. Sebagai kebiasaannya, gajah suka berendam-remdam di air yang dangkal, lalu bercengkerama semalam suntuk pada bulan purnama di tempat dataran yang berketinggian seperti Muaratakus tempat candi itu dibangun. Batu candi yang terbuat dari bata itu sering digunakan oleh gajah untuk menggosok-gosok tubuhnya.

16 Mahat yang terletak tidak jauh dari Muaratakus merupakan suatu desa yang terpencil di utara Kabupaten Lima Puluh Kota. Nama Mahat berasal dari nama suatu tempat di India tempat asal para biarawan Budha candi Muaratakus. Banyak sejarawan berpendapat bahwa biarawan dari India itu datang untuk mengembangkan agamanya atas kemauan atau prakarsa raja-raja mereka. Akan tetapi, pendapat yang lebih baru mengatakan bahwa mereka didatangkan raja-raja Sumatera untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan mereka dan juga untuk mengukuhkan kekuasaan dan menaikkan pamornya. (Lihat C. Nooteboom *op. cit.* hlm. 20).

17 Prasasti Kedudukan Bukit menimbulkan banyak tafsir di kalangan sejarawan semenjak prasasti itu diungkapkan Ph.S. Rongkel. Umpamanya, N.J. Krom berpendapat bahwa prasasti itu dimaksudkan untuk memperingati penguasaan atau penaklukan Sriwijaya atas Kerajaan Melayu. J.L. Moens berpendapat bahwa prasasti itu sebagai peringatan kemenangan Sriwijaya atas pusat Kerajaan Melayu di Palembang, yang dalam prasasti itu disebut Minanga Tamwan. R.A. Kern berpendapat bahwa lokasi Minanga Tamwan itu di muara Sungai Musi, bukan di Palembang. Sedangkan Rongkel sendiri berpendapat lokasinya di Singkawang. Perbedaan pendapat tentang maksud prasasti itu disebabkan kata *Minanga Tamwan*. Sebagai penemu pertama, Rongkel membaca tulisan itu sebagai *Minanga Hamwar*, yang artinya sungai

Kerajaan Melayu, yang lebih dikenal sebagai Sriwijaya itu, setelah berpusat di tepi Sungai Musi itu pada suatu masa mencapai kejayaannya, sehingga menguasai seluruh Sumatera, Semenanjung, Jawa, dan Kalimantan. Dalam catatan Cina yang bertarikh 743, pusat kekuasaan rupanya beralih ke Jawa Timur, setelah rajanya yang bernama Wisnu menikah dengan putri raja Mataram. Pemindahan kedudukan pusat kerajaan itu tampaknya telah mengalihkan nama Sriwijaya menjadi Sailendra.¹⁸ Kemudian terjadilah perebutan tahta antara turunan Raja Wisnu dan kerabat Kerajaan Mataram. Perebutan ini yang menyebabkan Balaputra, salah seorang ahli waris tahta turunan Raja Wisnu, kembali ke Sumatera dan menobatkan dirinya sebagai raja dengan gelar Sri Maharaja seperti yang digunakan penghulunya di kala berkedudukan

tawar. Sedangkan Purbatjaraka membacanya *Minanga Kamwar*, yang artinya *sungai kembar*. Dari sana Purbatjaraka membangun teori bahwa prasasti itu mengisahkan keberangkatan pasukan dari Minanga Kamwar, yakni dari lokasi pertemuan dua buah sungai kembar. Lambat laut nama *Kamwar* berubah menjadi *Kampar* untuk sungai yang kini bernama Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Yang menarik dari teori Purbatjaraka itu ialah dari kata *Minang Kamwar* lahirlah kata *Minang Kabau* (lihat Purbatjaraka *op. cit.* hlm. 35). Pendapat lain ialah yang dikemukakan Buchari, setelah ia dapat membaca tulisan yang sangat kabur pada prasasti itu, yaitu kata *Muka Upang*. Ia menafsirkan bahwa pasukan itu berangkat dari *Minanga* (yang menurutnya di Batangkuantan) menuju Muka Upang di sebelah hulu Sungai Musi. Sedangkan kata *tamwan* diartikannya sebagai *tambahan*. (lihat Buchari *op. cit.* hlm. 27) Arti kata *tamwan* ini disetujui Slamet Muljana, tetapi tentang lokasi Minanga ia berpendapat tetap di muara Sungai Musi lama. (lihat Slamet Muljana, *op. cit.* hlm. 73-75). Seorang sarjana lainnya, Nia Kurnia Sholihat, setelah mengungkapkan pendapat berbagai ahli tentang kata terakhir *matihuat wanua*, yang menurut dia berarti *membuat rumah* bukan *membuat kota* atau *beneng*, menafsirkan prasasti Kedudukan Bukit: pada tanggal 11 Waisaka 604 (23 April 682) raja Sriwijaya yang bergelar Dapunta Hyang naik perahu dari suatu tempat untuk menggabungkan diri dengan bala tentaranya yang baru saja menaklukkan Minanga (Binanga). Lalu pada tanggal 7 Jesta (19 Mei) Dapunta Hyang memimpin bala tentaranya meninggalkan Minanga untuk pulang ke ibu kota. Semua tentara bersuka cita karena pulang dengan membawa kemenangan. Mereka mendarat di Muka Upang, lalu menuju ibu kota. Kemudian pada tanggal 5 Asada (16 Juni) Dapunta Hyang menitahkan pembuatan sebuah wanua (bangunan) berupa wihara di ibu kota, sebagai manifestasi rasa syukur dan gembira." Sedangkan kata "Winanga" ia setuju dengan Slamet Muljana yang menafsirkannya dengan "Binanga" yang letaknya di daerah Padang Lawas di tepi Sungai Barumun, Sumatera Timur. (Lihat majalah *Optimis* no. 25/Februari 1982). Sebaliknya, dengan mengutip pendapat J.L. Moens yang mengatakan bahwa raja pertama yang sampai di Bukit Siguntang ialah dari bangsa Kaudinya pada awal abad ke-6, Moh. Yamin dalam bukunya *6000 Tahun Sang Merah Putih* mengaitkannya dengan *Sejarah Melayu*, yang mengisahkan seorang yang bernama Nila Utama yang dijadikan menantu Demang Lebar Daun dan dirajakan di kaki bukit Siguntang Mahameru. Nila Utama itulah yang bergelar Sang Si Purna dan sebagai raja pertama disebut Dapunta Hyang yang mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang lambat laun berubah pengucapannya menjadi si *Guntang*.

- 18 Nama Sailendra sebagai kerajaan di Jawa muncul dalam berita Cina, yang dianggap paling otentik sebagai bahan sejarah, yaitu bahwa setelah tahun 742 yang mengirim utusan ke Cina tidak lagi Sriwijaya, melainkan Sailendra. Bila dilihat pada berbagai prasasti zaman Sailendra,

di Mataram. Kerajaan ini dikenal pula sebagai Suwarnabhumi,¹⁹ dengan pusat kerajaannya terletak di Jambi sekarang, yang wilayahnya meliputi seluruh Sumatera, Semenanjung, dan sebagian Muangthai.

Kerajaan Melayu, yang dikenal dengan Suwarnabhumi ini, sangat mengganggu lalu lintas perdagangan Kerajaan Cola dari India Selatan yang melintasi Selat Malaka menuju ke Cina di sebelah timur. Gangguan ini menyebabkan untuk pertama kalinya raja Cola melancarkan serangan pada tahun 1017.

tampaknya Sailendra bukanlah nama suatu kerajaan, melainkan nama suatu bangsa yang berkuasa pada wilayah yang sama dengan wilayah Kerajaan Sriwijaya. Persamaan wilayah dan berita Cina itu telah menimbulkan anggapan para sejarawan bahwa Sriwijaya telah digantikan Sailendra. Apabila dilihat nama raja yang berkuasa pada ujung masa Sriwijaya dengan nama raja di awal sejarah Sailendra, jelas ada persamaan nama rajanya, yakni Wisnu. Mengapa Raja Wisnu menanggalkan nama Sriwijaya dan menggantikannya dengan nama Sailendra setelah ia memindahkan pusat kerajaannya ke Jawa Timur? Beberapa sejarawan mencoba mengemukakan teori berdasarkan asal-usul nama Sailendra. Sailendra berasal dari nama suku Salla yang mendiami wilayah sekitar Gunung Mahendragiri di India Selatan. G. Coedes menghubungkan bangsa Salindra dengan bangsa Salaraja di Kamboja karena terjadinya perkawinan raja-raja kedua bangsa itu, sehingga raja di Jawa itu pun menamakan bangsanya sebagai Sailendra. Slamet Muljana telah mengemukakan teori lain yang pada dasarnya memperkuat teori bahwa kedudukan Sriwijaya di Sumatera telah digantikan oleh Sailendra yang berkedudukan di bekas Kerajaan Mataram. Akan tetapi, ia tidak mencoba menafsirkan nama Sailendra, yang oleh Muh. Yamin dikatakan artinya sama dengan Melayu. Slamet Muljana mengatakan bahwa setelah empat kali pergantian raja turunan Wisnu, lalu terjadilah perebutan tahta antara putra mahkota Balaputera dan iparnya, Rakai Pikatan, yang dimenangkan oleh yang terakhir. Balaputera menyingkir kembali ke Sumatera dan mendirikan kerajaan yang dinamakannya dengan Suwarnabhumi. (Lihat Slamet Muljana *op. cit.* hlm. 139-172). Jika mengambil teori Muh. Yamin yang mengatakan bahwa nama Sailendra dengan Melayu mengandung arti yang sama, sehingga ia berpendapat bahwa dinasti raja-raja turunan Sang Si Purba yang bermula mendirikan Kerajaan Sriwijaya di Bukit Siguntang Mahameru sejak abad ke-6 masih berkuasa hingga abad ke-13, seperti yang diuraikannya dalam *6000 Tahun Sang Merah Putih*, kini soalnya mengapa setelah menaklukkan Mataram Raja Wisnu dari Sriwijaya itu menamakan kerajaannya Sailendra. Mungkin setelah ia memindahkan pusat kerajaannya ke Mataram itu, ia lebih menyukai memakai nama Sailendra sebagai pengganti nama Sriwijaya untuk menenangkan suasana di Keraton Mataram. Mungkin pula perubahan nama-nama itu merupakan kebiasaan raja-raja di Jawa, yang suka menukar nama kerajaannya setiap penggantian raja setelah terjadi perebutan kekuasaan di kalangan pangerannya. Umpamanya, silsilah Kerajaan Singasari yang semula bernama Tumapel yang didirikan Ken Angrok. Setelah mengalahkan Kediri, Kerajaan Tumapel berubah menjadi Singasari. Setelah Kertanegara terbunuh dan pembunuhnya dibunuh pula oleh Raden Wijaya, Kerajaan Singasari berubah nama menjadi Majapahit meski yang menjadi raja secara silih berganti itu adalah warga keraton yang asal-usul. Kebiasaan menukar-nukar nama kerajaan itu dilakukan pula oleh Balaputera yang setelah ia tersingkir dari Jawa Timur, mendirikan kerajaan di tempat asalnya di Sumatera dengan nama Suwarnabhumi.

19 Suwarnabhumi artinya tanah emas. Oleh kebanyakan sejarawan selalu diidentifikasi dengan Sriwijaya. Ketika Raja Cola menyerang Sumatera, dikatakan sebagai menyerang

Serangan itu diulangi lagi pada tahun 1025 dengan lebih hebat, sehingga raja Suwarnabhumi, yaitu Sri Maharaja Sanggaramawijaya, dapat mereka tawan. Sedangkan pengikut Sri Maharaja yang setia menyingkir ke sekitar Candi Muaratakus, yang lalu memperbesar candi yang semula telah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya sebelum berpindah ke Sungai Musi.²⁰

Penguasaan Kerajaan Cola atas Sriwijaya itu hanya berlangsung selama setengah abad saja. Di bekas kekuasaan Kerajaan Cola itu muncullah Kerajaan Melayu yang dikenal dengan Darmasraya yang didirikan oleh turunan Sri Maharaja yang menyingkir ke hulu Batanghari. Kerajaan ini tumbuh dan meluas sampai menguasai Kamboja dan Sri Lanka dengan raja-raja yang menyandang gelar Mauliawarman. Sedangkan oleh rakyatnya ia disebut Sri Maharaja Diraja.²¹ Darmasraya itu juga dikenal dengan nama Malayapura yang kedudukan pusatnya di Siguntur di bagian lebih hulu dari Sungai Batanghari.

Zaman Aditiawarman

Kebangkitan kembali Kerajaan Melayu Darmasraya di hulu Batanghari, setelah kekuasaan Cola melemah karena perebutan kekuasaan di pusat kerajaannya pada tahun 1070 itu, boleh jadi merupakan zaman baru dalam sejarah di Pulau Sumatera bagian tengah. Dari sanalah suatu kerajaan Minangkabau bermula dan kemudian berakhir di Pagaruyung di ujung abad ke-19.

Kerajaan Darmasraya tampaknya hanya berusia sekitar dua abad. Pada tahun 1275 Kerajaan Singasari di bawah Raja Kertanegara melakukan gerakan politik dan militer ke Darmasraya dengan nama yang dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu.²² Enam tahun kemudian Kertanegara mengirim Mahamenteri Wis-

Sriwijaya. Penyamaan nama itu selain karena wilayahnya sama, juga karena raja-raja yang seasal-usul. Di samping itu, berita Cina sering mengaitkan nama Shih-li-fo-shih dan San-fo-tsi dengan Melayu. Shih-li-fo-shih disepakati semua sejarawan sebagai transliterasi Sriwijaya. Akan tetapi, tentang San-fo-tsi ada beberapa pendapat, misalnya Soekmono menyamakannya dengan Tambesi karena kemiripannya. Sedangkan Slamet Muljana berpendapat San-fo-tsi sebagai Suwarnabhumi. Banyak pula sejarawan yang berpendapat bahwa Suwarnabhumi itu sama dengan Suwarnadwipa, sehingga dengan sendirinya ada yang berpendapat Suwarnabhumi itu terletak di Semenanjung.

- 20 Soekmono memperkuat peristiwa sejarah ini dengan mengatakan bahwa bangunan candi Muaratakus itu jelas telah dibangun dalam dua zaman, jika dilihat dari bahan-bahannya yang berasal dari abad ke-7 dan ke-12. (lihat Soekmono, "Sekali Lagi tentang Lokasi Sriwijaya" pada Praseminar Penelitian Sriwijaya, hlm. 82).
- 21 Penggunaan nama Mauliawarman atau Mauliawarmadewa dengan gelar Sri Maharaja Diraja merupakan kekhasan raja-raja Melayu sebagaimana yang dicatat prasasti di Kamboja atau di hulu Batanghari sendiri. (lihat Slamet Muljana *op. cit.* hlm. 224-232).
- 22 *Pamalayu* diartikan banyak sejarawan sebagai perang melawan Melayu. Menurut Nagarakretagama yang digubah Prapanca pada tahun 1365, ekspedisi itu bertujuan menundukkan Melayu, tetapi tidak dikisahkan terjadinya suatu peperangan. Menurut Pitono Hardjowardojo, bala

warupakumara membawa arca Amoghapasa sebagai lambang persahabatan ke Darmasraya.²³ Akan tetapi, ketika Kublai Khan dari Cina mengirim pasukan menyerang Singasari pada tahun 1292, sebagai pembalasan atas penghinaan yang dialami utusannya ketika menemui Kertanegara dua tahun sebelumnya, timbul perang di kalangan para pangeran di Singasari. Kertanegara terbunuh oleh Jayakatwang yang ingin merebut singgasana. Dengan bantuan pasukan Kublai Khan, Raden Wijaya berhasil menumbangkan dan membunuh Jayakatwang. Setelah itu, Raden Wijaya balik menyerang pasukan Kublai Khan sehingga terusir kembali ke laut. Lalu ia menobatkan dirinya menjadi raja dan mengubah nama Singasari menjadi Majapahit.

Pada saat kemelut di pusat Kerajaan Singasari bala tentara Kertanegara yang berada di Darmasraya pulang hendak membantunya. Akan tetapi, yang mereka dapati ialah Raden Wijaya yang telah menjadi raja. Dua orang putri Melayu yang bernama Dara Petak dan Dara Jingga,²⁴ yang datang bersama bala tentara sebagai tanda persahabatan, diterima Raden Wijaya. Salah seorang di antaranya, yakni Dara Petak, telah diangkat Raden Wijaya sebagai permaisuri-nya. Di samping itu, ia memperistri empat orang putri Kertanegara. Sebagai permaisuri, Dara Petak memperoleh gelar Indraswari. Dari Dara Petak inilah lahir satu-satunya putra laki-laki Raden Wijaya, yaitu Jayanagara. Sedangkan Dara Jingga, yang diperistri seorang kerabat istana yang tidak begitu dikenal namanya, kembali ke Darmasraya setelah hamil. Di Darmasraya itulah anaknya lahir. Anak itu seorang laki-laki yang kemudian terkenal dengan nama Aditiawarman.²⁵

tentara yang dikirimkan itu untuk melakukan muhibah. (Lihat R. Pitono Hardjowardojo, *Aditiawarman*, hlm. 66). Mungkin peristiwa itulah yang dilukiskan tambo sebagai "rusa yang datang dari laut, yang bertanduk bercabang tiga di kepalanya, yang datang membawa bala tentara". Akan tetapi, perang dapat dihindarkan dengan cara mengadu kerbau. (Lihat juga bab "tambo").

23 Tidak ada kesamaan pendapat para sejarawan tentang nama utusan yang dikirim Kertanegara untuk membawa arca Amoghapasa ke Darmasraya itu. Slamet Muljana berpendapat bahwa Adwayabrahma yang membawanya. Sedangkan arca itu dikatakannya hadiah dari Wiswarupakumara untuk Mauliawarmadewa. (Lihat *Nagarakertagama* hlm. 124-125). Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa Wiswarupakumara yang membawanya. Tokoh ini diperkirakan putra Kertanegara sendiri. Selagi ia di Darmasraya, Kertanegara dibunuh Jayakatwang. Akan tetapi, singgasana yang direbutnya, direbut lagi oleh Raden Wijaya yang mengambil kesempatan atas ketidakhadiran Wiswarupakumara itu. (Lihat Pitono Hardjowardojo *op. cit.* hlm. 38). Wiswarupakumara kemudian menjadi suami Dara Jingga sekembalinya dari Majapahit (Lihat D.G.E. Hall, *A History of South East Asia*).

24 Dara Petak dan Dara Jingga ialah putri Raja Darmasraya. Konon nama itu diberikan karena yang seorang bermata pitak (sipit) dan yang lain kulitnya berwarna merah jingga.

25 Ada dugaan bahwa yang menghamili Dara Jingga ialah Raden Wijaya sendiri sehingga anak yang dikandungnya adalah anak Raden Wijaya, yang setelah lahir bernama Aditiawarman. Perbuatan Raden Wijaya itu bukan suatu hal yang ganjil karena, sebelum kedatangan kedua

Pada waktu Darmasraya telah ditinggalkan bala tentara Singasari, yang kembali ke Jawa untuk membantu Kertanegara, raja turunan Mauliawarman menobatkan dirinya menjadi raja dan menamakan pusat kerajaannya dengan nama Malayapura. Sebagai raja, ia memakai gelar Tribuanaraya Mauliawarmadewa. Namun, ketika Gajah Mada²⁶ sebagai mahamenteri telah mengucapkan

orang dara itu, ia telah mengawini keempat putri Kertanegara sekaligus, Tribuana, Mahadewi, Jayendradewi, dan Gayatri yang kemudian bernama Rajapatni. (Lihat Slamet Muljana, *Nagarakertagama* hlm. 123). Muh. Yamin, tanpa menyebutkan nama, mengatakan bahwa Dara Jingga diperistri seorang pejabat tinggi istana yang termasuk seorang kerabat raja. (Lihat Muh. Yamin, *Gajah Mada*, hlm. 42). Dara Jingga kembali ke Darmasraya selagi hamil. Di negeri asalnya, ia melahirkan Aditiawarman. Dengan demikian Aditiawarman mempunyai darah Majapahit pula. Kemudian Dara Jingga menikah dengan Wiswarupakumara yang menjadi pejabat tinggi Majapahit di Darmasraya. Mungkin dari perkawinan kedua ini, Dara Jingga melahirkan seorang putra yang kemudian bernama Prapatih. Nama Prapatih ini muncul dalam tulisan pada arca Amoghapasa yang ditemui di Padang Candi dekat Pagaruyung, yang bersama-sama Aditiawarman mengembangkan wilayah kerajaan Minangkabau. Pitono Hardjowardojo menduga Prapatih itulah yang dimaksud sebagai Perpatih nan Sabatang. (Lihat Pitono Hardjowardojo *op. cit.* hlm. 10-11). Sedangkan Moens juga menduga hal yang sama. (Lihat J.L. Moens, *Budhisme di Jawa dan Sumatera dalam Masa Kejayaannya Terakhir*, hlm. 50). Ia mengemukakan analisa bahwa dalam arca Amoghapasa tertulis tiga nama, yaitu Aditiawarman (Matanginisa), permaisuri (Matagini), dan Dewa Tuhan, yang merupakan perupaan kelompok tiga seperti yang dilukiskan ajaran Birawa yang dianut Aditiawarman, yaitu Siwa (Wirabhada), Sati (Bhadrakali), dan Daksa. Katanya lebih lanjut bahwa Daksa Prajapati. Dewa Tuhan, dalam perjalanan masa harus menyerahkan tahtanya kepada Siwa, yang dalam hal ini raja bangsa Melayu menyerahkan kerajaannya kepada Aditiawarman sesudah Daksa dikalahkan Siwa. Setelah disadarkan kembali, Daksa dijadikan gagan-gananya, (yang dalam hal ini, sesudah Dewa Tuhan Waruyu Prapatih ditaklukkan, ia dijadikan Prapatih). Apabila ditautkan dengan cerita tambo, mungkin mengambil persamaan atas kelompok-ketiga, yang terdiri dari Datuk Ketumanggungan, Datuk Perpatih nan Sabatang, dan Cati Bilang Pandai. Jadi, kisah tambo itu bisa ditafsirkan menurut penyesuaian dengan sejarahnya, bahwa setelah Dara Jingga pulang kembali ke Minangkabau dan melahirkan Aditiawarman, ia menikah lagi dengan Wiswarupakumara yang menjadi wakil Kerajaan Majapahit mendampingi Sri Maharaja Diraja. Dari perkawinan kedua ini, Dara Jingga melahirkan Dewa Tuhan Prapatih. Aditiawarman dan Prapatih merupakan saudara seibu. Dalam tambo dikatakan Datuk Ketumanggungan adalah anak raja. Ketika ibunya menikah lagi dengan Cati Bilang Pandai, lahirlah adik seibunya yang bernama Datuk Perpatih nan Sabatang. Dengan demikian, mungkin Aditiawarman adalah Datuk Ketumanggungan, Prapatih adalah Datuk Perpatih nan Sabatang, sedangkan Wiswarupakumara adalah Cati Bilang Pandai. Sejarahwan lain melihat kemungkinan seperti yang dikemukakan Asmaniar Z. Idris, yaitu bahwa Dara Jingga mempunyai nama lain dalam tambo, yakni Bunda Kandung, sedangkan Dang Tuanku dan Cindur Mata ialah Aditiawarman dan Prapatih. (Lihat Asmaniar Z. Idris, "Kerajaan Minangkabau Pagaruyung" dalam Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau tahun 1970 di Batusangkar). Perbedaannya ialah dalam tambo dikisahkan bahwa Dang Tuanku dan Cindur Mata adalah bersaudara satu ayah dengan dua ibu. Komposisi pemimpin kelompok-tiga atau tiga serangkai ini merupakan pola pemerintahan dan pimpinan masyarakat Minangkabau kemudian.

26 Gajah Mada tokoh paling penting dalam sejarah Majapahit tidak dikenal asal-usulnya. Muh.

Yamin memperkirakan tempat lahirannya di sebuah desa di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Sedangkan menurut kepercayaan di Bali, seperti yang tertera dalam *Kitab Usana Jawa*, Gajah Mada dilahirkan di pulau itu. (Lihat Muh. Yamin, *Gajah Mada* hlm. 13). Sedangkan menurut Amrin Imran, dalam diskusi pada Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau tahun 1970 di Batusangkar, Gajah Mada berasal dari Minangkabau kalau dikaji menurut terminologi. *Gajah* dan *mada* adalah bahasa Minangkabau yang artinya *gajah* yang *bandel*. Orang Jawa tidak mungkin mengambil nama hewan yang tidak dipunyainya dan bukan pula bahasa miliknya. Kalau orang Jawa akan menamakan Gajah Mada menurut bahasanya, tentulah akan menjadi Liman Bandel. Muh. Yamin menafsirkan Gajah Mada seumpama gajah yang galak dan tangkas. Jika dicari pada kata-kata Sanskerta, *mada* artinya kesombongan, kegilaan, kemabukan, nafsu, atau perbuatan gegabah. Gajah Mada, yang tidak dikenal asal-usulnya itu, tampil awal mulanya ketika tahta kerajaan direbut Kuti, sehingga Jayanagara mengungsi ke Desa Badander. Sebagai komandan dari lima belas pengawal raja, seorang diri Gajah Mada pergi ke pusat kerajaan untuk membuat siasat mengalahkan Kuti. Siasatnya berhasil dan Kuti terbunuh, sehingga Jayanagara dapat dikembalikan ke istananya. Sebagai imbalan, Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan. Dua tahun berikutnya ia diangkat lagi menjadi Patih di Daha, sedangkan Rajapatni menjadi ratunya. Mungkin di kala itu ia bermuslihat dengan Rajapatni untuk menggulingkan Jayanagara yang dipandang terlalu lemah sebagai raja. Pada tahun 1328 Tanca, kawan Kuti yang gagal merebut tahta, mendapat kesempatan membunuh Jayanagara di istananya. Akan tetapi, Gajah Mada yang berada di dekat Tanca dengan gesit pula menikam Tanca sehingga mati seketika. Menurut Slamet Muljana, pembunuhan Jayanagara oleh Tanca merupakan siasat Gajah Mada sendiri, karena ia sering tidak sepaham dengan rajanya dalam hal pemerintahan. (Slamet Muljana, *Nagarakertagama* hlm. 130) Muh. Yamin juga mengutip dugaan yang sama, tetapi ia mengatakan bahwa tuduhan terhadap Gajah Mada itu tidak beralasan karena berlawanan dengan kesetiiaannya kepada Sri Mahkota (Muh. Yamin, *op. cit.* hlm. 29). Setelah kematian Jayanagara dan penobatan anak Rajapatni, yaitu seorang putri yang bernama Jayawisnuwardani, sebagai ratu yang memerintah Majapahit, terjadilah pemberontakan Sadeng. Pemberontakan itu segera dapat ditumpas Gajah Mada. Ia lalu diangkat menjadi patih Kerajaan Majapahit. Tidak lama kemudian, ia diangkat lagi menjadi patih Mangkubumi. Pada saat itulah ia melakukan *Sumpah Palapa* yang menyatakan bahwa ia tidak akan bersenang-senang dan memikirkan dirinya sendiri selama seluruh Nusantara belum ditaklukkannya. Menurut Muh. Yamin, ia mengucapkan sumpah itu pada tahun 1331. Sedangkan menurut Slamet Muljana, ia mengucapkan sumpah itu tahun 1334. Setelah Gajah Mada berhasil menaklukkan Kerajaan Aru di Sumatera Utara, Bone di Sulawesi, Seram di Ambon, Tanjungpura di Kalimantan, Pahak dan Tumasik di Semenanjung, Sunda, Bali, dan Dampo, pamornya jatuh di mata Hayam Wuruk karena menghina Raja Pajajaran yang datang membawa putrinya, Pitaloka, untuk dijodohkan dengan Hayam Wuruk. Karena tindakan Gajah Mada yang menghina itu, terjadilah Perang Majapahit dengan Pajajaran sehingga Raja Pajajaran tewas dan putri Pitaloka pun meninggal karena hatinya hancur. Semenjak itu peranan Gajah Mada berkurang. Lalu ia menghilang tidak jelas ke mana perginya. Hilangnya Gajah Mada membuat banyak cerita kemudiannya. Konon ia menenggelamkan dirinya ke laut di muara Kali

sebagai Aryadamar.²⁷ Dua kali ia dikirim ke Negeri Cina sebagai perutusan Kerajaan Majapahit. Bahkan dia aktif mendirikan berbagai candi Budha di Pulau Jawa. Ia pun mendapat gelar dari rakyat dengan panggilan Tuan Waruyu, yang artinya Tuan Bungsu.²⁸ Sedangkan kerajaan memberinya gelar Arya Wangsadiraja dan kemudian ditingkatkan lagi menjadi Sang Dewaraya. Aditiawarman memangku jabatan yang tinggi di keraton, yakni menjadi werdamenteri atau juga disebut prawadatar, yaitu suatu jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang dipegang Gajah Mada.

Sepeninggal Raden Wijaya, Keraton Majapahit tidak lagi aman karena para pangeran ingin menyinkirkan Jayanegara yang berdarah Melayu dari tahta dengan berbagai pemberontakan dan usaha pembunuhan. Misalnya, pemberontakan Ranga Lawe, pemberontakan Nambi, dan pemberontakan Kuti sampai berhasil menduduki keraton, sehingga Jayanegara bersama Gajah Mada lari bersembunyi. Akan tetapi, Jayanegara berhasil kembali ke tahtanya berkat bantuan Gajah Mada. Namun, pada tahun 1328 Jayanegara mati terbunuh juga oleh seorang abdi-dalemnya yang bernama Tanca karena alasan perempuan. Sedangkan Tanca saat itu juga mati ditikam Gajah Mada sendiri. Ada dugaan bahwa peristiwa berdarah itu didalangi sendiri oleh Gajah Mada

Brantas tahun 1364. Sepeninggalnya, tidak seorang pun yang mampu menggantikannya menjadi patih Mangkubumi. Dan semenjak itu nama Majapahit pun memudar dalam sejarah.

27 Dalam menaklukkan Bali, Gajah Mada didampingi Arya Damar. Dengan pasukan masing-masing, mereka menyerbu dari selatan dan utara. Arya Damar dapat membunuh Raja Pasunggiri. Muh. Yamin secara panjang lebar mengisahkan pertempuran ini, tetapi ia tidak mengungkapkan siapa sesungguhnya Arya Damar ini. Akan tetapi, Pitono berpendapat bahwa Arya Damar tidak lain adalah Aditiawarman. Menurut dia, kata *arya damar* berarti orang yang memiliki sinar, sedangkan kata *aditiawarman* secara harfiah pun berarti orang yang memiliki sinar. Pendapat ini bertolak dari *Babad Tanah Jawi* yang mengisahkan bahwa Raja Brawijaya V mempunyai istri putri Cina, yang terkenal sebagai Putri Campa. Putri ini ketika mengandung enam bulan diserahkan kepada seorang penguasa di Palembang yang bernama Arya Damar. Bayi yang lahir dari putri ini bernama Raden Patah. Dengan Arya Damar, putri ini melahirkan bayi yang bernama Raden Kusen. Sedangkan dalam *Kitab Usana Jawa* dan *Usana Bali* dikisahkan bahwa raja Majapahit mempunyai adik laki-laki bernama Damar, yang berasal dari Palembang. Ketika di Bali terjadi perlawanan Raja Pasunggiri, raja Majapahit mengirim pasukan di bawah pimpinan Damar dari Palembang dan Patih Gajah Mada. (Lihat Pitono Hardjowardojo *op. cit.* hlm. 32-33). Kisah dari sumber tua yang diikuti Pitono itu menimbulkan dugaan yang serba mungkin bahwa Aditiawarman adalah saudara seayah Jayanegara. Sedangkan Putri Campa yang dikirim ke Palembang selagi hamil sama miripnya dengan kepulangan Dara Jingga, hanya tokoh Arya Damar dikisahkan bukan sebagai anak Putri Campa, melainkan sebagai suami.

28 Tuan Waruyu ada kalanya ditulis Tuhan Waruyu. Kata *tuhan* lazim dipakai bangsa Melayu, yang artinya pemimpin atau ketua. Penamaan Tuhan Waruyu, yang artinya tuan bungsu, kepada Aditiawarman memperkuat dugaan bahwa ia adalah anak laki-laki Raden Wijaya yang bungsu, sedangkan Jayanegara adalah anak laki-laki yang tertua.

yang tidak puas kepada kepemimpinan Jayanegara yang lemah itu.

Dengan alasan Jayanegara tidak mempunyai turunan, Gajah Mada mengambil prakarsa untuk menobatkan Jayawisnuwardani, putri Raden Wijaya dengan istrinya yang bernama Rajapatni, salah seorang putri Kertanegara. Enam tahun kemudian Jayawisnuwardani melahirkan seorang putra yang kemudian dikenal dengan nama Hayam Wuruk. Kemudian Jayawisnuwardani kembali ke Kahuripan dan dinobatkan sebagai raja-bawahan di sana. Sedangkan di pusat pemerintahan Majapahit, tahta diduduki Rajapatni sebagai ratu perwalian menjelang Hayam Wuruk cukup umur.

Peristiwa itu menyebabkan Aditiawarman, yang merasa berhak menduduki tahta, tidak mempunyai kesempatan lagi. Ia lalu kembali ke Malayapura pada tahun 1343. Di sana ia dinobatkan menjadi raja. Ia lalu memindahkan pusat kerajaannya dari Siguntur, dekat Sijunjung, ke Pagaruyung²⁹ yang terletak di bagian paling hulu Batanghari. Pada tahun 1347 Aditiawarman menikah dengan saudara sepupunya, putri raja di Malayapura sebelumnya. Sebagai penerus dinasti Melayu, ia memakai gelar Mauliawarmadewa. Dua tahun setelah pemindahan pusat pemerintahan ke Pagaruyung, Aditiawarman mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Pertama ia menyerang Kerajaan Kuntu yang terletak di tepi Batangkampar untuk menembus jalan laut ke Selat Malaka yang lebih aman bila dibandingkan dengan Batanghari. Akhirnya kerajaannya meluas ke seluruh wilayah bagian tengah Pulau Sumatera, mulai dari muara Batanghari di selatan sampai ke muara Sungai Rokan di utara pada pantai sebelah timur dan di pantai barat mulai dari wilayah Indrapura di selatan sampai ke Barus di utara.

Tindakan Aditiawarman itu diduga sebagai pernyataan hendak melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Namun, tidak ada tindakan Gajah Mada terhadap gerakan Aditiawarman itu. Mungkin gerakan itu dipandang Gajah Mada tidak mengganggu posisi Majapahit karena Aditiawarman tidak mempunyai armada laut. Atau mungkin pula pada saat itu perhatian Gajah Mada lebih tertumpah pada perluasan wilayah ke bagian timur dan utara. Kemungkinan lain adalah rasa segan Gajah Mada pada Aditiawarman yang menjadi teman seperjuangannya di kala mula memperluas Kerajaan Majapahit.

Semasa pemerintahannya, Aditiawarman telah membuat tidak kurang dari 17 prasasti yang bertebaran di sekitar Pagaruyung. Pada prasasti Amoghapasa yang dijumpai di Padang Candi tertera bahwa Aditiawarman didampingi

29 Pemindahan pusat kerajaan lebih ke hulu Batanghari, bahkan sampai ke kaki Gunung Merapi, yang kemudian dinamakan Pagaruyung itu, merupakan usaha pemutusan hubungan dengan Majapahit dan upaya untuk menghindari serangan. Lokasi yang dipilih di kaki Gunung Merapi tidak begitu mudah dicapai sebab terhalang Bukit Barisan dan hutan belantara.

seorang tokoh yang disebut dewa tuhan prapatih. Hal itu memberi pertanda bahwa kedudukan prapatih sangat penting di samping Aditiawarman. Mungkin pada masa itulah bermulanya sistem pemerintahan Minangkabau seperti yang dinukilkan dalam tambo apabila yang dimaksud dewa tuhan prapatih sama dengan Perpatih nan Sabatang.³⁰

Pada tahun 1364 Gajah Mada meninggal tanpa diketahui tempat dan sebabnya secara pasti. Sejak itu Kerajaan Majapahit mulai menurun. Ananggawarman, anak Aditiawarman yang menggantikan kedudukan ayahnya karena telah tua, mengirim utusan ke Cina pada tahun 1373. Majapahit yang telah mulai lemah itu melakukan tindakan balasan dengan menghadang utusan Cina yang hendak membalas kunjungan utusan Ananggawarman di lautan. Barulah ketika Aditiawarman meninggal pada tahun 1375, pasukan Majapahit datang menaklukkan kerajaan di Pagaruyung itu, yang rupa-rupanya tidak akan dilakukannya selagi Aditiawarman hidup. Serangan itu terjadi pada tahun 1377.

Pada tahun 1389 Hayam Wuruk pun meninggal. Setelah itu kekuasaan Majapahit sebagai kerajaan terbesar di Nusantara dibawa pasang surut yang deras, terutama karena perebutan tahta antara pangeran yang berlainan ibu. Keadaan itu digunakan berbagai wilayah untuk membebaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Pagaruyung pun menggunakan kesempatan itu. Pada tahun 1409 Majapahit mencoba menundukkannya lagi, tetapi mereka dapat dikalahkan di Padang Sibusuk di hulu Batanghari. Sejak itu kerajaan yang didirikan Aditiawarman benar-benar terlepas dari kekuasaan Majapahit.

Zaman Pagaruyung

Pagaruyung merupakan pusat pemerintahan raja-raja Minangkabau. Pada masa pemerintahan Aditiawarman itulah diperkirakan organisasi pemerintahan kerajaan disusun menurut sistem organisasi yang berlaku di Majapahit. Kemudian organisasi pemerintahan itu secara berangsur berubah dengan penyesuaian seperti yang dikehendaki sejarah, baik dalam komposisi dan fungsinya maupun dalam hal nama-nama jabatannya. Perbandingan organisasi pemerintahan antara keduanya ialah sebagai berikut.

Majapahit

1. *Mantri katrini* (mahamenteri yang tiga), yaitu: mahamenteri hino, mahamenteri sirikan, dan mahamenteri halu.
2. *Catur rakrian* (penguasa yang empat), yaitu: rakrian demung, rakrian kanurun, rakrian rangga, dan rakrian tumenggung. Berlima dengan mahapatih disebut *panca ring wilwatika*.
3. *Darmajaksa yang berdua*, yaitu pembesar keagamaan Budha dan Hindu.

30 Lihat juga Pitono Hardjowardojo *op. cit.* hlm. 11-13).

4. *Saptapatri* (upapati yang tujuh), yaitu pembesar yang melaksanakan dan mengatur masalah hukum dan keamanan.³¹

Pagaruyung

1. *Raja tiga sila* (tungku tiga sejarangan), yaitu: cati bilang pandai, datuk katumanggungan, dan datuk perpatih nan sabatang yang merupakan pimpinan pusat pemerintahan.
2. *Basa Empat Balai*, yaitu: bandaharo di Sungai Tarab, andomo di Saruaso, mangkudum di Sumanik, dan tuan gadang di Batipuh yang merupakan pembesar pemerintahan pusat.
3. *Raja dua sila*, yaitu: raja adat di Buo dan raja ibadat di Sumpur Kudus.
4. *Gadang nan bertujuh*, yaitu tujuh orang pembesar yang melaksanakan tertib hukum dan keamanan.³²

Dalam sistem pemerintahan wilayah tampaknya pola Kerajaan Majapahit dipakai pula oleh Kerajaan Pagaruyung. Pada dasarnya sistem pemerintahan di wilayah terdiri atas dua pola. Yang di Majapahit terdiri dari *wilayah bawahan*, dengan pimpinan raja bawahan yang umumnya adalah anggota raja di pusat pemerintahan, dan *wilayah mancanagara*, yaitu daerah taklukan yang dipimpin raja wilayah itu sendiri. Sedangkan pola yang dipakai di Minangkabau ialah *wilayah rantau*, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh raja kecil sebagai wakil raja di Pagaruyung, dan *wilayah luhak* yang dipimpin para penghulu. Wilayah itu masing-masing diatur menurut sistem yang berbeda satu sama lain, sebagaimana yang diungkapkan mamang "Luhak berpenghulu, rantau beraja".

Belum diketahui dengan pasti apa yang terjadi setelah penyerangan Majapahit dapat dipatahkan pada tahun 1409 di Padang Sibusuk. Hanya pada tahun 1560 diketahui bahwa untuk pertama kalinya seorang raja Pagaruyung memeluk Islam. Raja itu kemudian disebut dengan Sultan Alif. Kedudukan raja masa itu sesungguhnya sudah sangat lemah. Selain karena umumnya penduduk telah menganut Islam, berbagai wilayahnya telah terbelah-belah. Beberapa kerajaan kecil di wilayah rantau telah melepaskan diri. Misalnya, Kerajaan Indragiri di pantai sebelah timur dengan bantuan Malaka dan Indrapura di selatan pantai barat dengan bantuan Aceh. Mungkin sejak itu riwayat asal-usul

31 Lihat juga Muh. Yamin, *op. cit.* hlm. 36.

32 Dalam beberapa kisah *tambo* lainnya, Tuan Gadang di Batipuh tidak disebut sebagai anggota Basa Empat Balai. Untuk posisi itu dicantumkan nama Tuan Kadi di Padang Ganting. Mungkin penggeseran itu pernah terjadi, tetapi mungkin juga penggeseran itu terjadi, hanya dalam kisah *tambo*, sebagaimana yang lazim dilakukan penulis yang biasa menggunakan huruf Arab yang pasti lebih memuliakan golongan Islam daripada golongan lain. Namun, nama Tuan Gadang di Batipuh senantiasa ditampilkan pada urutan kelima apabila *tambo* mengisahkan Basa Empat Balai itu. (Lihat juga bab "Tambo").

raja Minangkabau diubah menjadi turunan Iskandar Zulkarnain dari pernikahannya dengan Putri Suran anak Nabi Khaidir.³³

Sultan Alif diperkirakan meninggal pada tahun 1580 dan tidak diketahui siapa penggantinya. Sejarah Minangkabau kembali diliputi kabut tebal selama seabad sampai muncul nama Sultan Ahmadsyah pada tahun 1650-1670.³⁴

Perang saudara itu tampaknya mulai berkobar ketika Belanda mulai memainkan peranannya dalam merebut monopoli dagang dari tangan Aceh. Dengan Kompeninya, Belanda lebih memahami situasi dan kondisi politik dan perdagangan di Minangkabau masa itu. Misalnya, hasil bumi yang menjadi tujuan perdagangan utama dihasilkan di pedalaman, bukan di daerah pesisir yang dikuasai raja-raja kecil. Oleh karena itu, Belanda mencoba mendekati Sultan Ahmadsyah yang menjadi raja di Pagaruyung dengan mengakuinya sebagai maharaja yang berkuasa mulai dari Barus di utara sampai ke Muko-Muko di selatan pesisir barat, terus ke wilayah dari muara Batangkampar sampai ke muara Batanghari di bagian timur. Sebagai imbalannya Belanda memperoleh konsesi, seperti hak monopoli perdagangan dan hak mendirikan loji (gudang) di beberapa tempat di pesisir barat. Pada tahun 1667 Sultan Ahmadsyah malah mengirim utusan ke Batavia (Betawi, sekarang Jakarta) untuk meminta lindungan atas raja-raja kecil di pesisir, yang merupakan kerabatnya sendiri seperti Sultan Muhammadsyah di Indrapura, dari kekuasaan Aceh.³⁵

Tindakan itu tampaknya tidak disetujui anggota pimpinan lainnya, sehingga setahun sebelum ia meninggal pada tahun 1680, dua orang, yang masing-masing menyatakan dirinya sebagai yang dipatukan di Minangkabau, mengirim utusan kepada Belanda. Yang seorang menamakan dirinya Sultan Khalifatullah mengirim utusan ke Batavia lewat Jambi, yang lainnya, yang dipatukan yang berkedudukan di Saruas, mengirim utusan ke Padang melalui Sintuk dekat Lubukalung. Ketika Sultan Ahmadsyah meninggal disebutkan seorang yang bernama Raja Alif sebagai penggantinya. Akhirnya, perang saudara tidak terhindarkan lagi. Sekurang-kurangnya pimpinan kerajaan terpecah tiga.³⁶

33 Penghapusan sejarah lama dengan kisah Iskandar Zulkarnaen mungkin karena berbagai alasan, antara lain fanatisme penganut Islam yang menolak dominasi Hindu dalam sejarah tanah air mereka (Lihat Asmaniar Z. Idris, *op. cit.* hlm. 9). Akan tetapi, dapat juga karena pengalaman sejarah bangsa Melayu yang getir selama kekuasaan Majapahit, sehingga dominasi Majapahit bukan saja dihapus dari tambo tetapi juga dalam *Sejarah Melayu*. Jadi, bukan karena fanatisme Islam, sebab Iskandar Zulkarnain bukanlah penganut Ahli Kitab sehingga statusnya sama dengan penganut Hindu. Sejarawan lainnya memperkirakan bahwa pemakaian nama Iskandar Zulkarnaen karena ingin menaikkan derajat asal-usul raja-raja Melayu (Lihat *Ensiklopedia Indonesia* di bawah nama "Iskandar Zulkarnain").

34 Lihat M.D. Mansoer, *Sejarah Minangkabau*, hlm. 63.

35 Lihat M.D. Mansoer *op. cit.* hlm. 100.

36 Nama Raja Alif ditemui dalam *Ensiklopedia Indonesia*. Dalam ensiklopedia ini diterangkan

Perpecahan itu dijadikan Belanda sebagai alasan untuk membatalkan semua perjanjiannya, sehingga ia tidak perlu lagi memberikan cukai kepada raja Pagaruyung atau salah seorang dari yang berkuasa.

Akan tetapi, pada tahun 1684 seorang Portugis, Thomas Diaz, diserahi Belanda yang berkedudukan di Malaka untuk memasuki pedalaman Minangkabau. Sebagai orang Eropa pertama yang memasuki pedalaman Minangkabau, ia sempat bertemu dengan salah seorang anggota raja tiga sila yang berkedudukan di Buo. Siapa namanya tidak disebutkan oleh laporan orang Portugis itu.³⁷

bahwa pada masa pemerintahannya terjadi perpecahan kerajaan menjadi tiga, yaitu pada tahun 1685. Tidak diceritakan ketiga kelompok yang terpecah itu. M.D. Mansoer menyebutkan bahwa semasa Raja Alif pada tahun 1560 telah terjadi pembagian tiga kekuasaan di Kerajaan Pagaruyung, yakni Raja Alam di Pagaruyung, Raja Adat di Buo, dan Raja Ibadat di Sumpur Kudus. Ketiga raja itu lazim disebut Raja Tigo Selo. (M.D. Mansoer, *Sejarah Minangkabau* hlm. 64). Menurut Asmaniar Z. Idris, Raja Alif meninggal tahun 1680 dan karena ia tidak mempunyai keturunan, terjadi perebutan tahta. Menurut Van Bazel yang dikutipnya, perebutan tahta itu terjadi antara Bandaharo di Sungai Tarab, Andomo di Saruaso, dan kerabat istana Pagaruyung sendiri. (Lihat Asmaniar Z. Idris *op. cit.* hlm. 10). Perihal Raja Alif terdapat dua keterangan. Selain yang hidup abad ke-16, juga terdapat nama yang sama di abad ke-17. Konon nama Alif dipakai karena dialah raja Minangkabau pertama yang memeluk agama Islam. Jika pendapat itu benar, pastilah ada dua orang yang bernama Raja Alif. Oleh karena tidaklah mungkin Raja Alif pada abad ke-17 memakai nama Alif sebagai raja pertama yang memeluk Islam. Sebab sebelum Raja Alif telah ada Raja Ahmad-syah yang digantikannya. Nama Ahmad-syah sudah menunjukkan nama pemeluk Islam. Jika sekiranya di Minangkabau hanya ada seorang yang bernama Raja Alif, maka yang kemudian itulah orangnya karena lebih banyak keterangan yang ada padanya dibandingkan dengan yang lain. Nama Alif dipakai sudah tentu tidak karena sebagai raja yang pertama memeluk Islam. Adanya anggapan banyak penulis Barat bahwa kerajaan terpecah dalam tiga bagian karena ketidakpahaman mereka tentang organisasi pemerintahan di Minangkabau, yaitu bahwa Raja Pagaruyung dibantu Basa Empat Balai. Anggota Basa Empat Balai itu masing-masing mempunyai wilayah yang berada di bawah pengawasannya. Wilayah yang di bawah pengawasan itu ialah wilayah yang di bawah kekuasaan raja, yaitu wilayah rantau. Pembagian pengawasan itu ialah: rantau pesisir yaitu wilayah pantai bagian selatan, di bawah bandaharo di Sungai Tarab; rantau hilir, yaitu di bagian selatan di sepanjang Batanghari, di bawah Tuan Kadi di Padang Ganting; rantau mudik di bagian sebelah utara sampai ke Barus, di bawah andomo di Saruaso; sedangkan Negeri Sembilan di bawah pengawasan mangkudum di Sumanik. Jika melihat tempat kedudukan anggota Basa Empat Balai itu tidak berjauhan, tidaklah mungkin mereka itu saling memisahkan diri. Mungkin raja-raja kecil (raja bawahan) yang diberi kuasa di wilayah rantau sebagai wakil raja Pagaruyung itulah yang menemui Belanda dan mengatasmakan anggota Basa Empat Balai. Dari pihak Belanda sangat penting artinya perpecahan itu, apalagi untuk dibesar-besarkan. Kenyataannya, pada masa itu kekuasaan raja Pagaruyung benar-benar sebagai raja simbol. (Lihat juga bagian "Awal Penjajahan Belanda").

37 Raja Adat di Buo pada abad ke-17 itu tampaknya tidak memiliki istana. Ia hanya tinggal dalam rumah yang umum, mungkin rumah adat saja. Namun, rumahnya mempunyai halaman yang cukup luas dan pintu gerbang. Di pintu gerbang pertama Thomas Diaz melihat tidak kurang dari seratus pengawal, sedangkan di pintu gerbang kedua hanya empat orang

Pada tahun 1730 yang menjadi raja di Pagaruyung tampaknya Sultan Bagagar Alamsyah. Belanda membuat perjanjian baru dengannya, yang sudah tentu sangat menguntungkan pihak Belanda, sebab kedudukan raja Pagaruyung itu telah demikian lemah. Setelah ia meninggal, penggantinya — Sultan Sri Maharaja Diraja — terpaksa lagi memperbarui perjanjian dengan Belanda pada tahun 1780. Bahkan yang terakhir ini meminta perlindungan bagi wilayahnya yang telah digerogeti pengikutnya sendiri.³⁸

Situasi di Eropa juga mempengaruhi situasi perebutan kekuasaan di Minangkabau. Sampai dua kali Padang, yang menjadi benteng Belanda, dikuasai Inggris. Yang pertama pada tahun 1781-1785 berhubungan dengan permusuhan antara kedua negara itu, karena Belanda berpihak pada pemberontak Amerika yang melawan Inggris. Yang kedua pada waktu Perang Napoleon, ketika Belanda ditundukkan Napoleon di Eropa, maka kekuasaannya di Minangkabau diambil alih Inggris di bawah pimpinan Thomas Stanford Raffles tahun 1795-1819.

Pada masa itu di Minangkabau tengah terjadi pertarungan sengit antara pengikut Paderi dan pengikut raja Pagaruyung. Dalam pertarungan berdarah itu, raja Pagaruyung Sultan Muning Alamsyah bersama cucunya sempat menghindari. Sutan Alam Bagagarsyah, kemenakan Sultan Muning Alamsyah, minta bantuan Inggris untuk melawan Paderi. Raffles lalu memasuki wilayah pedalaman Minangkabau dan bermarkas di Simawang di dataran tinggi yang strategis di tepi Danau Singkarak. Dari sana ia mengundang Tuan Gadih, istri termuda Sultan Muning Alamsyah, untuk menjalin persahabatan. Undangan itu dipenuhinya.

Setelah Inggris menyerahkan kembali Kota Padang kepada Belanda seusai Perang Napoleon, Sutan Alam Bagagarsyah beserta empat belas orang penghulu pelarian juga menyerahkan Minangkabau kepada Belanda, asal Belanda mau memerangi Paderi. Perjanjian penyerahan itu berlangsung pada tahun 1821. Dengan demikian berarti Kerajaan Pagaruyung sudah tidak ada. Empat tahun kemudian Sultan Muning Alamsyah pun meninggal dalam usia 80 tahun. Sedangkan Sutan Alam Bagagarsyah, yang mulanya diakui sebagai raja Minangkabau, hanya diangkat menjadi regen kepala (*hoofdregent*) wilayah Tanah Datar dengan gaji 100 gulden sebulan.³⁹

pengawal. Di pintu masuk rumah yang terlihat hanya seorang pengawal. Utusan itu melihat bahwa Raja Adat di Buo dikelilingi para haji. Sebagai utusan, Thomas Diaz diberi gelar "Orang Kaya Saudagar Raja dalam Istana." (Lihat Rusli Amran, *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*, Jakarta, Sinar Harapan, 1981, hlm. 103-109).

38 Lihat juga Geoffrey A. Hodgson, "Penilaian Tiga Pucuk Surat Mengraja sebagai Pokok Penyelidikan Sejarah Minangkabau", makalah Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.

39 Rusli Amran dalam bukunya mengemukakan bahwa penyerahan Minangkabau kepada

Awal Penjajahan Belanda

Sejak Vasco da Gama, orang Eropa pertama, menjejakkan kakinya di India pada tahun 1498, setelah mengarungi laut dan tersesat sampai ke Brazilia, dimulailah babak baru sejarah bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Pada mulanya ia ditugasi raja Portugis untuk menyingkirkan orang-orang Islam dari perdagangan dan pelayaran di Samudra Atlantik. Akan tetapi, setelah raja Portugis mendapat laporan akan kemakmuran rakyat di Asia, misi mereka berubah menjadi penakluk. Pada tahun 1511, Kota Malaka, yang menjadi bandar terkemuka di bidang perdagangan rempah-rempah, ditaklukkannya.

Pedagang dan pelaut Belanda, yang selama ini menjadi penghubung antara Portugis dan Eropa bagian utara, tidak dapat lagi memainkan peranannya karena Portugis telah bersekutu dengan Spanyol, sedangkan Spanyol tengah berperang melawan Belanda. Akibatnya, banyak kapal Belanda yang disita di pelabuhan Portugis. Hal ini mendorong Belanda mencari jalan sendiri ke sumber hasil bumi yang mereka perdagangan itu. Pada tahun 1596, setelah berlayar selama 14 bulan, empat buah kapal Belanda berlabuh di Banten sesudah mampir di Pulau Enggano. Sukses armada dagang yang pertama ini menimbulkan perlombaan dan persaingan di kalangan pedagang dalam mengirimkan armada masing-masing. Pengiriman armada sampai merembes ke Gresik dan Maluku. Perlombaan dan persaingan ini tentu saja tidak membawa keuntungan. Kemudian atas prakarsa pemerintahnya, didirikanlah sebuah

Belanda oleh Sutan Alam Bagarsyah merupakan sandiwara yang diatur oleh Belanda sendiri karena Belanda memerlukan alasan untuk menguasai Minangkabau dengan menggunakan orang Minangkabau pula. Ketika kedudukannya telah kuat, Gubernur Jenderal Van den Bosch memerlukan seorang penguasa pribumi sebagai raja, sebagaimana yang dilakukannya di Pulau Jawa dengan mengangkat seorang raja sebagai alat kekuasaan. Van den Bosch melihat satu-satunya orang yang tepat untuk jabatan itu ialah Sutan Alam Bagarsyah, selain karena dialah yang memimpin penyerahan, ia juga kerabat dekat raja Pagaruyung. Akan tetapi, penguasa Belanda di Padang hanya mengusulkan Sutan Alam Bagarsyah sebagai *hoofd regent* untuk wilayah darat, sedangkan Sutan Raja Mansur Alamsyah sebagai *hoofd regent* untuk wilayah pesisir Padang. Akan tetapi, sebelum keputusan pemerintah di Batavia dikeluarkan, pimpinan pemerintah di Padang diganti dengan Letnan Kolonel Ridder de Stuers. Ia tidak melihat bahwa Sutan Alam Bagarsyah sebagai tokoh yang cocok seperti yang dikehendaki Van den Bosch. Atas usulnya Sutan Alam Bagarsyah diangkat menjadi *regent* Tanah Datar saja dengan gaji seratus gulden sebulan. Ketika De Stuers pindah ke Batavia, ia digantikan Elout. Elout ini pun tidak melihat kepemimpinan Sutan Alam Bagarsyah sebagaimana yang direncanakan pemerintah di Batavia dalam mencari tokoh yang dapat dijadikan raja Minangkabau. Elout malah melihat seorang tokoh yang tepat, yakni kemenakan Sultan Muning Alamsyah yang lain, Tuanku Buo. Akan tetapi, Tuanku Buo tidak mau diperalat Belanda. Untuk memperkuat posisinya Belanda mengangkat Datuk Pamuncak keturunan Tuan Gadang Batipuh selaku *regent* Batipuh. *Regent* yang baru ini berambisi menggantikan kedudukan Sutan Alam Bagarsyah, sehingga antara

persekutuan dagang dengan nama VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang kemudian lebih dikenal sebagai kompeni. Pada mulanya kapal-kapal VOC ini diawaki para penjahat yang dipersenjatai dan diberi kewenangan penuh melakukan kekerasan bilamana perlu, bahkan mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Nusantara bagi kepentingan perdagangan.

Pada awal abad ke-17 Belanda telah menguasai dan menaklukkan beberapa kepulauan yang menghasilkan rempah-rempah yang menjadi komoditi utama perdagangannya, seperti Ambon, Tidore, Ternate, dan Banda. Pada pertengahan abad itu juga mereka telah merembes menguasai Makassar dan beberapa pelabuhan dagang yang penting di pantai utara Pulau Jawa.

Sejak awal abad ke-17 itu, Belanda mulai mengadakan hubungan melalui pantai barat, tetapi selalu kandas usahanya karena terbentur posisi Aceh yang sangat kuat di sana. Mereka dapat berdagang dengan Minangkabau asal memperoleh persetujuan raja Aceh dengan membayar cukai lebih dahulu. Aceh yang menguasai pantai barat dan pantai timur di belahan utara Pulau Sumatera, dan yang berarti menguasai jalan laut di Selat Malaka, dengan sendirinya mempunyai lawan-lawan. Lawan-lawannya itu adalah raja-raja yang berada di sekitar Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka serta bangsa-bangsa Eropa seperti bangsa Inggris, Portugis, dan Belanda yang ingin memperoleh hak-hak perdagangan yang bebas dan menguntungkan. Namun bangsa-bangsa Eropa itu tidak bersatu melawan Aceh, malah saling berebut mengam-

kedua *regent* itu terjadi persaingan. Sutan Alam Bagagarsyah sangat kecewa akan kebijaksanaan Elout itu. Akan tetapi, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia memang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, selain hanya dapat memperlihatkan rasa tidak senangnya kepada Elout. Ketika terjadi serangan serentak terhadap kubu dan kedudukan Belanda pada bulan Januari 1833, Sutan Alam Bagagarsyah bersama Sentot Alibasya dan Tuanku Nan Cadik ditangkap atas perintah Elout. Rusli Amran mengemukakan bahwa penangkapan ini merupakan tindakan Elout dalam mencari "kambing hitam" peristiwa yang sangat memalukan dirinya karena lebih dari 150 pasukan Belanda tewas. Di samping itu, pada saat peristiwa itu berlangsung, ia sedang menunggu suatu promosi atas keberhasilannya menaklukkan Minangkabau. Ketiga orang itu diangkut ke Batavia. Van den Bosch yang tidak percaya atas "pengkhianatan" mereka menyuruh Ridder de Steurs untuk memeriksa. De Steurs yang selama di Minangkabau tidak menyukai Sutan Alam Bagagarsyah pun tidak melihat kesalahan atau pengkhianatannya. Ketika mula bertemu dengan De Steurs, Sutan Alam Bagagarsyah bersama Tuanku nan Cadiak serentak bersujud dan memeluk kaki De Steurs. Van den Bosch setuju dengan hasil pemeriksaan De Steurs yang menyatakan bahwa Sutan Alam Bagagarsyah tidak terlibat dengan Gerakan Tandikat dan tidak melakukan pengkhianatan kepada Belanda. Van den Bosch bahkan menginginkan agar Sutan Alam Bagagarsyah dikembalikan ke kedudukannya di Minangkabau. Akan tetapi demi kemungkinan kerja sama dengan Elout, residen di Padang, Sutan Alam Bagagarsyah dibebaskan di Batavia dengan mendapat gaji. Pada tahun 1849 ia meninggal dan dikuburkan di Manggadua. Kemudian jenazahnya dipindahkan ke Taman Pahlawan Kalibata oleh pemerintah RI pada tahun 1975, karena makam Manggadua digusur. (Lihat Rusli Amran, *op. cit.* hlm. 540-626).

bil hati Aceh yang sangat kuat pada masa itu. Ketika Aceh kehilangan Iskandar Muda, kejayaan Aceh mulai menurun dan makin merosot setelah penggantinya pun berpulang. Sejak itu armada dagang Belanda mulai agak leluasa melakukan perdagangan dengan bandar dagang di pantai barat Minangkabau, seperti Tiku, Pariaman, dan Indrapura. Namun, keleluasaan itu tidak berlangsung lama. Saling serang Belanda dengan Aceh berlangsung kembali. Aceh masih menguasai semua bandar perdagangan itu. Akhirnya terjadi juga perdamaian. Belanda harus mengganti berbagai kerugian yang ditimbulkan peperangan itu. Sebaliknya, Aceh memberi konsensi kepada Belanda dengan mengizinkannya membuka kantor dagang di Padang. Persetujuan itu terjadi pada tahun 1660.

Semenjak persetujuan itu, Belanda mendapat basis untuk melakukan siasat dengan menghasut penguasa di sepanjang pantai barat Minangkabau itu agar membebaskan dirinya dari Aceh. Sebaliknya, raja-raja kecil yang terpicat pada hasutan Belanda mendapat perlawanan rakyatnya sendiri yang mendapat hasutan Aceh. Raja Indrapura, yang selama ini merupakan raja muda Kerajaan Pagaruyung yang membebaskan dirinya dari rajanya berkat bantuan Aceh, mencoba pula membebaskan dirinya dari kekuasaan Aceh dengan bekerja sama dengan Belanda. Sultan Muhammadsyah ini mengirim utusan ke Batavia pada tahun 1663 sebagai pengukuhan "Perjanjian Painan" yang dibuatnya dengan Belanda di Pulau Cingkuk. Sebenarnya persetujuan itu juga merupakan dukungan Belanda kepada Muhammadsyah untuk menggantikan ayahnya yang lari ke benteng Belanda di Pulau Cingkuk karena diserbu rakyatnya yang berontak.

Oleh karena Belanda merasa kedudukannya telah aman di pesisir selatan, maka perhatiannya ditujukan ke pesisir utara untuk menguasai Pariaman dan Tiku. Gerakannya dibantu pasukan yang didatangkan dari Jawa. Ketika kedua bandar itu telah dikuasainya dan pasukan yang membantu telah kembali ke Jawa, rakyat Pauh melakukan serangan sengit ke kedudukan Belanda di Padang dan memutuskan hubungan Padang dengan daerah pedalaman Minangkabau. Keberhasilan serangan rakyat Pauh pada kedudukan Belanda itu diikuti pula oleh serangan penduduk Kototengah, Ulakan, dan Pariaman terhadap setiap pos Belanda di wilayah itu.

Pada saat yang gawat itu datanglah utusan raja Pagaruyung, Sultan Bagagar Alamsyah, menemui Belanda di Pulau Cingkuk. Sebelumnya mereka telah mendatangi Indrapura dan juga Pariaman. Raja Pagaruyung yang selama ini telah digerogoti Aceh, sehingga hampir semua raja muda yang diangkatnya telah membelot darinya, kini menginginkan pengakuan hak kuasanya di seluruh wilayah Minangkabau pada masa jayanya. Belanda menyetujui keinginan itu. VOC mengangkat raja Pagaruyung sebagai mantri raja yang bertindak sebagai kuasa Pagaruyung di seluruh pesisir. Mantri raja itu berkewajiban

membayar "upeti" sebanyak 2.000 gulden setiap tiga tahun kepada "raja"-nya, tetapi raja Pagaruyung tidak boleh lagi mengutip pajak di pesisir.

Semenjak itu, atas nama raja Pagaruyung, Belanda melakukan penaklukan ke semua kota pantai sampai ke Barus. Namun, penduduk di sekitar bandar perdagangan yang dikuasai Belanda itu, terutama penduduk Pauh dan Kototengah, terus melakukan serangan atas pos-pos Belanda. Tidak kurang dari 20 kali serangan gencar rakyat Pauh terhadap Belanda selama 75 tahun (1665-1740), tidak termasuk insiden kecil-kecilan. Malah akhirnya Raja Putih, anak bandaharo di Sungai Tarab, yang diangkat sebagai wakil kerajaan Pagaruyung di markas Belanda, ikut melakukan perlawanan bersama rakyat Pauh setelah ia ditugasi menjadi regen Pauh. Perlawanannya dapat dipatahkan dan ia terpaksa lari ke Ilalang. Di sana ia bertemu dengan pasukan yang dipimpin Andomo di Saruaso. Mereka secara bersama menyerang Padang. Lima ratus orang di antara pasukan mereka mengenakan jubah putih serta mengalungkan tasbih di lehernya. Namun, pasukan itu dapat dikalahkan Belanda. Pada tahun 1755 Pauh dapat dikuasai Belanda seluruhnya.⁴⁰

Zaman Islam

Persentuhan bangsa Asia Tenggara, tegasnya suku bangsa yang mendiami Sumatera dengan bangsa yang mendiami jazirah Arab telah berlangsung jauh sebelum munculnya agama Islam, karena sejak Iskandar Zulkarnaen di India telah ada perahu Sumatera berlayar secara teratur ke negeri itu. Bahkan jauh sebelumnya, perahu Sumatera itu telah berlayar sampai ke Madagaskar menyusuri pantai benua Asia dan benua Afrika. Rempah-rempah dan emas dari Sumatera telah menjadi bahan perdagangan yang utama yang diangkut pedagang Arab dengan memakai perahu mereka sendiri atau dengan memakai perahu Sumatera. Hal ini menyebabkan nama harum rempah-rempah dan kapur barus Sumatera, telah tercantum dalam salah satu ayat Alquran sebagai campuran minuman bagi ahli surga.⁴¹

Keharuman rempah-rempah Pulau Sumatera itu telah mengundang Khalifah Muawiyah untuk mengirim surat kepada Sri Maharaja Lokitawarman, raja Sriwijaya yang berkedudukan di Sabak,⁴² agar memeluk agama Islam. Sr

40 Penduduk Pauh tidaklah benar-benar tertaklukkan Belanda pada masa itu karena pada tahun 1844 mereka melakukan pemberontakan besar-besaran menentang Belanda. Mereka dapat dikalahkan lagi. Namun, pada waktu kaum komunis menghembuskan pemberontakan pada tahun 1926, mereka pun bangkit lagi.

41 Ayat 6 Surat Ad-Dar itu lengkapnya berbunyi: *Innal ahrara yasyrabuuna min ka'sin kana mizaajuha kafuura*, yang artinya: "Sesungguhnya orang baik-baik akan minum dari piala yang campurannya dari kapur." Kapur itu ditafsirkan Hamka sebagai kapur barus yang berasal dari Sumatera. (Lihat Hamka, *Antara Fakta dan Khayal* "Tuanku Rao" hlm. 192).

42 Penentuan kedudukan Sriwijaya di Sabak (Muarasabak) Jambi, menurut Soekmono, berda-

Maharaja rupa-rupanya membalas surat itu dengan menyatakan kebesarannya bahwa ia memiliki 1.000 ekor gajah dan istananya terbuat dari bata emas dan perak, dalam kerajaannya mengalir dua sungai yang mengairi kebun gaharu, dan ia juga mengabarkan bahwa ia mempunyai 1.000 orang dayang. Pada waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pengganti Muawiyah, Sri Maharaja kembali yang membanggakan 1.000 gajahnya serta 1.000 dayangnya. Di samping itu, ia minta guru yang akan mengajarkan agama Islam karena ia ingin memeluknya.⁴³ Tidak begitu jelas kelanjutan permulaan pengaruh Islam pada Sri Maharaja yang menjadi raja di Sriwijaya itu. Sriwijaya tampaknya terus menganut agama Budha dan mengembangkannya ke Jawa. (dengan mendirikan candi Borobudur?). Ada dugaan hubungan keduanya renggang karena sejak tahun 749 terjadi perubahan pemerintahan di Jazirah Arab, yakni dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Pada saat yang sama, pamor dinasti Tang di Cina menanjak dan mereka mempunyai kesempatan untuk memutuskan hubungan dagang antara Sriwijaya dan Arab. Namun, hubungan yang telah terjadi itu menjadi permulaan penamaan pulau yang menjadi pusat Sriwijaya berubah menjadi Sumatera.⁴⁴

Kedatangan saudagar Arab di Sumatera telah menimbulkan pemukiman mereka di pantai timur dan barat Aceh, seperti Pase, Lamuri, Lho Semawe, dan Barus sejak abad ke-8 sampai abad ke-12. Sekitar tahun 1270 Pase menjadi kerajaan pertama di Aceh di bawah pimpinan Meurah Silu yang kemudian bergelar Sultan Malik As-Salib.⁴⁵ Laporan perjalanan Marco Polo pada akhir

sarkan alasan letak geografis yang cocok sebagai pelabuhan pelayaran dan juga berdasarkan persamaan bunyi dengan Alzabai, yang kadang-kadang juga dibaca Zabag oleh penyalin sejarah Barat. (Lihat Soekmono, *op. cit.* hlm. 82). Sedangkan Slamet Muljana berpendapat Alzabai atau Zabag yang ditemukan dalam berita Arab itu adalah salinan kata Jawaka. Jawaka tidak ada sangkut-pautnya dengan Jawa. Menurut orang Tamil, Jawaka ialah Sumatera dan juga Semenanjung, seperti yang terdapat pada kisah Culawangsa yang mengatakan bahwa Jawaka menyerang Srilanka pada tahun 1247 dan 1271. Sedangkan dalam berita Arab itu sendiri dikatakan bahwa di Alzabai itu terdapat Fansur, Malayur, dan Lamuri yang ketiganya terletak di Sumatera, oleh karena itulah, Slamet Muljana berpendapat bahwa Alzabai itu maksudnya Sumatera yang sebelumnya disebut Jawaka. (Lihat Slamet Muljana, *Kuntala, Sriwijaya, dan Suwarnabhumi* hlm. 21).

43 Keterangan ini terdapat dalam majalah yang diterbitkan di Pakistan, *Islamic Studies* yang memuat tulisan S.Q. Fatemi: "Dua Pucuk Surat Maharaja untuk Khlaifah" (Lihat Hamka, *op. cit.* hlm. 54).

44 Pada umumnya sejarawan berpendapat bahwa asal nama Sumatera dari Samudera yang menjadi nama kerajaan di Aceh pada abad ke-14, seperti yang diungkapkan C. Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers*. Sedangkan N.J. Krom dalam *Geschiedenis van Nederlandsch Indie* berpendapat bahwa nama Sumatera berasal dari Suwarnadwipa yang disalin oleh Arab menjadi Syamtalira.

45 Pase konon berasal dari Parsa atau Parsi. Diduga penamaan itu karena di lokasi itu pada mulanya didapatkan banyak saudagar yang berasal dari Parsi (Lihat juga C. Snouck Hurgronje dalam *De Atjehers*).

abad ke-13 dan Ibnu Batutah pada pertengahan abad berikutnya memperkuat berita kehadiran agama Islam di berbagai pelabuhan dagang Aceh. Dari Aceh inilah sejak abad ke-8 dan ke-9 Masehi agama Islam memasuki Minangkabau dan menjadi lebih giat pada awal abad ke-13. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 1250 tercatat seorang ulama, Syekh Burhanuddin, seorang Aceh yang lama bermukim di Aceh, telah berkubur di Kuntu yang pada masa itu merupakan wilayah Darmasraya.⁴⁶ Adanya kubur Syekh Burhanuddin yang bertarikh abad ke-13 bisa memberi tafsiran bahwa penguasa di Darmasraya tidaklah memusuhi orang-orang Islam. Adanya kubur itu memberi petunjuk bahwa di Kuntu tentulah telah banyak pengikut Syekh Burhanuddin.

Ketika Majapahit melakukan ekspedisi ke Pase, yang tentu saja membawa pasukan yang berasal dari Darmasraya yang juga sudah dikenal sebagai Minangkabau, persentuhan orang Minangkabau dengan Islam menjadi lebih akrab. Sebagai dugaan, hal ini diperkuat secuil kisah dalam *Hikayat Raja-Raja Pase* yang menceritakan juga kisah Gajah Mada diperintah Sang Nata membawa kerbau besar untuk diadu dengan kerbau Patih Sewatang pada suatu ekspedisi ke kaki Gunung Merapi di Sumatera. Yang dimaksud dengan Patih Sewatang jelaslah Perpatih nan Sabatang yang dikenal dalam tambo dan tertera namanya pada arca Amoghapasa.

Kemudian dalam catatan Kronik Islam di Filipina dikisahkan bahwa pada tahun 1390 seorang yang bernama Raja Baginda dari Minangkabau yang beragama Islam telah datang memimpin pasukan menyerang Moro. Dalam catatan itu tidak diterangkan apakah pasukan itu berasal dari Malaka yang telah memeluk Islam ataukah pasukan Majapahit yang menguasai Minangkabau. Hal itu bisa menimbulkan berbagai kemungkinan. Kerajaan yang paling berambisi di Asia Tenggara untuk memperluas wilayahnya ialah Majapahit meskipun pada masa itu Malaka yang Islam telah mulai tumbuh pula sebagai kerajaan yang kuat. Oleh karena itu, mungkin Raja Baginda yang ikut menyerang Pase, lalu memeluk Islam di sana, dan kemudian ia diperintahkan ke Moro oleh Majapahit. Namun, ia tidak kembali. Ia menetap di sana dan menjadi raja serta mengislamkan masyarakat Moro di Filipina Selatan.⁴⁷

Meskipun orang Minangkabau telah banyak menganut Islam, raja Pagaruyung yang pertama memeluk agama Islam baru Sultan Alif, yaitu pada tahun 1560. Ada berbagai pendapat bahwa masa itu Kerajaan Pagaruyung telah terpecah belah dan sangat lemah sehingga menjadi alasan raja masuk Islam agar mendapat bantuan dari Aceh untuk memperkukuh tahtanya. Hal ini

46 Lihat Mahmud Junus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 10.

47 Nama Moro berasal dari bahasa Spanyol yang artinya sama dengan Moors, sebagai penamaan bagi orang yang menganut agama Islam. Ketika Spanyol menguasai Filipina, orang-orang Islam di selatan Filipina itu mereka sebut Moro.

memperlihatkan betapa lambannya agama Islam berkembang di Minangkabau yang penyebarannya tanpa menggunakan kekerasan itu.

Kemudian sejarah mencatat pula bahwa tokoh ulama yang paling terkemuka muncul di Ulakan, Pariaman, yakni Syekh Burhanuddin. Konon pada awal abad ke-17 bersama orangtuanya terpaksa menyingkir ke Sintuk, karena sebagai penganut Islam, mereka diisolasi penduduk nagarinya, Pariangan, yang masih menganut agama Budha. Sebelumnya, ia bernama Pono yang berkeahlian dengan seorang saudagar India yang bernama Ilappai.⁴⁸ Hubungannya yang semula bersifat dagang lalu beralih kepada pemahaman dan keyakinannya akan agama Islam. Tidak lama di Sintuk, Pono pergi ke Aceh. Mungkin juga pada mulanya untuk berdagang. Ia bertemu dengan Syekh Abdurrauf dari Barus.⁴⁹ Setelah empat belas tahun belajar pada syekh itu, sebelum kembali ke negerinya, Pono diberi nama Burhanuddin oleh gurunya. Burhanuddin, yang kemudian digelar Syekh oleh muridnya itu, menetap di Ulakan. Ajaran tarekat Syatariyah yang dianutnya cepat memperoleh pengikut sehingga mengimbangi ajaran tarekat Wujudiyah yang telah lebih dahulu disebarkan Tuanku Canking yang berkedianan di Nagari Cangking yang terletak di kaki Gunung Merapi. Ajaran tarekat ini diterimanya dari Syekh Hamzah Fansuri yang juga dari Barus.

48 Lihat Gazalba, "Konflik dan Penyesuaian antara Adat, Agama, dan Pengaruh Barat", dalam *Seminar Islam di Minangkabau*, 1966 di Padang, hlm. 6-7.

49 Syekh Abdurrauf juga disebut Syekh Abdurrauf Fansuri. Fansur menurut beberapa orang berasal dari nama desa *Pancur*, yang artinya pancuran di dekat Oleulheu, Banda Aceh. Akan tetapi orang lain berpendapat Desa Pancur yang dimaksud ialah yang terletak antara Singkil dan Barus. Hamka mengupas panjang lebar asal-usul Fansuri, yang dikatakannya berasal dari bahasa Minangkabau *banuh* lawan kata *atas* (*ateh*) menurut pemahaman ekologi. Kata *banuh* berubah menjadi *barus* bila ditulis orang Belanda. Sedangkan orang Arab mengejanya menjadi *Fansur*. Tidak ubahnya dengan kata *kapur* menjadi *kamfura* dalam bahasa Arab, menjadi *kamfer* dalam bahasa Belanda, dan menjadi *kamper* dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan *kapur barus*. Hamka juga mengutip syair karya Hamzah Fansuri yang mengaku bahwa ia orang Melayu berasal dari Barus. Pendapat Hamka ini didukung oleh Dada Meuraxa, putra Barus. Dengan ulasannya itu, Hamka hendak menyatakan bahwa Abdurrauf ataupun Hamzah Fansuri berasal dari Minangkabau. (Lihat Hamka, *op. cit.* hlm. 186-196). Menurut wilayah pemerintahan sekarang, Barus termasuk daerah Aceh. Akan tetapi, menurut sejarahnya yang lebih tua, sejak Aditiawarman, Barus termasuk wilayah Minangkabau. Dalam perjalanan sejarah yang panjang, kontak antara Aceh dan Minangkabau telah menyebabkan pembauran penduduk antara kedua suku bangsa itu. Jika dilihat dari perwatakan orang Minangkabau yang lebih suka menjadi pengikut atau belajar dari suku bangsanya sendiri, terutama dalam pengajaran Islam, seperti yang terlihat dalam sejarah hingga kini bahwa tidak seorang pun tercatat mubalig atau ulama asing yang pernah hidup dan menetap di Minangkabau, apalagi mempunyai murid, maka sangat mungkin bahwa Abdurrauf dan Hamzah Fansuri itu berasal dari suku bangsa Minangkabau. Jika sekiranya Hamzah Fansuri itu orang Aceh, tentulah ia tidak mengatakan dirinya orang Melayu dalam syair-syairnya.

Rupanya semangat pengembangan agama Islam orang Minangkabau pada abad ke-17 itu sangat tinggi. Mereka bukan hanya pergi menuntut ilmu ke luar negeri, tetapi juga menyebarkan ilmu dan agamanya ke negeri yang lebih jauh di seberang lautan. Demikianlah tercatat beberapa ulama Islam Minangkabau telah datang ke Sulawesi Selatan untuk melakukan misinya. Bahkan seorang yang bernama Khatib Tunggal, yang kemudian terkenal dengan nama Dato Ri Bandang, adalah salah seorang yang paling terkemuka karena mengislamkan raja Goa, kemudian menjadi anggota kerabat istana.

Zaman Paderi

Ajaran tasawuf yang dianut kaum sufi aliran Wujudiyah di Cangking dan aliran Syatariah di Ulakan, yang terutama mengajarkan kesucian batin umat dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu suluk dan zikir, tampaknya tidak berhasil menjadikan orang Minangkabau berjaya seperti masa silamnya meski secara sendiri-sendiri mereka telah berhasil mengembangkan Islam ke seberang lautan.⁵⁰ Ulama dalam pemerintahan di pusat Kerajaan Pagaruyung tampaknya hanyalah sebagai alat kekuasaan pemerintah selama dua abad. Raja meletakkan seorang pimpinan kerohanian Islam dengan gelar Raja Ibadat di Sumpur Kudus yang statusnya sama tingginya dengan Raja Adat di Buo dan bersama-sama dengan Raja Pagaruyung disebut Raja Tiga Sila. Se-

50 Tarekat Syatariah ini sampai kini masih banyak penganutnya. Mereka selalu berziarah ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan pada bulan Safar. Ziarah ke Ulakan ini dinamakan *basapa* yang artinya bersafar. Upacara *basapa* ini dilakukan pada setiap hari Rabu setelah tanggal 10 bulan Safar setiap tahun. Tanggal dan hari yang dijadikan patokan ialah hari dan tanggal Syekh Burhanuddin meninggal yang jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Safar tahun 1111 H. Ziarah ke makam syekh itu tidaklah demikian tepat bila dikatakan sebagai upacara pemujaan kepadanya. Upacara yang dilakukan jemaahnya tidak bersifat pemujaan sebagaimana yang dilakukan umat Islam pada waktu Maulud yang bersifat pemujaan terhadap Nabi Muhammad. Secara berkelompok di bawah pimpinan imam desa masing-masing, para jemaah melakukan tahlil dan membaca Quran, terutama pada malam hari. Tidak ada upacara massal yang dipimpin oleh seorang imam. Dulu pengikut Syekh Burhanuddin ini percaya bahwa setelah melakukan *basapa* sampai tujuh kali berturut-turut tanpa putus sama nilainya dengan sekali ke Mekah menunaikan rukun Islam kelima. Mungkin upacara *basapa* itu dilakukan untuk menyatukan atau mencari tempat perlindungan lahir dan batin jemaah pada zaman kemelut yang selalu melanda wilayah Minangkabau masa itu. Mungkin juga upacara itu dipengaruhi kepercayaan bangsa Arab yang memandang bulan Safar sebagai bulan yang mengandung mara bahaya, bulan nahas, sehingga pada setiap hari Rabu pada akhir bulan Safar orang melakukan penyucian diri dengan keramas. Pada masa lalu, kepercayaan itu dianut juga oleh penduduk sebelah utara Bengkulu, yaitu dengan melakukan mandi suci ke laut. (Lihat juga Sutan Moh. Zein, *Kamus Modern Bahasa Indonesia* di bawah kata *Rabu* dan *Safar*). Banyak pengamat lainnya mencampuradukkan upacara *basapa* itu dengan kepercayaan Syiah yang selalu memperingati mala petaka yang menimpa turunan Nabi Muhammad, Husein, yang terbunuh di Perang Kerbala pada bulan Safar. Terutama pula pada setiap bulan Safar penduduk di sekitar Ulakan, khususnya Pariaman, membiasa-

dangkan dalam kepemimpinan nagari, para ulama didudukkan sebagai anggota Orang nan Empat.⁵¹

Beberapa ulama pengikut Tuanku Tuo dari Nagari Cangking yang menganut ajaran tarekat Wujudiyah, seperti Tuanku Mansiangan, Tuanku Lintau, dan Tuanku nan Renceh⁵² yang kemudian terkenal sebagai pendiri gerakan Paderi,⁵³ ingin sekali melakukan pembersihan umat Islam yang terbenam dalam kehidupan duniawi yang rusak. Namun, mereka belum menemukan cara pembersihan yang tepat selain dengan cara memberikan dakwah. Barulah ketika tahun 1803, setelah tiga orang haji pulang dari Mekah, seperti Haji Sumanik, Haji Miskin, dan Haji Piobang, mereka memperoleh gagasan yang tepat untuk melakukan tindakan pembersihan. Dari ketiga haji yang baru kembali itu, terutama dari Haji Miskin yang berkediaman di Pandai Sikat,

kan pula melakukan peringatan atas kematian Hasan dan Husein dengan mengadakan perarakan *Tabut*. (Lihat juga bab *Permainan Rakyat*). Perkembangan ajaran mistik dan tasawuf tidak terlepas dari akibat kondisi dan situasi masyarakatnya. Demikianlah munculnya ajaran Asyary, yang mengajarkan upaya pelarutan hidup manusia kepada Allah, dan ajaran Gazali, yang lebih memusatkan ajarannya kepada kesucian batin, adalah karena pada masa kelahiran kedua ajaran itu dunia Islam tengah dalam kekalutan dan kekacauan yang tidak terkendalikan lagi. Semua orang pasrah kepada keadaan dan satu-satunya cara menenangkan diri ialah dengan melarutkan diri kepada Allah. Menurut ajaran tasawuf, dunia akan tenteram apabila setiap umat bersih batinnya. Kondisi dan situasi Minangkabau pada masa ajaran itu berkembang, sama dengan keadaan pada masa ajaran itu lahir di tempat asalnya. Ajaran itu hidup subur juga karena dorongan penguasa. Berkembangnya ajaran itu akan dapat memantapkan posisi kekuasaannya karena setiap warga lebih mementingkan pendekatan diri pada Allah dan kesucian batin daripada berjuang untuk memperbaiki keadaan yang buruk akibat ulah penguasa. Syed Ameer Ali mengutip pendapat sarjana Barat yang mengatakan bahwa jika Asyary atau Gazali tidak lahir, maka pastilah orang Arab (baca Islam, pen.) menjadi bangsa yang melahirkan Galileo dan Newton. (Lihat Syed Ameer Ali, *Api Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978, hlm. 663-692).

51 Perihal pengertian *Orang nan Empat*, lihat juga bab *Undang-undang dan Hukum* dan bab *Penghulu*.

52 *Tuanku* gelar tradisional yang diberikan kepada ulama. Oleh karena menyebut nama orang yang dihormati adalah pantang dan pada umumnya pada satu nagari hanya didapati seorang ulama, maka panggilan untuk mereka dipakailah gelar dan nama nagarinya, seperti Tuanku Lintau, Tuanku Ulakan, dan Tuanku Cangking. Akan tetapi, kalau terdapat lebih dari seorang ulama, gelar *tuanku* ditambah dengan sifat fisiknya. Kalau ia lebih tua disebut nama *Tuanku nan Renceh*, *Tuanku nan Gapuak*, dan sebagainya. Ulama yang dalam ilmunya lazim dipanggil dengan *inyik*, seperti *Inyik Danau*, *Inyik Rasul*, *Inyik deer* (Dr) bagi H.A. Karim Amrullah, *Inyik Parabek*, *Inyik Candung*, dan *Inyik Jambek*. (Lihat juga Hamka, *Ayahku*, Djakarta, Djayamurni, 1967, hlm. 43). Lazim juga bagi ulama yang belajar agama Islam di Mekah dipanggil dengan panggilan *syekh* dan untuk lebih memuliakan disebut *tuanku syekh*.

53 Penulis asing umumnya berpendapat bahwa kata *Paderi* berasal dari bahasa Spanyol *padre*, artinya *bapak*, yang lazim digunakan untuk pastor katolik. Penamaan ulama Katolik untuk

mereka memperoleh kisah bagaimana kaum Wahabi melakukan pembersihan setelah menguasai Mekah dari kekuasaan dinasti Khalifah Usmaniyah dari Turki. Tindakan keras yang dilancarkan kaum Wahabi di Mekah itu menimbulkan gagasan bagi para tuanku yang telah gelisah melihat kemerosotan kehidupan umat Islam itu.⁵⁴ Oleh sambutan yang hangat dari para ulama, seperti Tuanku Mansiangan, Tuanku nan Renceh, dan Tuanku Pasaman yang kemudian dikenal pula sebagai Tuanku Lintau, kampanye Haji Miskin di nagarinya, Pandai Sikat, mendapat perlawanan dari para pengikut ulama yang merasa ajaran dan kedudukannya sudah mulai terdesak. Ulama yang menentang ini rupanya mendapat dukungan dari kaum penghulu, karena bagaimanapun ajaran yang disampaikan Haji Miskin itu sekaligus akan merombak sendi-sendi ajaran adat Minangkabau. Akibat pertentangan yang kian mendalam ini, balairung di Pandai Sikat terbakar. Haji Miskin, yang merasa dirinya tidak aman lagi, lalu menyingkir ke nagari pengikutnya, Tuanku Mansiangan di Koto Lawas. Sedangkan seorang tokoh yang paling radikal, Tuanku nan

ulama Islam tentu saja tidak logis. Mungkin karena itulah, penulis Indonesia lebih suka mengatakan bahwa asal kata *paderi* dari Pidie, nama tempat di Aceh, yang kadang-kadang juga disebut *Pidir*. Tempat itu dikatakan sebagai tempat pemukiman sementara para calon haji yang menunggu kapal ke Mekah dan juga tempat pemukiman sementara haji yang baru datang dari Mekah yang akan kembali ke kampung halaman masing-masing. Sebagai tempat pemukiman sementara, bisa saja tempat itu menjadi pusat komunikasi tentang dunia Islam. Dari nama Pidie atau Pidir itulah para ulama muda di Minangkabau menamai gerakan solidaritas mereka, yang kemudian menjelma menjadi *Pidari* menurut lafal orang Minangkabau.

- 54 Kaum Wahabi ialah segolongan umat Islam yang menganut ajaran Muhammad bin Abdah Wahhab (1703-1777) yang bermazhab Hambali. Dalam beberapa hal, ajarannya bertentangan dengan pendapat ulama lainnya. Misalnya, Wahabi menolak pelbagai kebiasaan yang disahkan *ijma*, yakni persetujuan para ulama tentang kesahan suatu hukum. *Ijma* itu misalnya mengenai ajaran pemakaian perantara atau syafaat orang-orang yang dianggap wali atau keramat dalam komunikasi umat dengan Allah. Pendiri Wahabi berhubungan erat dengan raja Ibn Sa'ud yang menguasai seluruh Semenanjung Arab pada abad ke-18. Akan tetapi, setelah Raja Ibn Sa'ud meninggal pada tahun 1814, maka Muhammad Ali, yang menjadi raja bawahan Khalifah Usmaniyah di Mesir, menaklukkan kembali Semenanjung Arab. Namun, pada tahun 1921 turunan Raja Ibn Sa'ud itu bangkit kembali dan menjadikan Riad sebagai pusat kekuasaan. Dari Riad mereka meluaskan pengaruhnya dengan menaklukkan kembali seluruh Semenanjung Arab itu hingga sekarang. Oleh karena kekerasan yang dilancarkan kaum paderi di Minangkabau bersamaan dengan penguasaan Mekah oleh kaum Wahabi, maka banyak orang menduga bahwa paderi adalah penganut paham Wahabi pula. Para peneliti Barat, seperti B.J.O. Schrieke, tidak melihat adanya persamaan antara ajaran Wahabi dan Paderi, serta tidak melihat adanya bukti yang menunjukkan bahwa gerakan Paderi telah melakukan kampanye anti pemujaan orang-orang keramat dan mengingkari *ijma* atau konsensus para ulama. Pengaruh yang diberikan kaum Wahabi bukan hanya semata-mata kepada gerakan Paderi, malahan kepada dunia Islam umumnya. Gerakan itu dipandang sebagai awal kebangkitan Islam modern dalam menentang penjajahan asing baik terhadap kejiwaan umat maupun politik. (Lihat L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, Jakarta).

Renceh dari nagari Kamang, segera membentuk semacam dewan yang terdiri dari delapan orang tuanku. Dewan ini terkenal dengan julukan "Harimau nan Salapan", yang anggotanya terdiri dari: Tuanku nan Renceh dari Kamang, Tuanku Lubuk Aur dari Candung, Tuanku Barapi dari Pasir, Tuanku Biaro, Tuanku Kapau, Tuanku Padang Luar, Tuanku Ladang Lawas, dan Tuanku Galung⁵⁵ Tuanku Mansiangan kemudian diminta menjadi pemimpinnya. Dalam melakukan kampanye pembersihan ajaran Islam, Tuanku nan Renceh malah sampai menghukum mati salah seorang *mandeh*-nya, seorang perempuan kerabat ibunya sendiri. Guru Tuanku nan Renceh, yakni Tuanku nan Tuo di Cangking, yang menentang cara kekerasan yang dilancarkan bekas muridnya, juga mendapat giliran tindakan bekas muridnya sendiri. Suraunya dibakar sampai jadi abu. Tidak lama kemudian, ia sendiri meninggal dunia karena sedih dan usia yang telah lanjut. Tidak sampai setahun, gerakan Paderi telah menguasai seluruh Agam, malah merembes sampai ke Pasaman. Namun, seorang pengikut Tuanku nan Renceh, Datuk Bandaro, mendapat perlawanan keras di Nagari Alahan Panjang, sehingga ia menyingkir ke Nagari Bonjol, yang gerakan Paderinya dipimpin Peto Syarif, yang kemudian terkenal dengan Tuanku Imam Bonjol.

Di Luhak Tanah Datar, yang menjadi pusat Kerajaan Pagaruyung, pengembangan ajaran Paderi banyak mendapat perlawanan yang keras, sehingga perang terbuka sering terjadi. Perang yang tersengit terjadi di nagari Tanjung Barulak yang mengakibatkan tiga kali pergantian kekuasaan. Namun, ada usaha Tuanku Lintau yang menjadi pemimpin Paderi untuk melakukan perundingan perdamaian dengan pihak Kerajaan Pagaruyung. Mungkin, karena hubungan Pagaruyung dengan pihak Belanda telah terputus, kedudukan Belanda di Padang telah digantikan Inggris akibat perang mereka di Eropa, ajakan Tuanku Lintau diterima pihak Pagaruyung. Perundingan dilakukan di suatu lapangan di nagari Kototengah. Selagi perundingan itu dilakukan, pasukan Paderi di bawah pimpinan Tuanku Lelo datang menyerbu dan membunuh seluruh perutusan Pagaruyung. Di antara yang terbunuh ialah anggota Basa Empat Balai. Oleh karena keselamatannya terancam, Sultan Muning Alamsyah menghindari bersama seorang cucu perempuannya ke selatan, ke Sinjunjung. Sedangkan Sutan Alam Bagagarsyah mencari bantuan Inggris yang berkedudukan di Padang.

Inggris memasuki pedalaman, dengan membangun markasnya di Padang Simawang, tanpa mendapati kontak senjata dengan Paderi. Dari sana Inggris mengundang raja Pagaruyung. Yang datang ialah Tuan Gadis, istri raja Paga-

55 Sumber yang berbeda seringkali menyampaikan nama-nama keanggotaan Harimau nan Salapan yang berbeda pula. Umpamanya, antara makalah Asmaniar Z. Idris dalam *Seminar Islam di Minangkabau* dan tulisan Hamka dalam *Ayahku*.

ruyung. Kehadiran Tuan Gadis di Simawang tampaknya tidak dihalangi oleh Paderi yang sesungguhnya telah berkuasa di Pagaruyung. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Paderi di Minangkabau tidaklah mengubah sistem pemerintahan. Mungkin yang telah berubah ialah personalia para penghulu yang telah meninggal dan atau yang telah menyingkir ke Padang. Gerakan Paderi bukanlah gerakan yang menentang adat dan Kerajaan Pagaruyung. Gerakan itu rupa-rupanya merupakan gerakan solidaritas para ulama dalam usaha membersihkan umat Islam dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama.⁵⁶

Perang Paderi

Perang Paderi merupakan bagian penaklukan seluruh Indonesia oleh Belanda. Penaklukan Minangkabau sesungguhnya telah mereka mulai sejak abad ke-17 ketika mereka melakukan kontak dagang yang berlanjut dengan taktik mengadu-domba kekuatan penduduk setempat. Dengan organisasi yang rapi dan taktik yang jitu, secara berangsur Belanda berhasil menginjakkan kakinya ke bumi Minangkabau setapak demi setapak. Dua kali mereka terpaksa menyerahkan kubu-kubunya di Minangkabau kepada Inggris, yakni pada tahun 1781 sampai dengan 1785 dan tahun 1795 sampai dengan tahun 1819, karena kalah menghadapi Inggris.

Selama Belanda meninggalkan Minangkabau, Minangkabau praktis sudah dikuasai kaum Paderi, kecuali Padang yang diduduki Inggris. Di Padang itulah berkumpul semua orang yang memusuhi Paderi, seperti para penghulu dan kerabat Kerajaan Pagaruyung. Ketika Belanda menerima Padang kembali dari Inggris, para penghulu dan kerabat Kerajaan Pagaruyung yang lari ke Padang beramai-ramai meminta bantuan Belanda untuk mengalahkan Paderi dari nagarnya masing-masing.

Sambil mengulur waktu untuk menghimpunkan kekuatannya kembali, Belanda melakukan perundingan dengan penghulu "pelarian" itu dengan sasaran penyerahan Minangkabau kepadanya. Perjanjian itu baru dapat disepakati pada awal tahun 1821. Isinya, para penghulu menyerahkan kekuasaan kepada Belanda dan Belanda berjanji akan membantu para penghulu "pelarian" memulihkan kedudukan mereka kembali. Belanda segera mengirimkan pasukannya menduduki tempat yang paling strategis di Padang Simawang.

Dari Padang Simawang itulah Belanda melancarkan serangan-serangannya dengan bantuan pengikut kaum penghulu. Sebagai langkah pengamanan posisi, yang pertama mereka serang ialah Silit Air. Berikutnya mereka menyerang nagari Gunung dan Simabur, tetapi mereka gagal menguasainya. Kemudian setelah memperoleh tambahan kekuatan dari Batavia, mulailah Belanda me-

56 Lihat B.J.O. Schrieke *op. cit.* hlm. 15-20.

lakukan penyerbuan-penyerbuan untuk penaklukan. Yang mula-mula diserbunya ialah Pagaruyung pada awal tahun 1822, lalu didirikannya benteng yang dinamai Fort van der Capellen di dekat Batusangkar. Dari sana Belanda menyerang kedudukan Tuanku Lintau di Lintau, tetapi serangan itu dapat dipatahkan Paderi. Belanda lalu mencoba mengisolasi Lintau dengan menduduki berbagai tempat strategis, seraya menghimpunkan kekuatan baru di benteng yang baru didirikannya di Batusangkar.

Pada pertengahan tahun 1922 Belanda mencoba menyerang kubu Tuanku Mansiangan di Pandai Sikat dan Koto Lawas di Luhak Agam. Belanda berhasil menawan Tuanku Mansiangan. Dari sana Belanda menyerang nagari Kapau dan Tilatang, nagari yang jadi kubu terdepan Nagari Kamang, tempat kedudukan Tuanku nan Renceh. Dengan banyak korban, Belanda tidak berhasil menguasai nagari itu. Setelah melakukan konsolidasi, Paderi lalu melancarkan serangan balasan ke lereng Gunung Merapi, wilayah Agam. Tuanku Mansiangan yang ditawan dapat membebaskan dirinya, lalu memimpin kembali pasukannya.

Aktivitas Belanda terhenti berbulan-bulan sampai kedatangan bala bantuan dari Batavia pada awal triwulan kedua tahun 1823. Belanda menyerang Bukit Marapalam yang strategis di perbatasan Luhak Lima Puluh dengan Luhak Tanah Datar. Pasukan Belanda dapat dikalahkan, tetapi konon Tuanku nan Renceh akhirnya meninggal akibat luka dalam pertempuran yang berlangsung selama tiga hari tiga malam secara terus-menerus itu.

Tuanku Mansiangan mengerahkan pasukannya untuk merebut Pariaman guna memperoleh hubungan ke laut, tetapi Belanda mengetahuinya. Pandai Sikat diserang Belanda lagi, tetapi serangan Belanda ini dapat dipatahkan. Pasukan Belanda yang telah melakukan serangan di kaki Gunung Merapi, lalu digerakkan membantu penyerangan ke Pandai Sikat lagi. Serangan itu pun masih dapat dipatahkan Paderi.

Pada awal tahun 1824 Belanda membuat perjanjian perdamaian dengan kaum Paderi Alahan Panjang di perbatasan Agam dengan Pasaman. Setelah ancaman dari sebelah utara itu bebas, Belanda sekali lagi mencoba menyerang Pandai Sikat. Kali ini usaha Belanda berhasil. Setelah itu, Belanda menghentikan penyerangannya. Pemusatan pasukannya terutama diarahkannya untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro di Jawa.

Setelah Diponegoro dapat ditawan pada tahun 1830, maka Belanda pun mulai aktif lagi melakukan penaklukan atas Minangkabau. Mereka memakai taktik lain, yakni melakukan berbagai perundingan dengan nagari yang hendak dilaluinya. Dengan taktik demikian, kekuatan Paderi dapat diperlemah sehingga satu demi satu kubu pertahanan Paderi terkuat, seperti Marapalam, dan Katiagan, jatuh berturut-turut pada akhir tahun 1831. Pada bulan April tahun berikutnya, Lintau pun dapat mereka taklukkan, pada waktu itu Tuan-

ku Lintau telah meninggal karena usianya sudah lanjut.

Selanjutnya Kamang pun jatuh ke tangan Belanda. Menyusul nagari Matur dan Sungai Puar jatuh setelah terjadi pertempuran sengit. Dengan jatuhnya nagari-nagari itu, kedudukan Bonjol pun terancam. Belanda lalu mengirimkan ultimatum agar Bonjol menyerah. Pimpinan Paderi terpecah dua dalam menanggapi ancaman Belanda. Namun, akhirnya Bonjol pun menyerah. Dari Bonjol Belanda tidak terhalang lagi dalam menaklukkan seluruh Pasaman. Berikutnya seluruh Luhak Lima Puluh dapat ditaklukkan. Pada akhir tahun 1832 itu, selain Luhak Kubung Tiga Belas, seluruh Minangkabau telah dapat dikalahkan Belanda secara militer.

Secara diam-diam di seluruh Minangkabau telah terjadi konsolidasi paham antara para pemimpin suku bangsa Minangkabau pada umumnya setelah melihat praktek pendudukan kaum militer Belanda, terutama pelanggaran terhadap kesucian agama mereka, seperti menggunakan masjid sebagai asrama, dan memperkosa para wanita. Secara diam-diam mereka melakukan pertemuan rahasia di kaki Gunung Tandikat untuk melakukan serangan serentak di seluruh Minangkabau.

Serangan itu dilancarkan pada tanggal 11 Januari 1833 terhadap pos dan asrama militer Belanda di Bonjol, Simawang Gadang, Tarantang Gadang, Lubuk Ambalau, dan Rao di wilayah Pasaman. Dalam serangan itu hampir 150 orang militer Belanda terbunuh. Komandan Belanda yang sedang berada di Sipisang, yang terletak antara Bonjol dan Palembayan, pun mendapat serangan sehingga ia terpaksa masuk hutan keluar hutan dan kembali ke Bukittinggi. Dalam pelariannya itu, 71 orang pasukannya terbunuh.

Aksi serentak di Luhak Agam dan Tanah Datar tidak dapat dilakukan, karena rahasianya bocor. Sentot Ali Basyah, panglima Perang Diponegoro yang berpihak kepada Belanda yang lalu dikirim ke Minangkabau untuk mengalahkan Paderi, dituduh terlibat dalam gerakan Tandikat itu. Ia dikembalikan ke Batavia. Sutan Alam Bagagarsyah, regent Tanah Datar ditangkap dengan tuduhan yang sama, lalu dibuang ke Batavia.⁵⁷ Beberapa pemuka masyarakat lainnya, yang selama ini telah membantu Belanda, malah dipenggal kepalanya.

57 Rupa-rupanya penangkapan atas Sutan Bagagar Alamsyah oleh pihak Belanda dengan tuduhan ikut serta dalam Perjanjian Tandikat bersama Sentot Alibasya dan kaum Paderi berdasarkan fitnah yang diterima Elout, penguasa Belanda di Padang. Kebetulan Elout sendiri sedang mencari "kambing hitam" untuk melepaskan sakit hati dan rasa malunya berhubung terjadinya gerakan perlawanan serentak yang dilancarkan Paderi hingga banyak menjatuhkan korban di pihak Belanda, sedangkan ia telah membuat laporan ke Batavia bahwa situasi betul-betul mantap. Seorang pejabat tinggi Belanda di Jakarta, De Stuers, yang diserahi memeriksa dan menyelidiki kasus itu, tidak melihat Sutan Bagagar Alamsyah dan Sentot Alibasya ikut Paderi melakukan gerakan Perjanjian Tandikat itu. Dalam laporannya

Namun, pada pertengahan tahun itu Buo, Tambangan, dan Guguk Sigandang di Luhak Tanah Datar bangkit melakukan serangan terhadap Belanda. Kebangkitan itu merembes pula ke Luhak Agam. Pos pasukan Belanda di Kamang dan asramanya di Bukittinggi diserang secara serentak. Atas peristiwa itu, Belanda menggantung 15 orang penghulu dan pemimpin Paderi yang telah mereka tawan, di antaranya Tuanku Mansiangun yang telah tua itu.

Akibat serangan yang beruntun itu, Belanda mengubah siasatnya. Wilayah Alahan Panjang yang sulit teritorialnya itu mereka lepaskan. Di luhak lainnya mereka umumkan suatu maklumat yang disebut "plakat panjang", yang isinya menyatakan bahwa Belanda tidak akan mencampuri urusan penduduk, para penghulu yang diangkat Belanda akan diberi gaji, dan sebagainya. Siasat ini tampak berhasil di ketiga luhak yang telah dikuasanya itu, sehingga Belanda dapat mengkonsolidasi kekuatannya untuk secara bertahap mengepung Bonjol di Alahan Panjang. Sebaliknya, kesempatan itu digunakan Paderi pula untuk memperbaiki kubunya dan menghimpunkan kekuatannya di seluruh Alahan Panjang.

Pada pertengahan tahun 1834 Belanda yang telah merasa cukup kuat melakukan aksi pertamanya dengan menyerang Pantar dan Matur dengan cara mendadak di tengah malam. Gerakan Belanda terus merembes ke barat dengan menduduki Andalas dan kemudian Sungai Puar dan selanjutnya Sipisang. Akan tetapi, di Sipisang pasukan Belanda dapat dihalau Paderi. Belanda lalu membelokkan arah serangannya ke Bonjol melalui Matur di sektor barat, melalui Luhak Lima Puluh Kota di sektor timur, dan dari Tapanuli di sektor utara. Serangan Belanda ke arah Bonjol dimulainya pada tanggal 21 April 1835. Setelah dua bulan melakukan serangan, Belanda telah kian dekat ke Bonjol, tetapi gerakannya kian lamban karena perlawanan dari pihak Paderi kian sengit juga.

Pasukan Paderi tidak hanya bertahan. Mereka pun melakukan serangan pada kedudukan Belanda di seberang Sungai Alahan Panjang. Pertempuran berkecamuk selama lima hari lima malam sehingga Belanda kehilangan 100 orang tentaranya. Akibat serangan itu, Belanda menanggukkan serangannya sambil menghimpunkan tenaga bantuan yang jumlahnya sampai 14.000 orang.

Barulah pada akhir tahun 1836 Belanda melakukan serbuan sekali lagi secara serentak ke benteng Paderi dengan memuntahkan peluru meriam tanpa

De Stuers mengatakan antara lain: "Tidak masuk akal seorang yang telah menyerahkan negerinya kepada Belanda, seorang yang paling membenci semua yang berbau Paderi, akan mengkhianati kita (maksudnya Belanda, pen.) dengan bersekongkol dengan Paderi dari Lintau dan Bonjol. Siapa pun yang percaya pada tuduhan ini, saya peringatkan bahwa kasus ini memberikan nama yang sangat buruk bagi kita, karena memang nasib rakyat yang dijajah itu untuk selalu dikhianati akhirnya..." (Lihat juga, Rusli Amran, *op. cit.* hlm. 551-568).

putus-putusnya. Pada dinihari tanggal 3 Desember 1836, sepasukan Belanda berhasil menyusup ke benteng Paderi dengan tujuan membunuh Tuanku Imam Bonjol. Mereka berhasil memasuki rumah Tuanku Imam, tetapi Tuanku Imam tidak di sana. Yang mereka temui hanyalah perempuan-perempuan. Seorang anak laki-laki, putra bungsu Tuanku Imam, mereka bunuh. Tuanku Imam yang tidur di rumah lain datang membela keluarganya. Perkelahian pun terjadi. Pasukan Belanda lari meninggalkan rumah itu, tetapi Tuanku Imam luka parah dengan tujuh belas lukanya. Gagal membunuh Tuanku Imam, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Pasukan terdepan mendapat hadangan Paderi secara mendadak sehingga tertegun serangannya. Pasukan Belanda yang di belakang menembak dengan meriam, sehingga pasukannya yang tidak bisa maju itu menjadi sasaran. Peristiwa itu menimbulkan sikap frustrasi di pihak Belanda. Bahkan timbul kekhawatiran di kalangan pemerintah Belanda sendiri bahwa andaikata peperangan itu berlarut-larut akan dapat menimbulkan guncangan di kalangan penduduk Minangkabau lainnya. Panglima tentara Hindia Belanda datang dari Batavia untuk meninjau situasi dengan matanya sendiri menjelang pertengahan tahun 1837.

Kemudian setelah menembaki benteng Bonjol di Bukit Tajadi dengan meriam selama tiga bulan penuh, barulah tentara Belanda dapat merebut benteng itu pada tanggal 16 Agustus 1837. Akan tetapi mereka tidak dapat menawan Tuanku Imam Bonjol. Ia, yang telah terluka parah pada perkelahian beberapa bulan yang lalu, dalam usia yang telah mencapai 64 tahun, akhirnya ditangkap lawannya pada tanggal 28 Oktober 1837 setelah kena bujuk untuk melakukan perundingan. Kemudian ia diasingkan di Cianjur, lalu ke Ambon, dan akhirnya meninggal dunia di Manado tanggal 6 November 1864.

Walaupun Tuanku Imam telah ditangkap, perlawanan Paderi belum lenyap. Tuanku Tambusai yang berbenteng di Dalu-Dalu masih bertahan sampai akhir tahun 1838. Ia dapat menyingkir ke Sumatera Timur setelah benteng Dalu-Dalu jatuh. Konon ia terus menyeberang ke Malaysia.⁵⁸

Selesai menghadapi Paderi di Bonjol, Belanda memutuskan gerakannya ke Kubung Tiga Belas, Kabupaten Solok sekarang. Belanda tidak mendapat perlawanan berarti dalam gerakannya itu. Dengan demikian, seluruh wilayah Minangkabau telah ditaklukkan Belanda pada akhir tahun 1838.

Meski Paderi telah dapat dikalahkan, suku bangsa Minangkabau masih melakukan perlawanan bersenjata menentang Belanda. Dimulai pada awal tahun 1841, yaitu tiga tahun setelah sisa Paderi dikalahkan di Dalu-Dalu, api perlawanan dinyalakan di Batipuh oleh Tuan Gadang yang pada waktu itu telah diangkat jadi *regent* oleh Belanda. Benteng Belanda di Padangpanjang

58 Berkenaan dengan akhir sejarah hidup Tuanku Tambusai lihat lebih lanjut buku Hamka *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"* hlm. 222-224.

diserbu, sehingga beberapa orang tentaranya meninggal. Benteng Belanda di Batusangkar, Fort van der Capellen, pun diserbu, sehingga pasukan Belanda yang mengawalnya terpaksa menyingkir. Bahkan Bukittinggi, dengan bentengnya yang terkenal Fort de Kock, mendapat serangan sehingga rumah-rumah Belanda, termasuk rumah asisten residen, sempat dirusakkan oleh penyerang. Akibat serangan rakyat, orang Belanda di Solok bersembunyi ke benteng di Muara Panas. Perlawanan itu hanya berlangsung selama sebulan. *Regent* Bati-puh, Tuan Gadang, dapat ditawan, kemudian dibuang ke Cianjur, dan meninggal di sana pada 12 Oktober 1842.

Pada tahun 1843 meletus lagi pemberontakan yang dipimpin Raja Buo, yakni kemenakan dari raja Pagaruyung yang dirajakan di negeri itu. Perlawanan Raja Buo diiringi perlawanan Raja Hitam di Sijunjung.⁵⁹

Pada akhir tahun 1844 rakyat bergolak lagi di Pauh dekat Padang, yang diiringi serbuan rakyat di beberapa tempat di hulu Batanghari dan Alahan Panjang di selatan Solok. Tahun berikutnya rakyat Koto Anau melakukan perlawanan seiring dengan perlawanan rakyat di Sungai Pagu.

Perang yang berlangsung sejak tahun 1841 sampai dengan 1845 merupakan perlawanan rakyat atas kerja paksa untuk menanam kopi yang terkenal dengan nama *cultuur stelsel*. Setengah abad kemudian, yaitu pada tahun 1905, suku bangsa Minangkabau sekali lagi melakukan pemberontakan melawan Belanda karena menentang *rodi* atau pajak, yang dapat diganti dengan kerja untuk membuat jalan. Pemberontakan itu berlangsung di beberapa tempat, seperti Manggopoh, Kamang, Pauh, Ulakan, Koto Tujuh, dan Lubuk Alung.

Meskipun setiap pemberontakan itu dapat dipadamkan, perasaan perlawanan

59 Raja Buo (Tuanku di Buo) sering juga disebut Raja Sembahyang karena ketaatannya beribadat. Meski oleh Elout ia telah ditawari menjadi *hoofd regent* (regen kepala), sebagaimana yang dijabat oleh saudara sepupunya, Sutan Alam Bagagarsyah, dengan gaji yang jauh lebih besar, ia tetap berpihak kepada Paderi dalam menentang kekuasaan Belanda. Ketika Paderi telah dikalahkan seluruhnya dan pemberontakannya yang terakhir pun tidak berhasil, ia bersembunyi di wilayah Raja Kuantan, yang merupakan saudara sepupunya. Dan karena hendak menjaga keselamatan saudaranya yang jadi raja di Kuantan itu, ia menetap di Pangkalan Kota Baru dan dari sana ia melancarkan serang-serangan ke arah kedudukan Belanda. Kemudian ia memindahkan kedudukannya ke Sumpur dan dari sinilah ia melakukan serangan frontal ke kedudukan Belanda. Barulah pada tahun 1861 ia mencoba membuat kontak dengan Belanda untuk diizinkan kembali ke kampung halamannya setelah 30 tahun bertualang melawan kekuasaan Belanda. Akan tetapi, Belanda menolak. Namun, akhirnya pada tahun 1865 permohonannya diizinkan dengan syarat asal ia mau tinggal di Padang. Akan tetapi, pada saat ia hendak berangkat, ia sadar pada dirinya lagi bahwa tidak sepantasnya ia bersenang-senang di Padang dalam usia tua, mengingat korban telah banyak yang jatuh karena pemimpinnya. Akhirnya, ia memilih tempat yang sunyi di Durian Gadang. Di sana ia mencapai usia 75 tahun dan meninggal setelah menderita kelumpuhan. Dialah satu-satunya kerabat Kerajaan Pagaruyung yang konsekuen, menentang Belanda. (Lihat juga Rusli Amran, *op. cit.* hlm. 592-599).

an atas penjajahan Belanda itu terus-menerus tertanam dalam sanubari suku bangsa Minangkabau sehingga di kala komunis sempat menghasut rakyat untuk memberontak di Silungkang pada tahun 1926, maka api peperangan pun menyala lagi.⁶⁰

Zaman Pembaruan

Sejumlah gerakan pembaruan berlangsung di Minangkabau selama masa pemerintahan Hindia Belanda seabad lamanya. Seperti gerakan Paderi, setiap gerakan pembaruan selalu bermuara ke arah gerakan politik, sehingga korban pun berjatuh dalam bentuk pembuangan. Motivasi setiap gerakan bukan hanya hasrat pembaruan dalam menerapkan kaidah agama Islam. Motivasi lain, dilihat dari sudut falsafah suku bangsa itu, terutama adalah dorongan harga diri atau dorongan untuk eksis sebagai suku bangsa dan sebagai pribadi yang sama derajatnya dengan pribadi yang lain. Demikianlah, gerakan Paderi pada mulanya yang menganut isu pembaruan dan pembersihan ajaran agama dari kebiasaan jahiliah, yang tidak lagi dapat dihalangi oleh ajaran sebelumnya, berkembang menjadi pemenuhan ambisi ulama Paderi untuk menduduki posisi yang telah diisi ulama tradisional. Namun, setelah gerakan Paderi yang berkembang menjadi gerakan politik dan militer itu dapat dikalahkan oleh gerakan militer Belanda, praktis ajaran pembaruan yang dicetuskannya tidak memberi kesan apa-apa dalam peribadatan suku bangsa Minangkabau selanjutnya.

Dekadensi ajaran tarekat Satariyah dan kegagalan Paderi menimbulkan gerakan baru pada tahun 1850, yaitu ketika Syekh Ismail yang juga dijuluki Tuanku Simabur, kembali dari Mekah dengan membawa ajaran tarekat Naksabandiyah. Gerakan pembaruan Tuanku Simabur ini segera mendapat pengikut akibat adanya ketidakpuasan orang Minangkabau terhadap ajaran Satariyah. Setelah huru-hara yang berlangsung demikian lamanya itu, ajaran Satariyah tidak dapat lagi memberikan ketenangan batin. Sekali lagi, pertentangan di antara para ulama muncul. Golongan Naksabandiyah menamakan dirinya kaum muda, sedangkan ulama Satariyah disebut sebagai ulama adat.⁶¹ Juga karena pusat gerakan kaum muda itu berada di Cangking dan yang lainnya di Ulakan, kedua aliran itu lazim pula disebut tarekat Cangking dan tarekat Ulakan.⁶² Pertentangan kedua aliran itu cukup tajam, tetapi pergolakan yang terjadi tampaknya dapat dibatasi pada penguasaan masjid. Oleh karena golongan Satariyah mendapat dukungan kaum adat, maka golongan Naksabandiyah terpaksa mendirikan masjid sendiri. Dalam masa lima puluh tahun

60 Lihat juga A. Muluk Nasution, *Pemberontakan Rakyat Silungkang*, Jakarta, Mutiara, 1981.

61 Lihat juga B.J.O. Schrieke *op. cit.* hlm. 27.

62 Lihat juga Hamka, *Ayahku*, Djakarta, Djajamurni, 1967, hlm. 24.

golongan Naksabandiyah berhasil mendesak posisi golongan Satariyah.

Dominasi golongan Naksabandiyah dipandang telah kemasukan kebiasaan yang bersifat bidah oleh Syekh Ahmad Khatib, orang Kota Gadang yang bermukim di Mekah sejak tahun 1871. Bahkan ia pun gencar menyerang hukum adat yang bertentangan dengan Islam, seperti stelsel matrilineal dan sistem warisannya. Serangan yang dilancarkan Syekh Ahmad Khatib belumlah mengguncangkan lapisan masyarakat terbawah meski telah mengguncangkan kalangan cendekiawan adat dan ulama Naksabandiyah. Akan tetapi, ketika Haji Yahya, yang juga berasal dari Simabur, pulang dari Mekah membawa ajaran Syekh Ahmad Khatib itu, timbullah guncangan di kalangan masyarakat banyak. Hanya empat tahun Haji Yahya sempat mengembangkan ajarannya karena pada tahun 1904 ia ditangkap Pemerintah Hindia Belanda lalu dibuang ke Ambon.⁶³

Serangan yang dilancarkan Syekh Ahmad Khatib di Mekah dan Haji Yahya terhadap ajaran tarekat Naksabandiyah dan adat Minangkabau telah membangunkan suatu sikap terancam akan kehadiran golongan mereka masing-masing. Bahkan serangan ini telah menimbulkan ikatan solidaritas antara kedua golongan itu, seperti yang terlihat kemudian pada awal sejarah gerakan politik di Minangkabau. Basis mereka di desa, yang persawahan menjadi sumber ekonominya, sulit tertembus pembaruan. Sebaliknya di desa miskin yang penduduknya terpaksa merantau, ide pembaruan lebih mudah diterima masyarakatnya.⁶⁴

Pembuangan Haji Yahya ke Ambon tidaklah menghentikan gerakan pembaruan. Pada tahun berikutnya, tiga orang ulama terkemuka, yaitu Haji Abdullah Ahmad, Haji Jamil Jambek, dan Haji Karim Amrullah, kembali dari Mekah setelah memperdalam ilmu agamanya, antara lain pada Syekh Ahmad Khatib. Belajar dari pengalaman Haji Yahya, ketiganya tidak menyerang adat Minangkabau dalam kampanye gerakannya. Malahan mereka mengemukakan

63 Lihat juga B.J.O. Schrieke hlm. 30-37. Pertentangan antara kaum tua dan kaum muda bukan semata-mata masalah perbedaan ajaran yang konsekuensinya akan meruntuhkan posisi kepemimpinan saja, tetapi yang paling penting rupa-rupanya perubahan posisi itu akan mengakibatkan para ulama tua kehilangan sumber keuangan pribadi yang secara tradisional telah memberi kekayaan yang disahkan hukum agama, seperti zakat harta yang berjumlah 2,5% dari pendapatan umatnya per tahun, atau dari infak, dan sedekah. Ulama tradisional lazim pula memungut 10% harta warisan yang dipersengketakan. Lihat juga C. Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, Jakarta, Bhratara, 1973, hlm. 22-26).

64 Peta demikian masih terlihat sampai sekarang pada pengaruh gerakan politik sebagaimana yang terlihat pada hasil pemilihan umum tahun 1955 dan 1971. Tergambar bahwa peta kekuatan kaum tua yang bergabung dalam partai Islam Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) sangat dominan di nagari yang sumber hidup utamanya dari hasil pertanian. Sedangkan kaum muda yang bergabung dalam Partai Masyumi dan kemudian dalam Partai Muslimin Indonesia sangat dominan di nagari yang penduduknya banyak merantau.

suatu modus tentang harta warisan tanpa mengganggu hukum adat, yakni dengan mengemukakan lembaga hibah dan harta pencarian yang diwariskan menurut hukum Islam.⁶⁵

Gerakan pembaruan mereka yang terpenting bukanlah pembersihan upacara peribadatan Islam dari kebiasaan yang berbau syirik dan bidah, melainkan upaya peningkatan harkat ulama, agar setaraf dengan golongan kaum elite baru yang berpendidikan sekolah pemerintah Hindia Belanda, sambil menggenggam bendera pembaruan yang digagaskan Muhammad Abduh. Upaya peningkatan harkat atau harga diri ulama dan golongan Islam, selain dengan mendirikan sekolah, menurut sistem yang dicontoh dari Mesir dan sekolah pemerintah, juga dengan cara berpakaian menurut mode amtenar sebagai manifestasi kehadiran golongan mereka.⁶⁶

Pengaruh ketiga ulama ini menimbulkan prakarsa ulama lainnya yang sepaham untuk mengubah sistem pendidikan surau dan madrasah. Perubahan itu terwujud dalam Thawalib dan Diniyah, yang kadang-kadang disebutkan juga *Thawalib School* dan *Diniyah School*, yang didirikan sekitar tahun 1915. Perkembangan sekolah seperti itu kian pesat, bahkan juga diikuti golongan tua yang tergabung dalam tarekat Naksabandiyah. Malah kemudian Haji Abdullah Ahmad mendirikan sekolah Adabiyah di Padang, yang memberikan pelajaran menurut kurikulum sekolah HIS, sekolah berbahasa Belanda untuk pribumi, sebagai upaya untuk meningkatkan harkat bangsanya yang tidak

65 Lihat juga bab "Harta dan Pusaka".

66 Rasa "harga diri" yang diajarkan falsafah Minangkabau menjadi motivasi utama bagi suku bangsa itu untuk bangkit agar sederajat dengan suku bangsa lain, bahkan untuk sama setara dengan bangsa Belanda yang menjajahnya. Umpamanya, tingkah laku H.A. Karim Amrullah, yang senantiasa memakai dasi pada upacara resmi, untuk menyatakan dirinya sama dengan orang-orang yang berpangkat tinggi keluaran sekolah Belanda. Hal yang sama dilakukan juga oleh Dokter A. Rivai ketika ia menyelesaikan pelajaran di Sekolah Dokter Jawa pada tahun 1894, yang sengaja berpotret dengan pakaian gaya Belanda, dan sengaja kawin dengan perempuan-perempuan Eropa, seperti Belanda, Inggris, dan Jerman agar semua orang menghormatinya seperti menghormati orang Eropa. Demikian juga dengan H. Agus Salim yang sejak sekolah menengah selalu hendak membuktikan dirinya tidak kalah dengan murid Belanda, bahkan suatu waktu dalam sejarahnya, ia mengangkat dirinya agar sama dengan Belanda melalui hukum persamaan dengan Belanda meski ia tetap pribumi. Demikian juga halnya dengan Tan Malaka, bekas murid yang pintar di Sekolah Belanda, yang kemudian merasa dirinya dihina Tuan Kebon Belanda di Deli, lalu berbalik menjadi patriot bangsanya. Ataupun Rustam Efendi yang berusaha menjadi anggota Parlemen Belanda di Negeri Belanda sendiri. Sepintas lalu hal demikian tidak ubahnya sebagai kompleks anak jajahan terhadap tuan jajahan, seperti yang terdapat juga pada bangsa India pada awal kesadaran nasionalnya. Akan tetapi, bagi orang Minangkabau, kompleks itu adalah kompleks Minang yang dibangkitkan oleh ajaran falsafahnya. Untuk pemahaman Minang Kompleks, lihat juga tulisan Dr.M. Amir dalam *Bunga Rampai*, Medan, 1939, hlm. 183. Lihat juga A.A. Navis, *Seminar Internasional Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980, di bawah judul "Tingkah Gerakan Politik di Minangkabau".

mendapat tempat di sekolah pemerintah.

Bagaimanapun motivasi untuk meningkatkan harkat dan harga diri para ulama itu, meski tidak mendapat tempat yang formal seperti yang dapat dicapai golongan lain yang memperoleh pendidikan sekuler pada sekolah pemerintah juga mempengaruhi diri murid-murid mereka. Bahkan gerakannya menjadi lebih tinggi karena usia mudanya sehingga pada tahun 1918 mereka mendirikan organisasi bernama Sumatera Thawalib, yang kemudian menjelma menjadi gerakan politik Islam radikal di Minangkabau.

Gerakan Politik

Setiap gerakan pembaruan yang dianut kaum muda semenjak gerakan Paderi, meskipun pada mulanya ingin membersihkan ajaran Islam dari dekadensi moral yang telah membusuk, mau tidak mau menjadi gerakan politik bila alat kekuasaan pemerintah telah merasa terganggu, lebih-lebih pemerintah yang korup yang sangat berkepentingan dengan ajaran lama yang telah dekadennya. Gerakan pembaruan yang dilancarkan Tuanku Simabur dengan tarekat Naksabandiyahnya sejak tahun 1850 itu, tampaknya diberi angin oleh pemerintah Hindia Belanda karena gerakan itu tidak ditujukan kepada kekuasaannya melainkan kepada suku bangsa Minangkabau yang sesungguhnya dapat memberikan keuntungan bagi pihak penguasa. Juga karena sifat ajaran tarekat lebih mementingkan kesucian rohani daripada kehidupan duniawi. Meskipun kemudian terjadi konflik antara golongan tarekat Satariyah dan Naksabandiyah, pada dasarnya konflik itu bertolak dari perbedaan keupacaraan dalam mendekatkan diri kepada Allah yang Mahabesar.

Akan tetapi, ketika Syekh Ahmad Khatib melancarkan serangannya terhadap suatu sistem, baik ajaran Naksabandiyah, maupun adat Minangkabau, dengan sendirinya sendi-sendi kekuasaan mulai terguncang. Oleh karena itulah, ketika Haji Yahya baru saja mulai menyampaikan ajaran gurunya, ia segera ditangkap dan dibuang pemerintah. Namun, serangan yang tajam dan kadang-kadang sampai menyakitkan harga diri itu telah membangkitkan sofisme di kalangan adat, yang dibangkitkan Datuk Sutan Maharaja, yang digelar "Bapak Wartawan Melayu", dalam tulisan-tulisannya di majalah *Pelita Kecil* yang terbit di Padang pada tahun 1894. Kesadarannya sebagai seorang cendekiawan Minangkabau masa itu membuat ia sangat antidominasi asing. Ia bahkan menyerang isu yang dilontarkan koran Melayu Cina, sehubungan dengan kemenangan Jepang atas Rusia, yakni isu "Asia untuk orang Asia." Bahkan kesadarannya atas kemuliaan adat suku bangsanya yang menganut sistem demokrasi telah menghasilkan tulisan-tulisan yang menyerang bupati yang feodalistis. Namun, ia bukan tidak menyadari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Dan ia menyokongnya, selama pemerintah masih memulihkan adat Minangkabau.

Rupanya tiga serangkai haji, yang lama bermukim dan belajar pada Syekh Ahmad Khatib di Mekah, itu cukup memahami kondisi Minangkabau di kala mereka sampai di kampung masing-masing, tidak lama setelah Haji Yahya dibuang ke Ambon. Mereka sama sekali tidak menyerang adat Minangkabau dalam upaya membersihkan Islam dari perbuatan syirik dan bidah yang masih kukuh dipercayai masyarakat. Mereka bukanlah semata-mata ulama yang hanya memperhatikan hukum dan ajaran Islam. Mereka adalah cendekiawan Islam yang mendapat aspirasi pikiran-pikiran yang dilontarkan Muhammad Abdul, pemikir Islam modern yang berdiam di Mesir. Aspirasi yang mereka bawa ke Minangkabau menjadi subur karena kondisi sosial dan politik yang menguntungkan, baik di Minangkabau sendiri maupun di Jawa, terutama akibat kemenangan Jepang dalam peperangan melawan Rusia serta kebangkitan "Turki Muda" di Asia Barat.

Pada mulanya gerakan itu bersifat kelompok, tanpa organisasi, yang bangkit karena serangan-serangan Syekh Ahmad Khatib dari Mekah dan kemudian karena kemunculan Haji Yahya. Setidak-tidaknya ada tiga kelompok yang saling bertentangan keras, baik melalui khotbah maupun melalui polemik dalam majalah. Haji Abdullah Ahmad mendirikan Sarekat Usaha pada tahun 1915, yang bertujuan mencari dana untuk mendirikan Sekolah Adabiyah. Kehadiran organisasi itu, yang diduga ada hubungannya dengan Sarekat Dagang Islam yang didirikan tahun 1911 di Yogya, mendorong kelompok lainnya mendirikan organisasi masing-masing. Datuk Sutan Maharaja mendirikan Sarikat Adat Alam Minangkabau (SAAM), sedangkan Khatib Ali yang beraliran tarekat Naksabandiyah mendirikan Sarikat Islam pada tahun 1916. Di Padangpanjang mulai didirikan Sekolah Thawalib dan Diniyah sebagai wadah penyebaran ajaran kaum muda.

Dalam menghadapi gerakan kaum muda, SAAM dan SI ternyata melakukan kerja sama yang cukup erat, tetapi gerakan kaum muda nampaknya lebih berhasil karena lebih mampu menampung aspirasi pembaruan. Semenjak itu muncullah berbagai organisasi seperti Sumatera Thawalib, Persatuan Guru Agama dan Persatuan Ulama Sumatera. Dalam pada itu komunisme muncul di kalangan kaum muda karena kehadiran Tan Malaka di dalam SI Merah. Dan setelah penggerakannya di Sumatera Barat, Haji Datuk Batuah, dibuang pemerintah pada tahun 1923 dan setelah terjadinya pemberontakan rakyat Silungkang tahun 1926-1927, tampaknya semua kegiatan politik di Sumatera Barat terhenti. Kaum muda yang berapi-api semangatnya itu mengalihkan kegiatannya untuk memperdalam ilmu agama.⁶⁷

Namun, ketika Haji Abdul Karim Amrullah, yang telah dikucilkan teman-

67 Perihal tingkah laku gerakan politik di Minangkabau dalam masa awal abad ini, lihat lebih lanjut B.J.O. Schrieke *op. cit.* hlm. 41-75.

temannya, aktif membawa Muhammadiyah ke Minangkabau, kaum muda yang tergabung dalam Sumatera Thawalib merasa terdorong untuk bangkit lagi. Mereka tidak hendak memasuki Sarikat Islam yang telah menjadi partai politik. Mereka lalu mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) pada tahun 1932 yang agitasi politiknya dapat mengimbangi Sukarno dalam PNI di Jawa. Akhirnya, pimpinan Permi, seperti: Mochtar Lufti, Ilyas Yakub, Jalaludin Thaib, dan Syahbilal Rasyad ditangkapi dan dibuang ke Digul bersamaan dengan pembuangan Sukarno, Hatta, dan Syahrir. Kehadiran Muhammadiyah dan Permi membangkitkan pula kaum tua. Kaum tua dalam tarekat Naksabandiyah memperkuat dirinya dengan mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan kaum adat mendirikan lagi organisasi baru dengan nama Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM).⁶⁸ Selain yang memasuki PNI, gerakan politik cendekiawan yang berpendidikan sekolah Belanda hampir tidak berarti. Pada umumnya mereka lebih menyukai bergerak di bidang pendidikan, seperti M. Syafei dengan INS Kayutanannya yang didirikan tahun 1926.⁶⁹ Ada yang bergerak di bidang ekonomi, seperti Taher Marah Sutan dengan Persatuan Dagang Indonesia (Persdi) di Padang dan Anwar St. Saidi yang mendirikan Bank Nasional pada tahun 1930.⁷⁰

68 Organisasi ini ketika dipimpin Dt. Simarajo ikut menghadiri Kongres GAPI tahun 1940 yang bertemakan "Indonesia Berparlemen". Ia merupakan satu-satunya organisasi yang lahir dan tumbuh di Minangkabau yang menghadiri kongres itu. Setelah organisasi ini dibubarkan, karena banyak anggota pengurusnya terlibat peristiwa PRRI, maka pada tahun 1967 organisasi sejenis itu dengan nama LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) dimunculkan kembali. Kemudian organisasi ini bergabung ke dalam kekuatan politik Golongan Karya. Sedangkan peranannya sendiri dalam kegiatan politik dan kebudayaan tidaklah demikian jelas.

69 INS ialah kependekan dari *Indonesisch Nederlandsche School*. Sebagai anggota Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda, M. Syafei langsung mendirikan sekolah itu sekembalinya ke Indonesia. Sekolah itu memakai nama Indonesia dan merupakan lembaga yang pertama yang memakai nama Indonesia di Hindia Belanda pada masa itu. Ia juga mengarang sebuah lagu pujaan yang berjudul "Indonesia Subur". Tujuan sekolah itu mendidik manusia Indonesia yang merdeka, yang mampu berdiri sendiri melalui sistem aktif-kreatif sebagaimana kodrat alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Lihat lebih lanjut Mohammad Syafei, *Dasar-dasar Pendidikan*, Jakarta, CSIS, 1979.

70 Lihat juga *40 Tahun PT Bank Nasional*, Bukittinggi, 1970.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Gaffar. "Sebuah Tinjauan tentang Arsitektur Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Abdul Samad Idris, Datok. *Hubungan Minangkabau dengan Negeri Sembilan dari Segi Sejarah dan Kebudayaan*, Seremban, Pustaka Azaz Negeri, 1970.
- Alfian. "Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian", *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta, LP3ES, 1979.
- Arby Samah. *Seni Ukir Tradisional Minangkabau*, arsip Bidang Kesenian Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Asmaniar Z. Idris. "Kerajaan Minangkabau Pagaruyung" Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Bahar Dt. Nagari Basa. *Falsafah Pakaian Penghulu*, Payakumbuh, Eleonora, 1966.
- Bahar Dt. Nagari Basa. *Tambo dan Silsilah Adat Alam Minangkabau*, Payakumbuh, Eleonora, 1966.
- Bank Nasional 40 Tahun*, Bukittinggi, 1970.
- Batuah, A. Dt. dan A. Dt. Madjoindo. *Tambo Minangkabau*, Jakarta, Balai Pustaka, 1957.
- Batuah Sango, Dt. *Tambo Alam Minangkabau*, Payakumbuh, Limbago, 1954.
- Berg, C.C. *Lintasan Sejarah Majapahit, Indonesia 1952*
- Boechari. *An old-Malay Inscription of Sriwijaya at Palas Pasemah (South Lampung)*,

- Praseminar Penelitian Sriwijaya. Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Jakarta, 1979.
- Boestanol Arifin Adam. "Musik Tradisional Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batusangkar*, 1970.
- Chidir Ali. *Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1972.
- Daramin Dt. Madjo Indo nan Gadang. "Kedudukan Sungai Jambu di tengah Lembaga Adat Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batusangkar*, 1970.
- Darwas, D. Dt. Rajo Malano. *Filsafat Adat Minangkabau*, Yayasan Lembaga Studi Minangkabau.
- Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro. *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, Bukittinggi, Nusantara, 1965.
- Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Tengah. *Propinsi Sumatera Tengah*, Bukittinggi, 1955.
- Edwar Djamaris. "Tambo Minangkabau, Tinjauan Struktural", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi 1980.
- Ensiklopedia Indonesia*. Bandung — 's-Gravehage, W. Van Hoeve.
- Ensiklopedi Indonesia (I)*. Jakarta, Ichtisar Baru-Van Hoeve, 1980.
- Gazalba. "Pokok-Pokok Pikiran tentang Konflik dan Penyesuaian Antara Adat, Agama, dan Pengaruh Barat", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Gunawan, I. dan J. Banunaek. "Peranan Faktor Sosial-Budaya dalam Gangguan-Gangguan Jiwa pada Orang Minangkabau", *Djiwa*, I, 1968.
- Hamka. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Jakarta, Fa. Tekad, 1963.
- Hamka. *Ajahku*, Jakarta, Djajamurni, 1960.
- Hamka. *Antara Fakta dan Khayal 'Tuanku Rao'*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Hamka. *Sejarah Islam di Sumatera*, Medan, Pustaka Nasional, 1950.
- Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup I* Jakarta, Bulan Bintang, 1979.
- Hamka. *Tenggelamnya Kapal van der Wijck*, Bukittinggi, Nusantara, 1966.
- Hanafiah S.M, A.M. *Tinjauan Adat Minangkabau*, Jakarta, 1970.
- Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Himpunan Makalah Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Hurgronje, Snouck C. *De Atjehers*, Leiden, E.J. Brill, 1893.
- Hurgronje, Snouck C. *Islam di Hindia Belanda*, Jakarta, Bhratara, 1973.
- Ibenzani Usman. "Seni Ukir Tradisional Minangkabau dalam Konteks Adat

- Istiadat", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Iskandar Kemal. "Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies Press.
- Ismail Suny. *Bunga Rampai tentang Aceh*, Jakarta, Bhratara, 1980.
- Jahja. "Hukum Waris dan Tanah dan Praktek-Praktek Pengadilan", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies Press.
- Januir Khalifah St. Indera. "Sejarah Kerajaan Inderapura". *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Johns, A.H. *The Kaba Rantjak Dilabueh: A Specimen of Traditional Literature of Central Sumatra*, Ithaca, N.Y, Cornell University, 1958.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1971.
- Madjelis Tahkim. *Adat Contra Islam, Mosi Besar Partij Sjarikat Islam Indonesia*, 1934.
- Mahmoed, St. BA. dan A. Manan Rajo Pangulu. *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, tanpa penerbit dan tanpa tahun.
- Mahmud Junus. *Sejarah Islam di Minangkabau (Sumatra Barat)*, Jakarta, Al Hidayah, 1971.
- Mansoer, M.D., dkk. *Sedjarah Minangkabau*, Jakarta, Bhratara, 1970.
- Maruhum Batuah, A.M. Dt. dan H. Dt. Bagindo Tanameh. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta, Pustaka Aseli, 1956.
- Mattulada. "Minangkabau dalam Kebudayaan Orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Miral Manan. *Aturan Alam: Mengenal Kembali Adat Alam Minangkabau*. (stencil).
- Mochtar Naim. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies, 1968.
- Mochtar Naim. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1979.
- Moens, J.L. *Buddhisme di Jawa dan Sumatra dalam Masa Kejayaan Terakhir*, Jakarta, Bhratara, 1974.
- Moens, J.L. *Crivijaya, Yava en Kataha*, TBG LXXVII, 1937.
- Mohammad Hasbi. "Talikerabat-Talikerabat pada Kekerabatan Orang Minangkabau", Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Mohammad Said. "Sejarah Minangkabau dengan meminjam dan memper-

- gunakan Karya Penulis Asing", Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Mohammad Sjafei. *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta, CSIS, 1979.
- Mohammad Zain, St. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta, Grafica. .
- Muhammad Amir. *Bunga Rampai*, Medan, 1938.
- Muhammad Radjab. "Kesusasteraan Kaba di Minangkabau", Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batusangkar, 1970.
- Muhammad Radjab. *Perang Paderi*, Jakarta, Balai Pustaka, 1954.
- Muhammad Radjab. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang, Center for Minangkabau Studies, 1969.
- Muhammad Radjab. *Tjatatatan di Sumatera*, Jakarta, Balai Pustaka, 1949.
- Muhammad Yamin. *Atlas Sedjarah*, Jakarta, Djambatan, 1956.
- Muhammad Yamin. *Gajah Mada*, Jakarta, Balai Pustaka, 1977.
- Muhammad Yamin. *6000 Tahun Sang Saka Merah Putih*, Jakarta, Balai Pustaka, 1956.
- Muluk Nasution, A. *Pemberontakan Rakyat Silungkang, Sumatera Barat 1926-1927*, Jakarta, Mutiara, 1981.
- Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971.
- Navis, A.A. "Korelasi Agama Islam dan Adat Minangkabau dalam Pembangunan", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Islam di Minangkabau*, Padang, 1969.
- Navis, A.A. "Sastra tradisional Minangkabau", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Padang, 1970.
- Navis, A.A. "Meninjau Masalah Adat Minangkabau dalam Novel Indonesia" *Budaya Jaya*, No. 99/1976.
- Navis, A.A. "Kaba: Cerita Rakyat Minangkabau", *Pertemuan Sastrawan Nusantara III*, Kuala Lumpur, 1981.
- Navis, A.A. "Sekitar Kesenian Minangkabau Tradisional" *Pertemuan Seniman se-Sumatera Barat*, Padang, 1981.
- Navis, A.A. "Tingkah laku Gerakan Politik di Sumatra Barat" *Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Nooteboom, C. *Sumatra dan Pelayaran di Samudera Hindia*, Jakarta, Bhratara, 1972.
- Optimis*, Majalah no. 25/Februari 1982.
- Pitono Hardjowardojo, R. *Adityawarman*, Jakarta, Bhratara, 1966.
- Purbatjaraka, R. NG. *Riwayat Indonesia I*, Jajasan Pembangunan, 1952.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- Rasjid Manggis, M. Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau, Sedjarah Ringkas dan Adatnya*, Padang, Sri Dharma, 1971.

- Rusli Amran. *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*, Jakarta, Sinar Harapan, 1981.
- Sangguno Diradjo, Dt. *Tambo Alam Minangkabau*, Jakarta, Balai Pustaka, 1954.
- Sanusi Pane. *Sejarah Indonesia II*, Jakarta, Balai Pustaka, 1965.
- Schriek, B.J.O. *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*, Jakarta, Bhratara, 1973.
- Slamet Muljana. *Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi*, Jakarta, Idayu, 1981.
- Slamet Muljana. *Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya*, Jakarta, Bhratara, 1979.
- Soekmono. "Sekali Lagi tentang Lokasi Sriwijaya", *Praseminar Penelitian Sriwijaya*, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jakarta, 1979.
- Soekmono. "Tinjauan Sejarah Kuno Minangkabau Berdasarkan Peninggalan Purbakala", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Stoddard, L. *Dunia Baru Islam*, Jakarta, Pembangunan, 1979.
- Sjafnr Abu Nain, "Pakaian Adat Minangkabau", *Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Toorn, J.L. van der. *Aanteekeningen uit het Familieleven bij den Maleier in de Padangsche Bovenlanden I & II*, 1817.
- Umar Junus. "Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau: Suatu Problem", *Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau*, Bukittinggi, 1980.
- Syed Ameer Ali, *Api Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.
- Wojowasito, S. *Kamus Kawi — Indonesia*, CV. Pengarang.
- Zuber Usman. "Fungsi dan Peranan Bahasa dan Sastra Minang dalam Kebudayaan Lokal maupun Nasional", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.
- Zuber Usman. *Kesusasteraan Lama Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 1957.
- Zuber Usman. "Orang Talang Mamak", *Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau*, Batusangkar, 1970.

Indeks

A

Abbasiyah, *Dinasti* 25
Abdul, Muhammad 40, 42
Abdurrauf, Syekh 27
Aceh 22, 23, 25-7
adaik babuhua sentak 87
Aditiawarman 11, 14-6
adok 273
Agam, *luhak* 31, 33-5, 48, 105, 134
Ahmad, Haji Abdullah 39, 40, 42
Ahmadsyah, Sultan 18
aka 97
Alahan Panjang, *uagari* 31, 33, 35, 37
Alam Minangkabau 59
Alamsyah, Sultan Bagagar 20, 23
Alamsyah, Sultan Muning 20, 31
alam takambang jadi guru 59, 69, 264
Ali, Khatib 42
Alif, Maharaja 46
Alif, Raja 18
Alif, Sultan 17, 18, 26
Aluang Bunian Koto Piliang 57
Ambon 22
Amoghapasa, *arca* 11, 15, 26
Amrullah, Haji Adul Karim 39, 42
anak silek 265
Ananggawarman 16
Andalas 35
Andomo 24
Andomo di Saruaso 57
Anesecritus 4
Anggang nan Datang dari Lauik 50
angku-angku, golongan 264, 283
Anjing yang Muallim 47
arato gantuang 153
Argyre *lihat* Kota Perak
Aryadamar *lihat* Aditiawarman
Arya Wangsadiraja *lihat* Aditiawarman
As-Salib, Sultan Malik 25
Aur, Tuanku Lubuk 31
Aziz, Khalifah Umar bin Abdul 25

B

babiliak ketek babiliak gadang 71, 81
badikaa 274
Bagagarsyah, Sultan Alam 20, 31, 34
bagindo 108, 133
bajulo-julo 75
bakarano bakajadian 60, 80, 172
bak pituah urang tuo-tuo 260
balah bubuang 174
balairung 188, 189, 252, 255
Balaputra 8
Balun, Sutan 50
Bandang, Dato Ri 28
Bandaro di Sungai Tarab 57, 58
Bangkinang 3
Bank Nasional 43
bansi 279, 281
Banten 21
Banuhampu, *suku* 122, 129
Bapak Wartawan Melayu 41
Barapi, Tuanku 31
Barus 15, 24, 25, 27
Basa Empat Balai 17, 31, 57
basandiang 204
baso-basi 262
Basyah, Sentot Ali 34
batagak gadang 146
Batanghari, *sungai* 6, 10, 15, 16, 18, 37
Batangkampar, *sungai* 7, 15, 18
Batavia *lihat* Jakarta
batimbang tando 199
Batipuh, *uagari* 17, 36, 58
Batu Batikam 55, 56
Batusangkar 33, 37
Batutah, Ibnu 26
Bendahara di Kampar 58
Bendang, *suku* 129
Bjaro, Tuanku 31
Bodi Caniago 54-7, 92, 123-5, 178
Bodi Caniago, *kelarasan* 129, 144, 188
Bonjol, Tuanku Imam 31, 34, 36

buang 115
Bukittinggi 34, 35, 37
Bunda Kandung 46, 50, 51
Bungsu, Tuan lihat Aditiawarman
Buo, kerajaan 17, 19, 28, 35, 37, 57
Burhanuddin, Syekh 26, 27

C

Camin Tanuh Koto Piliang 58
Candung 31
Canking, nagari 27-9, 31, 38
Cati Bilang Pandai 46, 47, 50-2, 54, 57, 250
catur rakrian 16
cemo 112
Cianjur 36, 37
Cindur Mato 51, 249, 273, 275
Cingkuk, pulau 23
cino buto 198
Cola, kerajaan 9, 10
Cuci, suku 123
cultuur stelsel 37
Cumari Koto Piliang 58
cupak 90
cupak diisi limbago dituang 128

D

Dalima, suku 124
Dalu-dalu 36
dampeang 268
Dang Tuanku lihat Rumandung, Sutan
darmajaksa yang berdua 16
Darmasraya 10-2, 26
Datuk Bandaro 31
Datuk Batuah, Haji 42
Datuk Ketumanggungan 46, 50, 51, 54, 57,
92, 122, 175, 250
Datuk nan Sakelap Dunia 122, 123, 129, 175
Datuk Perpatih nan Sabatang 16, 26, 46, 50,
51, 54, 57, 92, 122, 175, 250
Datuk Suran Maharaja 41, 42
debus , 278, 280
Depang, Maharaja 47
deta saluak 107
Dewa Tuhan Prapatih 16
Diaz, Thomas 19
Digul 43
Diniyah Putri 282

Diniyah School 40, 42
dipatuan 18
Diponegoro, Pangeran 33, 34
dubalang 106
dusun 94

E

Enggano, pulau 21

F

Fansuri, Syekh Hamzah 27
Fort de Kock 37
Fort van der Capellen 33, 37

G

gadang 134, 143
Gadang, Tuan 36, 37
gadang bagilia 144, 145
gadang kayu gadang bahannyo 76, 82
gadang lagak 76
Gadang nan Batujuah 17, 58
Gadiah, Tuan 20
Gadis, Tuan 31, 32
gadis gadang 210
gadis gack 210
Gajah Mada 12, 14-6, 26
gajah maharam 174, 175
Gajah Tongga Koto Piliang 58
galanggang 190
Gama, Vasco da 21
gambus 282
Gandhara 5
ganti lapik 198
Goa, Raja 28
golden khersonese 4
gonteh pucuk 209
Gresik 21
Gudam, suku 123
Guguk Sigandang 35
Galung Tuanku 31
Gunung, nagari 32

H

habih adaik bakarelaan 140
Harimau Campa 47

Hariman Campa Koro Piliang 58
Hariman nan Salipan 31
Hayam Wuruk 15, 16
hereanggendang 262
Hikayat Raja-Raja Pase 26
hinggak mancakam tabang manimpu 128
hutan laleh 151

I

Ilalang 24
Ilappai 27
indang 278, 280, 282
Indragiri, kerajaan 17
Indrapura 15, 17, 18, 23
Indraswari lihat Petak Dara
INS Kayutanam 43, 282
Islam
 masuk Aceh 26
 masuk Filipina Selatan 26
 masuk Sulawesi Selatan 28
 menyebar di Sumatera Barat 26-8
Ismail, Syekh 38, 41

J

Jabadicu lihat Jawadwipa
Jakarta 18, 32-4
Jalito, Indah 50
Jambak, suku 122, 123, 129
Jambek, Haji Jamil 39
Jamilan, Puti 50
janang 253, 268
jariah manantang buliah 155
Jawadwipa 4
Jayakatwang 11
Jayanagara 11, 14, 15
Jayawisnuwardani 15
Jingga, Dara 11
Juliah, Indah 50
julo-julo 154

K

Kaba 243, 244, 251, 252, 265, 272, 273, 276
kabau haji masuk parak haji 72
kabuang batang 209
kahuripan 15

Kamang, nagari 31, 33, 5, 37
Kambing Hutani 47
Kampai, suku 130.
Kantoli lihat Kuntala, kerajaan
Kapau, nagari 33
Kapau, Tuanku 31
Katiagan 33
kato 98, 99
kuto malereang 262
kato marandah 207
kato nan ampek 230
kawin wakil 198
Kerinci 3
Kertanegara, Raja 10-2.
ketek banamo gadang bagala 132
Khaidir, Nabi 18
Khalifatullah, Sultan 18
Khatib, Syekh Ahmad 39, 41, 42
Kubuang Tigo Baleh, luhak lihat Solok, kabu-paten
Kucing Siam 47
Kuntala, kerajaan 5, 6
Kuntu, kerajaan 15, 26
kurenah kato 100
kusuik bulu ayam 72
Kuti, Pemberontakan 14
Kutianyir, suku 122, 125, 129

L

Lagundi nan Baselo 48, 50
lambang urok 209
Lamuri 25
langgam kato 101
lanjar 177, 179, 180
lareh 55, 56
lareh nan duo 55
Lawas, Tuanku Ladang 31
Lelo, Tuanku 31
Lho Semawe 25
Lima Kaum, nagari 55
Limo Puluh Koro, luhak 33-5, 48, 105
Lintau, Tuanku 29-31, 33, 34
lipek pandan 174
Lokitawarman, Sri Maharaja 24
Luar, Tuanku Padang 31
Lubuk Alung 37
Lubuk Ambalau 34
Lufti, Mochtar 43

luhak 104, 105, 229
luhak nan tiga 107, 123

M

Madagaskar 3, 24
Madrasah Irsyadunnas 282
maelo kayu 182
Maharaja Basa lihat Datuk Ketumanggungan
Mahat, kampung 7
Majapahit, kerajaan 11, 13
 ekspedisi ke Pase 26
 sistem pemerintahan 16, 17
Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minang-
 kabau (MTKAAM) 43
Makassar 22
Malaei Colon 5
Malaka, kota 21
Malaka, Tan 42
malakok 150
malam bainai 201
malawan dunia urang 62, 69, 72, 80, 82
Malayapura 10, 15
Maluku 21
mamaga 81, 82
mamak 130, 131
mamak kepala alek 253-5
mancatak tiang tua 182
Mandahiling, suku 122, 125, 129
Manggopoh 37
Mangkudum di sumanik 57
menjalang 203, 206
Mansiangan, Tuanku 29-31, 33, 35
manti 106
mantri katrini 16
marah 108, 133
Marapalam, bukit 33
marapulai 199-208, 269
Mataram, kerajaan 8
Matur, nagari 34, 35
Mauliawarmadewa lihat Aditiawarman
Mauliawarman 10, 12
Melayu, suku 122-5, 129
Merapi, gunung 26, 27, 33, 48, 104
Meurah Silu lihat As-Salib, Sultan Malik
Minang 52
Minangkabau
 adat 88-90, 179-81

 aktivis muda 42, 43
 asal usul nama 52, 53
 aspek perekonomian 149, 150, 153-6
 aspek wilayah 53, 104, 105, 151-3
 dikuasai Belanda 34, 36
 dikuasai kaum Paderi 32
 etika hidup 65-8, 72, 73, 76
 filsafat alam 59, 60, 78, 79, 255, 256
 filsafat manusia 61-5, 69, 80-3, 95-8, 179,
 257, 258
 gaya bahasa 98-104, 229-31, 246, 247
 gelar 130-5
 gerakan politik Islam 41, 42
 hasutan komunis 38
 hukum adat 112-8
 kebudayaan lisan 45, 46
 kekerabatan 221-8
 kesenian 281, 282
 masuknya Islam 26-8, 30
 menentang rodi 37
 perang saudara 18-20, 23
 pembaharuan ajaran Islam 38-42
 pengaruh asing 263, 264, 281, 282
 perdagangan masa VOC 18, 19, 22, 23, 32
 perlawanan terhadap Belanda 23, 24, 34-7
 sistem kemasyarakatan 69-72, 74-8, 106-9,
 119, 120, 130, 258
 sistem kesukuan 121-7, 129, 130
 sistem pemerintahan 54-8, 94, 105, 106
 sistem pendidikan Islam 40
 undang-undang 91-3, 109-12
 warisan 158-65
Miskin, Haji 29, 30
Moro 26
Muara Panas 37
Muaratakus, candi 7, 10
Muawiyah, Khalifah '24
Muda, Iskandar 23
Muhammadiyah 43
Muhammadsyah, Sultan 18, 23
Muko-Muko 18
Musi, sungai 7, 8, 10

N

Nagari
Nambi, Pemberontakan 14
nan Tingga Magek Jabang 274
Napoleon, Perang 20

nikah ganggang 197
ninik nan batigo 57

O

Ophir, gunung 3
Orang nan Empat 29

P

Padang 23, 24, 31, 32, 133, 201
Padang Candi 15
Padang Ganting, *nagari* 57
Padang Sibusuk 16, 17
Padangpanjang 36, 48
Paderi
 menguasai Minangkabau 32
 pembersihan umat Islam 29, 32, 38
 perlawanan terhadap Belanda 33-6
Pagaruyung, *kerajaan* 10, 15, 16, 18-20, 23, 24,
 46, 50, 57, 91, 107, 123
 dikuasai kaum Paderi 32
 masuknya Islam 26
 pusat kerajaan 31
 sistem pemerintahan 17, 28, 29
panca ring wilwatika 16
Painan, Perjanjian 23
palambok talabuah 147
Palembayan 34
pamacah tubo 67
Pamaluyu, Ekspedisi 10
Pamuncak Koto Piliang 57, 58
pananti 201
Pandai Sikat 29, 30, 33
pandeka 265, 266
panibo 200, 201
paningkah 280
Pantar 35
panungkek 135, 143
Perdamaian Koto Piliang 58
parewa, golongan 264, 281, 283
Pariaman 23, 33, 133
Pariaman Tiku 108
Pariangan 27, 48
Partai Nasional Indonesia (PNI) 43
Pasak Kungkuang Koto Piliang 58
Pasaman 31, 33, 34
Pasaman, Tuanku *lihat* Lintau, Tuanku
Pase 25, 26

parahankan 81
Patapang, *suku* 122, 129
Pauh 23, 24, 37
pegang gadai 165
Pelita Kecil 41
Pemedanan 189
penghulu
 gelar 132-5
 jabatan 131, 136, 138, 139, 143-5
 pakaian 142, 143
 pantangan 140-2
 pidato penobatan 253, 254
 upacara penobatan 145-7
penghulu pucuk 94
penghulu *suku* 106
perkawinan
 aspek sosial 210, 211, 213-9
 hukum 195-7
 mahar 200, 201
 peminangan 199, 200
 perjamuan 209
 pola 193-5
 tata-cara 197-9, 203-8, 269
Persatuan Dagang Indonesia (Persdi) 43
Persatuan Guru Agama 42
Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) 43
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 43
Persatuan Ulama Sumatera 42
perut 106
Petak, Dara 11
Pinawan, *suku* 123
Piobang, Haji 29
plakat panjang 35
Polo, Marco 25
Pono *lihat* Burhanuddin, Syekh
Prasasti Kedudukan Bukit 7
Ptolomeus, Claudius 4, 5
pulang ke mamak 194
punggawa 106
pupuk batang padi 268-70, 279
Puro Panuah Koto Piliang 57
pusako 158, 160
pusako batolong 226
pusako rendah 162
putuik 117

R

Rachias 4
Raffles, Thomas Stanford 20

Raja Adat 28, 57
 Raja Alam 57
 Raja Dua Sela 17
 Raja Hitam 37
 Raja Ibadat 28, 57
 Raja Muda 58
 Raja Putih 24
 Rajakacik 58
 Rajapatni 15
 Raja Tiga Sila 17, 19, 28, 57
 rajo babandiang 107, 175, 176
 rang mudo 208
 Rangga Lawe, Pemberontakan 14
 rangkiang 187
 rantau 104, 105, 107, 108
 Rao 34
 raso jo pareso 73, 74, 76, 196
 Rasyod, Syahbilal 43
 rebana 280, 282
 regent 36, 37
 renah, Tuanku nan 29, 30, 33
 Rokan, sungai 15
 ruang 174, 177
 Ruhum 46
 rumah baanjungang 175, 176
 rumah batingkok 175
 rumah gadang
 arsitektur 172
 aspek kekerabatan 223-6
 fungsi sosial 176-81
 jenis 174, 175, 188, 189
 motif hiasan 183-6
 tata cara pendirian 181-3
 Rumandung, Sutan 50, 51
 Ruso nan Datang dari Lauik lihat Datuk Keru-
 manggungan

S

Sabak 24
 Sadeng, Pemberontakan 13
 saduo 155, 156
 Saidi, Anwar St. 43
 Sailendra 8
 saiyo sakato 76, 77
 sako 158, 160
 salawat dilang 282
 Salo, suku 129
 salung 275, 279, 281

sanak sudaro 230
 sandaro 166
 Sang Dewaraya lihat Aditiawarman
 Sanggaramawijaya, Sri Maharaja 10
 Saningbakar, nagari 58, 273, 275, 276
 sapantuik 223, 224
 saptapatri 17
 Sarekat Dagang Islam 42
 Sarekat Usaha 42
 Sarikat Adat Alam Minangkabau (SAAM) 42
 Sarikat Islam 42, 43
 Saruaso, nagari 17, 18, 24, 57
 sasaran 190
 Sekolah Adabiyah 40, 42
 Sewatang, Patih 26
 si tinjau lauik 107, 174, 176
 sidi 108
 Siguntur 10, 15
 Sijangek 53
 sijombang 274
 Sijunjung 31, 37
 silar lintau 266
 silat pauh 266
 silek 174
 Silungkang, nagari 38, 42, 58
 Simabur, nagari 32
 Simabur, Tuanku lihat Ismail, Syekh
 Simawang 20, 31, 32, 34, 58
 Simpuntuik 52
 sindia 262
 Singasari lihat Majapahit
 Singkarak, danau 20
 Singkawang lihat Singkuang
 Singkuang, suku 122, 125, 129
 Sintuk 18, 27
 Sipisang 34, 35
 sirih dalam carano 128
 sitaralak 266
 salo, suku 122
 sofisme 41
 Solok, kabupaten 34, 36, 37, 105
 Sri Maharaja Diraja 10, 20, 25, 46, 50, 53, 54
 Sriwijaya, kerajaan 6, 8, 10, 24, 25
 suarang 165
 Sukarno 43
 Sulit Air nagari 58
 Suluah Bendeng Koto Piliang 58
 Sumanik, nagari 17, 29, 57
 Sumatera Thawalib 41-3

Sumpah Palapa 13
 Sumpur Kudus 17, 28, 57
 Sungai Jambu, *nagari* 58
 Sungai Pagu 37
 Sungai Puar 34, 35
 Sungai Tarab 17, 24, 57, 58
surambi papek 107, 175, 176, 179
 Suran, Putri 18
 surau 189
surau, golongan 264, 283
 Suri Dirajo 50
 sutan 108
 Sutan, Taher Marah 43
 Suwarnabhumi, *kerajaan* 9, 10
 Suwarnadwipa 4, 5
 Syafei, M. 43, 282
 Syarif, Peto *lihat* Bonjol, Tuanku Imam

T

Tajadi, *bukit* 36
takanai baragiah 76
 Talang, *gunung* 105
 talibun 237
 Tambangan 35
 Tambusai, Tuanku 36
 Tan Tuah 58
 Tanah Datar, *luhak* 20, 31, 33-5, 48, 105, 123
 Tanca 14
 Tandikat, *gunung* 34
 Tang, Dinasti 25
 Tanjung, *suku* 123, 124
 Tanjung Barulak, *nagari* 31
 tansa 278, 280
 Tapanuli 35
 Tarantang Gadang 34
taratak 9
 Tarekat Canking 38
 Tarekat Naksabandiyah 38-43
 Tarekat Satariyah 27, 28, 39, 41
 Tarekat Ullakan 38
 Tarekat Wujudiyah 24, 28
 telempong 269, 270, 272, 280
 tembilang besi 159
tenggang raso 74
 Ternate 22
 Thaib, Jalaludin 43
 Thawalib School 40

Tiang Bungkok 51
 Tidore 22
 Tiku 23
 Tilatang, *nagari* 33
tirai takambang 147
 Tribuanaraya Mauliawarmadewa *lihat* Aditiawarman
tuah kato 99
 Tuan Kadi di Padang Ganting 57
tuduh 111
 Tunggal, Khatib *lihat* Bandang, Dato Ri
tungganai 106, 131, 180, 224
 Tuo, Tuanku nan 29, 31
tuo dusun 94
tuo kampung 106
Tupai Janjang 276
 Turki Muda 42

U

Ullakan 23, 27, 28, 37
ulayat 151, 152
umbuk umbai 111
 Ummayah, Dinasti 25
 Undang-undang Delapan 109, 110
 Undang-undang Dua Belas 109, 111, 112
 Undang-undang Dua Puluh 89, 109
 Undang-undang Luhak dan Rantau 89
urang ampek jinih 145, 148
urang awak 70
urang kurang 157
urang nan ampek 106
 Usmaniyah, Khalifah 30

V

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 22

W

Wahabi, *kaum* 30
 Walmiki 4
warih bajawek 223
warih dijawek 144, 145
 Waruyu, Tuan *lihat* Aditiawarman
 Wijaya, Raden 11, 14, 15
 Wisnu, Raja 8
 Wiswarupakumara, Mahamenteri 11

Y

Yahya, Haji 39, 41, 42

Yakub, Ilyas 43

Z

Zulkarnaen, Iskandar 4, 18, 24, 46